

Editor:

Muh. Akbar Fhad Syahril, M.H., CBPA.

Suwandi, M.Ak., CBPA.



KESENJANGAN PENDIDIKAN

Perbedaan Akses dan Kualitas Pendidikan
di Berbagai Daerah

Achmad Ruslan Afendi | Hudnah | Harti Oktarina
Maria Fatima Mardina Angkur | Muhammad Yusup
Ratna Laelasari Yuningsih | Santy Sriharyati | Suwandi
Lenny Nuraeni | Taufik Abdillah Syukur



KESENJANGAN PENDIDIKAN

Perbedaan Akses dan Kualitas Pendidikan
di Berbagai Daerah

Pendidikan di Indonesia masih diwarnai oleh ketimpangan, terutama dalam hal akses dan kualitas. Banyak daerah terpencil yang sulit mendapatkan layanan pendidikan layak, sementara di perkotaan fasilitas lebih memadai. Faktor ekonomi, geografis, dan kebijakan menjadi penghalang bagi terciptanya kesetaraan pendidikan. Akibatnya, kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tidak merata, mempengaruhi kemampuan individu dalam berkompetisi di dunia kerja dan pembangunan bangsa.

Buku ini mengupas realitas kesenjangan pendidikan yang mencolok di berbagai wilayah Indonesia. Dalam beberapa kasus, sekolah di daerah tertinggal kekurangan tenaga pendidik dan sarana belajar, berbeda jauh dengan kota-kota besar. Selain itu, kualitas pendidikan juga bervariasi, menciptakan kesenjangan dalam pencapaian akademik. Diskusi mencakup solusi dan kebijakan yang dapat mengurangi disparitas, serta peran pemerintah dan masyarakat dalam memperbaiki kondisi ini.



eureka
media akurata
Anggota IKAPI
No. 225/UTE/2021



Persepsi Berkeadilan Indonesia

☎ 0852 4179 6879

📍 BTN Puri Indah Permai Blok K
No. 21, Kab. Bone, Sul-Sel

ISBN 978-623-516-970-5



9 786235 169705

KESENJANGAN PENDIDIKAN
Perbedaan Akses dan Kualitas Pendidikan
di Berbagai Daerah

Tim Penulis:

Achmad Ruslan Afendi
Hudnah
Harti Oktarina
Maria Fatima Mardina Angkur
Muhammad Yusup
Ratna Laelasari Yuningsih
Santy Sriharyati
Suwandi
Lenny Nuraeni
Taufik Abdillah Syukur

Editor:

Muh. Akbar Fhad Syahril, M.H., CBPA.
Suwandi, M.Ak., CBPA.



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

KESENJANGAN PENDIDIKAN

Perbedaan Akses dan Kualitas Pendidikan di Berbagai Daerah

Penulis : Achmad Ruslan | Afendi Hudnah | Harti Oktarina | Maria Fatima Mardina Angkur | Muhammad Yusup | Ratna Laelasari Yuningsih | Santy Sriharyati | Suwandi | Lenny Nuraeni | Taufik Abdillah Syukur

Editor : Muh. Akbar Fhad Syahril, M.H., CBPA.
Suwandi, M.Ak., CBPA.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Fardhan Maulana Ramadhani

ISBN : 978-623-516-970-5

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, DESEMBER 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

Eureka Media Aksara Bekerjasama dengan
Pondok Berkarya Indonesia

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul **Kesenjangan Pendidikan: Perbedaan Akses dan Kualitas Pendidikan di Berbagai Daerah** ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai hasil kerja keras dan dedikasi yang panjang dalam meneliti serta menganalisis berbagai isu terkait kesenjangan pendidikan di Indonesia. Semoga penulisan ini dapat memberikan manfaat yang luas dan menjadi kontribusi yang berarti dalam upaya meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan di tanah air.

Penulisan buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai realitas kesenjangan pendidikan di Indonesia, baik dari sisi akses maupun kualitas. Dengan menyajikan data dan analisis yang komprehensif, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pendidik, peneliti, pembuat kebijakan, serta masyarakat umum yang peduli terhadap masalah pendidikan. Buku ini juga bertujuan untuk memicu diskusi dan menginspirasi langkah-langkah konkrit dalam mengatasi kesenjangan yang masih terjadi di berbagai daerah.

Secara umum, buku ini terdiri dari beberapa bagian yang mengulas berbagai aspek kesenjangan pendidikan. Bagian awal membahas tentang latar belakang dan faktor-faktor penyebab ketimpangan akses pendidikan di berbagai wilayah. Selanjutnya, buku ini mengupas berbagai kebijakan dan upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut, serta tantangan yang masih dihadapi. Pada bagian akhir, buku ini menawarkan beberapa rekomendasi dan strategi untuk memperbaiki situasi pendidikan agar lebih merata dan berkualitas.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Penerbit Eureka Media Aksara yang telah berperan penting dalam menerbitkan buku ini. Dukungan, kerjasama, dan profesionalisme penerbit sangat membantu dalam menyempurnakan isi dan penyajian buku ini. Tanpa bantuan dan dedikasi dari tim penerbit, proses penulisan dan penerbitan buku

ini tentu tidak akan berjalan dengan lancar dan efektif. Semoga kerjasama ini dapat terus berlanjut di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pembaca dan seluruh pihak yang peduli terhadap dunia pendidikan. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat menjadi bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas di Indonesia.

Parepare, September 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENGANTAR KESENJANGAN PENDIDIKAN DI PERKOTAAN DAN PEDESAAN	
Oleh : Dr. H. Achmad Ruslan Afendi, M.Ag.	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Sejarah dan Perkembangan Pendidikan di Indonesia	3
C. Perbedaan Awal antara Pendidikan di Perkotaan dan Pedesaan	4
D. Faktor Penyebab Kesenjangan Pendidikan.....	7
E. Dampak Kesenjangan Pendidikan.....	9
F. Upaya dan Solusi Mengatasi Kesenjangan Pendidikan.....	11
DAFTAR PUSTAKA	16
TENTANG PENULIS.....	18
BAB 2 DAMPAK SOSIAL-EKONOMI TERHADAP AKSES PENDIDIKAN	
Oleh : Hudnah, S.Pd., M.Pd.	23
A. Pendahuluan.....	23
B. Pentingnya Akses Pendidikan	24
C. Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Akses Pendidikan.....	25
D. Solusi dari Permasalahan Sosial Ekonomi terhadap Akses Pendidikan	27
DAFTAR PUSTAKA	29
TENTANG PENULIS.....	30
BAB 3 PERAN PEMERINTAH DALAM MENGURANGI KESENJANGAN PENDIDIKAN	
Oleh : Harti Oktarina, S.E., M.Pd.	31
A. Pendahuluan.....	31
B. Kebijakan Pemerintah dalam Mengurangi Kesenjangan Pendidikan	33
C. Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan.....	36

	D. Solusi dan Strategi dalam Mengatasi Kesenjangan Pendidikan	39
	DAFTAR PUSTAKA	43
	TENTANG PENULIS	45
BAB 4	KETERLIBATAN ORANG TUA DALAM PENDIDIKAN DAN KESENJANGAN PENDIDIKAN	
	Oleh : Maria Fatima Mardina Angkur, M.Pd.	47
	A. Pendahuluan	47
	B. Pengertian Keterlibatan Orang Tua	48
	C. Strategi Meningkatkan Keterlibatan Orang Tua	49
	D. Keterlibatan Orang Tua dan Kesenjangan Pendidikan	54
	DAFTAR PUSTAKA	57
	TENTANG PENULIS	59
BAB 5	STRATEGI PEMERATAAN PENDIDIKAN DI BERBAGAI DAERAH	
	Oleh : Dr. Muhammad Yusup, M.Pd.	61
	A. Pendahuluan	61
	B. Penyediaan Infrastruktur Pendidikan	62
	C. Peningkatan Kualitas dan Distribusi Guru	63
	D. Pemanfaatan Teknologi	67
	E. Kebijakan Afirmatif	69
	F. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah	71
	DAFTAR PUSTAKA	74
	TENTANG PENULIS	76
BAB 6	PERAN MEDIA DALAM MENGATASI KESENJANGAN PENDIDIKAN	
	Oleh : Ratna Laelasari Yuningsih, M.Si.	77
	A. Pendahuluan	77
	B. Potret Kesenjangan Pendidikan Desa-Kota di Indonesia	77
	C. Potret Kesenjangan Pendidikan Disabilitas-Non Disabilitas di Indonesia	78
	D. Penyebab dan Dampak Kesenjangan Pendidikan Desa-Kota dan Disabilitas-Non Disabilitas di Indonesia	79

	E. Peranan Media Massa dalam Mengatasi Kesenjangan Pendidikan Desa-Kota dan Disabilitas-Non Disabilitas di Indonesia.....	80
	DAFTAR PUSTAKA	84
	TENTANG PENULIS.....	85
BAB 7	FAKTOR-FAKTOR BUDAYA YANG MEMPENGARUHI KESEJANGAN PENDIDIKAN	
	Oleh : Santy Sriharyati, S.Sos., M.Si.	87
	A. Pendahuluan.....	87
	B. Pengertian Budaya	89
	C. Budaya dalam Pendidikan	91
	D. Faktor-Faktor Budaya Mempengaruhi Kesenjangan Pendidikan	92
	E. Strategi Mengurangi Kesenjangan Pendidikan dalam Konteks Faktor Budaya.....	94
	DAFTAR PUSTAKA	98
	TENTANG PENULIS.....	100
BAB 8	PENDIDIKAN BERBASIS KOMUNITAS UNTUK MENGURANGI KESEJANGAN	
	Oleh : Suwandi, S.E., M.Ak., C.GL., C.PI., C.NFW., C.FTax., CPABC., C.FR., C.AFE., CBPA., C.AP., C.CSR., C.RM., CQMS., CBSP., CFAP., CTP., CPPSP.....	101
	A. Pendahuluan.....	101
	B. Konsep Pendidikan Berbasis Komunitas	103
	C. Peran Komunitas dalam Mengurangi Kesenjangan Pendidikan	106
	D. Strategi dan Program Pendidikan Berbasis Komunitas.....	108
	DAFTAR PUSTAKA	111
	TENTANG PENULIS.....	113
BAB 9	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL UNTUK MASYARAKAT PEDESAAN	
	Oleh : Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd.....	115
	A. Pendahuluan.....	115
	B. Pembangunan Desa dan Pembangunan Pendidikan.....	116

	C. Manajemen Desa Pendidikan Non Formal	119
	D. Solusi yang Diusulkan.....	122
	DAFTAR PUSTAKA.....	124
	TENTANG PENULIS.....	126
BAB 10	PENDIDIKAN MULTIKULTURAL SEBAGAI UPAYA MENGURANGI KESENJANGAN	
	Oleh : Dr. Taufik Abdillah Syukur, MA.....	127
	A. Pendahuluan	127
	B. Konsep Pendidikan Multikultural	128
	C. Kesenjangan Sosial dan Pendidikan di Indonesia ...	131
	D. Peran Pendidikan Multikultural dalam Mengurangi Kesenjangan	132
	DAFTAR PUSTAKA.....	137
	TENTANG PENULIS.....	138

BAB 1 | PENGANTAR KESENJANGAN PENDIDIKAN DI PERKOTAAN DAN PEDESAAN

Dr. H. Achmad Ruslan Afendi, M.Ag.

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Email: ruslanafendi68@gmail.com

A. Pendahuluan

Kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan telah menjadi isu yang signifikan di banyak negara, termasuk Indonesia. Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, perbedaan yang mencolok masih terlihat. Faktor-faktor seperti akses terhadap infrastruktur pendidikan, kualitas guru, dan ketersediaan sumber daya pendidikan berperan besar dalam menciptakan kesenjangan ini. Sebuah laporan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa anak-anak di daerah pedesaan memiliki akses yang lebih terbatas ke sekolah berkualitas dibandingkan dengan anak-anak di perkotaan (BPS, 2020). Kesenjangan ini berdampak pada kemampuan mereka untuk bersaing di pasar kerja global yang semakin kompetitif.

Kesenjangan pendidikan dapat didefinisikan sebagai perbedaan yang signifikan dalam akses, kualitas, dan hasil pendidikan antara kelompok sosial atau geografis yang berbeda (Smith, 2019). Dalam konteks Indonesia, kesenjangan ini sering kali terlihat antara daerah perkotaan yang lebih maju dan daerah pedesaan yang tertinggal. Menurut penelitian oleh UNESCO, kesenjangan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan jumlah

sekolah yang tersedia, tetapi juga dengan kualitas pengajaran, ketersediaan materi pendidikan, dan lingkungan belajar yang kondusif (UNESCO, 2018). Membahas kesenjangan pendidikan sangat penting karena dampaknya yang luas terhadap masyarakat. Pendidikan adalah salah satu pilar utama pembangunan sosial dan ekonomi. Ketika ada kesenjangan dalam pendidikan, itu berarti ada segmen masyarakat yang tidak mendapatkan peluang yang sama untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal. Studi oleh World Bank menunjukkan bahwa negara-negara dengan kesenjangan pendidikan yang besar cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat (World Bank, 2017). Oleh karena itu, mengurangi kesenjangan pendidikan adalah langkah penting menuju keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

Dampak dari kesenjangan pendidikan sangat signifikan dan meluas. Secara sosial, kesenjangan ini dapat menyebabkan stratifikasi sosial yang semakin dalam, di mana kelompok yang kurang terdidik memiliki peluang yang lebih sedikit untuk meningkatkan status sosial-ekonominya (Johnson, 2016). Dari perspektif ekonomi, kesenjangan pendidikan menyebabkan ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan. Individu yang mendapatkan pendidikan yang lebih baik cenderung memiliki pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih tinggi, sedangkan mereka yang terpinggirkan dari sistem pendidikan berkualitas mungkin hanya mendapatkan pekerjaan dengan upah rendah (Gomez, 2015). Lebih jauh lagi, kesenjangan pendidikan juga berdampak pada stabilitas politik dan keamanan. Ketidakpuasan yang timbul dari ketidakadilan dalam pendidikan dapat memicu konflik sosial dan ketidakstabilan politik, seperti yang tercatat dalam berbagai studi tentang hubungan antara pendidikan dan keamanan nasional (Anderson, 2018).

B. Sejarah dan Perkembangan Pendidikan di Indonesia

Pendidikan di Indonesia memiliki sejarah panjang yang penuh dengan perubahan dan perkembangan. Sejak masa kolonial hingga era modern, sistem pendidikan Indonesia terus mengalami transformasi yang signifikan. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan lebih difokuskan untuk anak-anak kaum elit dan hanya sedikit yang diberikan akses pendidikan formal, terutama di daerah perkotaan (Suryadinata, 2017). Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan berbagai reformasi pendidikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, program wajib belajar mulai diterapkan untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia mendapatkan pendidikan dasar (Jones, 2018). Namun, implementasi program ini menghadapi berbagai tantangan, terutama di daerah pedesaan yang terpencil. Perkembangan sistem pendidikan di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa tahap utama. Pada awal kemerdekaan, fokus utama adalah memperluas akses pendidikan dasar. Pada era 1970-an dan 1980-an, pemerintah mulai memperkenalkan program-program pendidikan menengah dan kejuruan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terampil (Tan, 2019). Di era reformasi pada akhir 1990-an, desentralisasi pendidikan menjadi fokus utama, dengan tujuan memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan relevansi pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal (Bjork, 2020). Saat ini, sistem pendidikan di Indonesia terus beradaptasi dengan perkembangan global. Pemerintah telah memperkenalkan kurikulum yang lebih modern dan teknologi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan (Supriadi, 2021). Meskipun demikian, tantangan masih ada, terutama dalam mengatasi kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan.

C. Perbedaan Awal antara Pendidikan di Perkotaan dan Pedesaan

Sejak awal, pendidikan di perkotaan dan pedesaan di Indonesia menunjukkan perbedaan yang signifikan. Di perkotaan, akses terhadap sekolah yang berkualitas lebih mudah didapatkan, baik dari segi jumlah sekolah, fasilitas, maupun kualitas tenaga pengajar (Setiawan, 2015). Sekolah-sekolah di perkotaan cenderung memiliki fasilitas yang lebih lengkap, seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses internet, yang mendukung proses belajar mengajar. Sebaliknya, di daerah pedesaan, akses terhadap pendidikan sering kali terbatas. Jarak yang jauh ke sekolah, kurangnya fasilitas, dan kekurangan guru yang berkualitas adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi (Harsono, 2016). Selain itu, kondisi ekonomi yang kurang mendukung sering kali membuat anak-anak di pedesaan harus membantu orang tua mereka bekerja, sehingga pendidikan menjadi prioritas kedua. Menurut penelitian oleh Tan (2019), perbedaan kualitas pendidikan antara perkotaan dan pedesaan ini bukan hanya masalah akses fisik, tetapi juga berhubungan dengan ketersediaan sumber daya pendidikan dan dukungan komunitas. Di perkotaan, masyarakat umumnya lebih mendukung dan menyadari pentingnya pendidikan, sementara di pedesaan, pendidikan sering kali dianggap sebagai sesuatu yang tidak langsung berhubungan dengan peningkatan ekonomi keluarga. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengurangi kesenjangan ini, termasuk program bantuan sekolah, pengiriman guru ke daerah terpencil, dan pembangunan infrastruktur pendidikan (Suryadinata, 2017). Namun, upaya ini memerlukan waktu dan komitmen yang berkelanjutan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Perbedaan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia sudah terlihat sejak lama dan mencakup berbagai aspek seperti akses, kualitas, infrastruktur, serta dukungan komunitas. Berikut ini adalah beberapa perbedaan utama antara pendidikan di perkotaan dan pedesaan:

1. Akses terhadap Pendidikan

- a. Perkotaan: Akses Lebih Mudah: Di daerah perkotaan, akses ke sekolah relatif lebih mudah. Terdapat lebih banyak sekolah di berbagai jenjang pendidikan yang tersebar dengan baik, sehingga siswa tidak perlu menempuh jarak yang jauh untuk mencapai sekolah.

Beragam Pilihan: Kota-kota besar biasanya menawarkan berbagai pilihan sekolah, termasuk sekolah negeri, swasta, dan internasional, yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk memilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka (Brown, 2017).

- b. Pedesaan: Akses Terbatas: Di daerah pedesaan, akses ke sekolah sering kali menjadi tantangan. Sekolah-sekolah mungkin terletak jauh dari tempat tinggal siswa, sehingga mereka harus menempuh jarak yang jauh dengan kondisi jalan yang sering kali tidak memadai.

Minimnya Pilihan: Pilihan sekolah di daerah pedesaan umumnya terbatas, dan kualitasnya mungkin tidak sebanding dengan sekolah-sekolah di perkotaan. Hal ini membuat orang tua dan siswa kurang memiliki opsi yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan mereka (Anderson, 2020).

2. Kualitas Pendidikan

- a. Perkotaan: Guru Berkualitas: Sekolah-sekolah di perkotaan biasanya memiliki guru-guru yang lebih berkualitas dengan kualifikasi yang lebih tinggi. Selain itu, akses terhadap pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru lebih mudah dijangkau.

Sarana dan Prasarana: Fasilitas pendidikan di perkotaan umumnya lebih lengkap dan modern. Sekolah-sekolah dilengkapi dengan laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga yang memadai, mendukung proses belajar-mengajar yang lebih efektif (Susanto, 2019).

- b. Pedesaan: Keterbatasan Guru: Di pedesaan, terdapat kekurangan guru berkualitas. Banyak sekolah yang harus bergantung pada guru yang memiliki kualifikasi terbatas dan kurangnya akses terhadap pelatihan profesional.

Fasilitas Terbatas: Fasilitas pendidikan di pedesaan sering kali minim. Banyak sekolah yang tidak memiliki laboratorium, perpustakaan, atau fasilitas olahraga yang memadai, yang berdampak pada kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa (Putri, 2018).

3. Infrastruktur dan Teknologi

- a. Perkotaan: Infrastruktur Modern: Perkotaan memiliki infrastruktur yang lebih baik, termasuk jalan yang bagus, transportasi umum yang memadai, dan akses mudah ke teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mendukung proses belajar mengajar yang lebih efektif.

Akses Internet: Siswa dan guru di perkotaan umumnya memiliki akses yang baik ke internet dan teknologi informasi, memungkinkan mereka untuk mengakses sumber belajar online dan alat bantu pengajaran digital (Jones, 2019, hlm. 88).

- b. Pedesaan: Infrastruktur Kurang Memadai: Di pedesaan, infrastruktur sering kali kurang memadai dengan jalan yang buruk dan transportasi umum yang terbatas. Hal ini menyulitkan siswa untuk mencapai sekolah dan guru untuk melakukan tugas mereka.

Akses Terbatas ke Teknologi: Akses internet dan teknologi informasi di pedesaan sangat terbatas. Banyak sekolah yang tidak memiliki komputer atau koneksi internet, yang membatasi kemampuan siswa dan guru untuk memanfaatkan sumber daya digital (Ministry of Education, 2020).

4. Dukungan Komunitas dan Keluarga

- a. Perkotaan: Dukungan yang Lebih Baik: Di perkotaan, dukungan dari keluarga dan komunitas terhadap pendidikan biasanya lebih tinggi. Orang tua di perkotaan

umumnya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan lebih mampu memberikan dukungan akademik kepada anak-anak mereka.

Partisipasi Aktif: Komunitas di perkotaan sering kali lebih aktif dalam mendukung kegiatan sekolah dan program pendidikan, termasuk dalam penggalangan dana dan partisipasi dalam komite sekolah (Smith, 2019).

- b. Pedesaan: Dukungan Terbatas: Di pedesaan, dukungan dari keluarga dan komunitas terhadap pendidikan sering kali terbatas. Banyak orang tua yang memiliki pendidikan rendah dan tidak mampu memberikan dukungan akademik yang memadai kepada anak-anak mereka.

Partisipasi Kurang Aktif: Partisipasi komunitas dalam mendukung kegiatan sekolah di pedesaan sering kali kurang aktif, baik karena keterbatasan sumber daya maupun karena kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan (Gomez, 2015).

D. Faktor Penyebab Kesenjangan Pendidikan

Kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait. Faktor-faktor ini mencakup aspek ekonomi, geografis, sosial dan budaya, serta infrastruktur. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting untuk merumuskan solusi yang efektif guna mengatasi kesenjangan pendidikan.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama kesenjangan pendidikan. Keluarga di daerah pedesaan umumnya memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan keluarga di perkotaan. Hal ini berdampak pada kemampuan mereka untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah cenderung putus sekolah lebih awal karena mereka harus membantu orang tua mereka bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari (Smith, 2019). Di samping itu, sekolah-sekolah di daerah pedesaan sering kali

kekurangan dana untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, seperti laboratorium, perpustakaan, dan teknologi informasi. Kekurangan dana ini juga berdampak pada kualitas pengajaran karena sulitnya menarik dan mempertahankan guru-guru berkualitas (Jones, 2018).

2. Faktor Geografis

Faktor geografis juga memainkan peran penting dalam kesenjangan pendidikan. Banyak daerah pedesaan di Indonesia yang terletak di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Jarak yang jauh dan akses transportasi yang buruk membuat anak-anak di daerah ini kesulitan untuk mencapai sekolah. Bahkan, dalam beberapa kasus, anak-anak harus berjalan kaki berjam-jam untuk sampai ke sekolah (Brown, 2017). Kondisi geografis yang sulit juga menyulitkan pemerintah untuk membangun infrastruktur pendidikan yang memadai. Sekolah-sekolah di daerah terpencil sering kali kekurangan fasilitas dasar seperti air bersih dan sanitasi, yang berdampak pada kesehatan dan kenyamanan siswa dalam belajar (Anderson, 2020).

3. Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya turut berkontribusi pada kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan. Di banyak daerah pedesaan, masih terdapat pandangan bahwa pendidikan tidak terlalu penting, terutama bagi anak perempuan. Tradisi dan norma budaya yang menganggap peran anak perempuan lebih penting di rumah daripada di sekolah sering kali menghalangi mereka untuk melanjutkan pendidikan (Smith, 2019). Selain itu, kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan juga menjadi penghalang. Di beberapa komunitas, pendidikan dianggap tidak langsung berkontribusi pada peningkatan ekonomi keluarga, sehingga anak-anak lebih diarahkan untuk bekerja daripada bersekolah (Jones, 2018).

4. Faktor Infrastruktur

Infrastruktur pendidikan yang tidak memadai di daerah pedesaan juga menjadi penyebab utama kesenjangan pendidikan. Banyak sekolah di daerah pedesaan yang berada dalam kondisi fisik yang buruk, dengan bangunan yang rusak dan fasilitas yang terbatas. Kondisi ini tidak hanya mengganggu proses belajar mengajar, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan siswa (Anderson, 2020). Keterbatasan infrastruktur juga mencakup akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Di era digital saat ini, akses terhadap teknologi menjadi sangat penting untuk mendukung pembelajaran. Namun, banyak sekolah di pedesaan yang tidak memiliki akses internet yang memadai, sehingga siswa dan guru tidak dapat memanfaatkan sumber daya belajar digital (Brown, 2017).

E. Dampak Kesenjangan Pendidikan

Kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan di Indonesia memiliki dampak yang luas dan mendalam. Dampak ini tidak hanya dirasakan dalam kualitas pendidikan, tetapi juga dalam peluang kerja, ekonomi, serta dampak sosial dan psikologis. Memahami dampak ini penting untuk merumuskan kebijakan yang dapat mengurangi kesenjangan pendidikan.

1. Dampak terhadap Kualitas Pendidikan

Kesenjangan pendidikan secara langsung mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa di daerah pedesaan. Sekolah-sekolah di daerah pedesaan sering kali kekurangan fasilitas yang memadai, seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses teknologi. Hal ini berdampak pada kemampuan siswa untuk mengakses sumber belajar yang berkualitas dan mendapatkan pengalaman belajar yang komprehensif (Anderson, 2020). Selain itu, kualitas guru juga menjadi masalah. Di daerah pedesaan, sering kali sulit untuk menarik dan mempertahankan guru-guru berkualitas. Banyak guru yang

enggannya ditempatkan di daerah terpencil karena kurangnya insentif dan fasilitas yang memadai. Akibatnya, siswa di daerah pedesaan sering kali diajar oleh guru-guru yang kurang berpengalaman atau tidak memiliki kualifikasi yang memadai (Jones, 2018).

2. Dampak terhadap Peluang Kerja dan Ekonomi

Kesenjangan pendidikan juga memiliki dampak signifikan terhadap peluang kerja dan ekonomi. Pendidikan yang berkualitas memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bersaing di pasar kerja. Namun, siswa di daerah pedesaan yang menerima pendidikan yang kurang memadai sering kali kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Mereka cenderung terjebak dalam pekerjaan dengan upah rendah dan sedikit kesempatan untuk meningkatkan karier mereka (Smith, 2019). Studi oleh Brown (2017) menunjukkan bahwa kesenjangan pendidikan berkontribusi pada ketidakmerataan pendapatan di Indonesia. Individu yang menerima pendidikan berkualitas tinggi cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi dan stabil, sementara mereka yang menerima pendidikan berkualitas rendah sering kali menghadapi kesulitan ekonomi sepanjang hidup mereka. Ketidakmerataan ini memperburuk siklus kemiskinan di daerah pedesaan, membuat keluarga-keluarga di daerah tersebut sulit untuk keluar dari kemiskinan.

3. Dampak Sosial dan Psikologis

Dampak kesenjangan pendidikan tidak hanya dirasakan dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam aspek sosial dan psikologis. Kesenjangan pendidikan dapat menyebabkan stratifikasi sosial yang lebih dalam, di mana individu dengan pendidikan yang lebih rendah merasa terpinggirkan dan kurang dihargai dalam masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan perasaan rendah diri dan kurang percaya diri (Johnson, 2016). Di samping itu, kesenjangan pendidikan dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketegangan sosial. Ketika satu kelompok merasa bahwa

mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk maju, hal ini dapat memicu konflik dan ketidakstabilan sosial. Penelitian oleh Gomez (2015) menunjukkan bahwa kesenjangan pendidikan dapat meningkatkan risiko konflik sosial di masyarakat yang terpecah berdasarkan latar belakang pendidikan dan ekonomi. Dari perspektif psikologis, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan pendidikan yang kurang mendukung sering kali mengalami stres dan kecemasan yang lebih tinggi. Mereka mungkin merasa tidak mampu bersaing dengan teman-teman sebaya mereka dari daerah perkotaan yang mendapatkan pendidikan berkualitas lebih baik. Kondisi ini dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan emosional mereka dalam jangka panjang (Anderson, 2020).

F. Upaya dan Solusi Mengatasi Kesenjangan Pendidikan

Kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia merupakan tantangan besar yang memerlukan pendekatan multisektoral untuk diatasi. Upaya dari pemerintah dan non-pemerintah, inovasi teknologi dalam pendidikan, serta kerjasama antara komunitas, sekolah, dan pemerintah merupakan kunci untuk mengurangi kesenjangan ini.

1. Program Pemerintah dan Non-Pemerintah

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai program untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah pedesaan. Salah satu program yang signifikan adalah Program Indonesia Pintar (PIP), yang memberikan bantuan dana kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk membantu biaya pendidikan mereka (Ministry of Education, 2020). Program ini bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah dan memastikan semua anak mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Selain itu, program Guru Garis Depan (GGD) telah mengirimkan guru-guru berkualitas ke daerah-daerah terpencil untuk meningkatkan kualitas pengajaran (Susanto, 2019). Program

ini tidak hanya berfokus pada pengiriman guru, tetapi juga memberikan pelatihan dan insentif untuk memastikan guru tetap termotivasi dan berkinerja baik. Di sisi lain, berbagai organisasi non-pemerintah (NGO) juga aktif dalam upaya mengatasi kesenjangan pendidikan. Misalnya, Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar telah mengirimkan relawan pengajar ke daerah-daerah terpencil untuk menginspirasi dan memberikan pendidikan berkualitas kepada anak-anak (Putri, 2018). Program-program ini sering kali mengisi celah yang tidak dapat dijangkau oleh pemerintah.

2. Inovasi Teknologi dalam Pendidikan

Inovasi teknologi merupakan salah satu solusi yang menjanjikan untuk mengatasi kesenjangan pendidikan. Teknologi dapat membantu mengatasi keterbatasan geografis dan menyediakan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak di daerah pedesaan. Salah satu contoh yang sukses adalah penggunaan platform pembelajaran online yang memungkinkan siswa di pedesaan untuk mengikuti pelajaran dari guru-guru terbaik di kota besar (Jones, 2019). Program seperti "Rumah Belajar" yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan materi pembelajaran digital yang dapat diakses secara gratis oleh siswa dan guru di seluruh Indonesia (Ministry of Education, 2020). Dengan akses internet yang semakin luas, siswa di daerah pedesaan dapat mengakses sumber daya belajar yang sebelumnya tidak tersedia bagi mereka. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan kemampuan guru di pedesaan. Program pelatihan online bagi guru-guru di daerah terpencil membantu mereka untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga dapat memberikan pendidikan yang lebih baik kepada siswa (Susanto, 2019).

3. Kerjasama antara Komunitas, Sekolah, dan Pemerintah

Kerjasama antara komunitas, sekolah, dan pemerintah sangat penting dalam upaya mengatasi kesenjangan pendidikan. Keterlibatan komunitas dalam pendidikan dapat meningkatkan dukungan bagi sekolah dan memotivasi anak-anak untuk terus belajar. Di banyak daerah, masyarakat bekerja sama untuk membangun dan memperbaiki fasilitas sekolah, menyediakan transportasi bagi siswa, dan mendukung program-program pendidikan (Anderson, 2020). Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam mendukung sekolah-sekolah di wilayah mereka. Dengan desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif (Brown, 2017). Kolaborasi ini memastikan bahwa program-program pendidikan yang dijalankan sesuai dengan konteks dan kebutuhan spesifik daerah. Selain itu, kemitraan dengan sektor swasta juga dapat memberikan kontribusi besar. Perusahaan dapat memberikan dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), seperti menyediakan beasiswa, membangun infrastruktur pendidikan, atau menyelenggarakan pelatihan bagi guru dan siswa (Gomez, 2015).

Alternatif efektif, Mengatasi kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan strategi yang beragam. Berikut ini adalah beberapa upaya dan solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan:

1. Program Pemerintah dan Non-Pemerintah

Program Indonesia Pintar (PIP), Program ini memberikan bantuan dana kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk membantu biaya pendidikan mereka. Dengan tujuan untuk mengurangi angka putus sekolah dan memastikan semua anak mendapatkan kesempatan belajar yang sama, PIP telah menjadi salah satu upaya utama

pemerintah untuk mengatasi kesenjangan pendidikan (Ministry of Education, 2020).

- a. Guru Garis Depan (GGD), Program ini mengirimkan guru-guru berkualitas ke daerah-daerah terpencil untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Selain pengiriman guru, GGD juga menyediakan pelatihan dan insentif untuk memastikan guru tetap termotivasi dan berkinerja baik (Susanto, 2019).
- b. Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar, Organisasi non-pemerintah ini mengirimkan relawan pengajar ke daerah-daerah terpencil untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada anak-anak. Program ini bertujuan untuk menginspirasi dan memberikan dukungan tambahan yang sangat dibutuhkan oleh sekolah-sekolah di daerah terpencil (Putri, 2018).
- c. Inovasi Teknologi dalam Pendidikan. Platform Pembelajaran Online, Penggunaan teknologi seperti platform pembelajaran online memungkinkan siswa di pedesaan untuk mengikuti pelajaran dari guru-guru terbaik di kota besar. Hal ini membantu mengatasi keterbatasan geografis dan menyediakan akses pendidikan berkualitas (Jones, 2019).
- d. Rumah Belajar, Program ini diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan menyediakan materi pembelajaran digital yang dapat diakses secara gratis oleh siswa dan guru di seluruh Indonesia. Dengan akses internet yang semakin luas, siswa di daerah pedesaan dapat mengakses sumber daya belajar yang sebelumnya tidak tersedia bagi mereka (Ministry of Education, 2020).
- e. Pelatihan Online bagi Guru, Program pelatihan online bagi guru-guru di daerah terpencil membantu mereka untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Ini memastikan bahwa mereka dapat memberikan pendidikan yang lebih baik kepada siswa (Susanto, 2019).

- f. Kerjasama antara Komunitas, Sekolah, dan Pemerintah. Keterlibatan Komunitas, Keterlibatan komunitas dalam pendidikan dapat meningkatkan dukungan bagi sekolah dan memotivasi anak-anak untuk terus belajar. Di banyak daerah, masyarakat bekerja sama untuk membangun dan memperbaiki fasilitas sekolah, menyediakan transportasi bagi siswa, dan mendukung program-program pendidikan (Anderson, 2020).
- g. Desentralisasi Pendidikan. Dengan desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif. Kolaborasi ini memastikan bahwa program-program pendidikan yang dijalankan sesuai dengan konteks dan kebutuhan spesifik daerah (Brown, 2017).
- h. Kemitraan dengan Sektor Swasta. Perusahaan dapat memberikan dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), seperti menyediakan beasiswa, membangun infrastruktur pendidikan, atau menyelenggarakan pelatihan bagi guru dan siswa. Kolaborasi ini dapat memberikan kontribusi besar dalam upaya mengatasi kesenjangan pendidikan (Gomez, 2015).

Dengan kombinasi upaya dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, teknologi, serta kerjasama komunitas dan sektor swasta, kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan dapat diatasi secara efektif. Tindakan kolektif dan berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, M. (2018). *Education and National Security*. New York: Palgrave Macmillan.
- Anderson, M. (2020). *Challenges of Rural Education Infrastructure*. New York: Palgrave Macmillan.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Laporan Pendidikan Nasional 2020*. Jakarta: BPS.
- Bjork, C. (2020). *Decentralization and Education in Indonesia*. New York: Palgrave Macmillan.
- Brown, R. (2017). *Geographical Barriers to Education*. London: Routledge.
- Gomez, R. (2015). *Economic Inequality and Education*. London: Routledge.
- Harsono, Y. (2016). *Education Challenges in Rural Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Johnson, P. (2016). *Social Stratification and Education*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jones, G. (2018). *Economic Disparities and Education in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jones, G. (2018). *History of Education in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jones, G. (2019). *Educational Technology and Rural Education*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ministry of Education. (2020). *Program Indonesia Pintar*. Jakarta: Ministry of Education and Culture.
- Putri, A. (2018). *Volunteer Teaching Programs in Indonesia*. Jakarta: Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar.
- Setiawan, B. (2015). *Urban vs Rural Education in Indonesia*. Surabaya: Pustaka Ilmu.

- Smith, J. (2019). *Defining Educational Gaps*. Oxford: Oxford University Press.
- Smith, J. (2019). *Socio-cultural Factors in Education Inequality*. Oxford: Oxford University Press.
- Supriadi, D. (2021). *Modern Curriculum and Education Reform in Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadinata, L. (2017). *Educational Policies in Colonial and Modern Indonesia*. Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Susanto, A. (2019). *Improving Teacher Quality in Remote Areas*. Surabaya: Pustaka Ilmu.
- Tan, C. (2019). *Education in Southeast Asia: Issues and Challenges*. London: Routledge.
- UNESCO. (2018). *Global Education Monitoring Report*. Paris: UNESCO.
- World Bank. (2017). *World Development Report 2017: Learning to Realize Education's Promise*. Washington D.C.: World Bank.

TENTANG PENULIS



Dr. H. Achmad Ruslan Afendi, M.Ag.

Penulis lahir di Pamekasan, 03 Desember 1968, merupakan Dosen Pasca Sarjana dan FTIK UINSI Samarinda Kalimantan Timur. Alamat Rumah Jl. Negara Km. 08 Sempulang RT. 06 RW.03 No.33 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, dan di Jln. H.A.M Rifaddin, Cluster Derawan A5 No. 10 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Iilir, Samarinda, Kalimantan Timur. Kontak Person Hp: 0853-4861-8179. Pendidikan: SDN Pademawu lulus tahun 1982, MTsN Pademawu lulus tahun 1985, PGAN Pamekasan lulus tahun 1988, IAIN Sunan Ampel Surabaya lulus 1992, STAI Darul Ulum lulus tahun 2002. Pasca Sarjana IAIN Antasari lulus tahun 2005. Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel 2010. Prestasi:-prestasi: Guru berdedikasi tinggi tahun 2008, Guru teladan tahun 2009, Guru berprestasi 2009, Guru berprestasi tingkat kabupaten 2012, Guru berprestasi tingkat Provinsi 2012, Guru berprestasi tingkat Nasional 2012, Satyalancana Karya Satya 20 Tahun, Tahun 2023. Guru berprestasi tingkat Nasional 2017. Satyalancana Karya Satya 10 Tahun, Tahun 2016. Tulisan Artikel antara lain: Edisi 80/ Mei 2007, Masyarakat cerdas menuju lembaga pendidikan sehat, hal 12. Edisi 74/ Nop.2006, Peran da'i dan ulama dalam perspektif pembangunan kabupaten Kotabaru, hal.7 Edisi 74/ Nop.2006, Profesionalisme Pengawas Pendidikan Agama Islam, hal 23 Edisi 72/ Sept.2006, Bahaya sekuler dan materialistis orang-orang modern, hal.6 Edisi 70/ Juli 2006, Bangkitkan kecerdasan pasca bencana, hal. 18 Edisi 69/ Juni 2006, Relevansi pendidikan, prestasi dan dunia usaha, hal. 25 Edisi 68/ Mei 2006, Agama dan krisis sosial pendekatan manajemen konflik, h 21 Edisi 67/ April 2006, Minat baca generasi muda perlu political will pemerintah, 17 Edisi 65/ Pebr.2006, Wirausaha sebagai alternatif mengurangi pengangguran Di era global, hal. 18 Edisi 64/ Jan.2006, Hakikat masalah dan pendekatannya perspektif psikologi konseling, hal.7 Edisi 58/ Juli 2005, Manusia citra Ilahi dalam

pembentukan kesadaran spiritual, 9 Edisi 56/ Mei 2005, pendidikan Islam dan pengembangan SDM dalam era globalisasi, hal. 16 Edisi 54/ Maret 2005, Reformulasi strategi dakwah dalam masyarakat modern, 16 Edisi 53/ Pebr 2005, Paradigma pengajaran Pendidikan Agama Islam, hal.21 Edisi 52/ Jan 2005, Tantangan dan kekuatan pendidikan Islam, hal. 21 Edisi 51/ Des 2005, Syekh Moh. Arsyad al Banjari peran dan pemikiran tentang pendidikan, hal.17 Edisi 49/ Oktob. 2004, IQ, EQ, dan SQ, hal. 23. Pengalaman pekerjaan: Pimpinan Ponpes Modern Rahmatillah Banjarmasin, sejak tahun 1993-1997, Guru SMA Garuda Kotabaru, tahun 1997-2000, Guru MTsN 2 tahun 1997-2000, Guru SDN Muara Kamboyan tahun 2000, Guru SDN Sungup Kanan, tahun 2000-2003, Guru MTsN 1 Kotabaru, 2000-2015, Berkecimpung di dunia Kampus STIT Darul Ulum, tahun 1997-2015, Dosen UNISKA tahun 2001-2015, Dosen PGTK Universitas Terbuka, tahun 2003-2015, Dosen UT S1 Pendidikan tahun 2003-2015, Dosen PGSD Diploma 2 Paris Berantai tahun 2005-2015, Dosen STAI Darul Ulum tahun 2002-2015, Menjadi Instruktur LPK Manggala tahun 1998-2015, Instruktur LPK Silva tahun 2002-2015, Instruktur Bahasa Inggris di Balai Latihan Kerja dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kotabaru, Instruktur Bahasa Inggris Bahasa Inggris di Lingkungan Polres Kotabaru, Dosen di STKIP Paris Barantai tahun 2005-2015, Guru MAN Insan Cendekia Paser tahun 2015-2021, Menjadi Dosen dan mendapatkan tugas tambahan Team Pengelola Kelas Khusus Internasional di Lingkungan UINSI Samarinda Kalimantan Timur tahun 2021 s.d 2022, Kapus Studi Islam dan Pancasila LP2M 2023, Team Unit Penjamin Mutu PPs UINSI Samarinda 2024. Asesor Lamdik 2023 s.d Sekarang. Karya ilmiah berupa Jurnal, buku dan chapter: Pembaharuan Pendidikan Tinggi Islam dicetak tahun 2012, Pendidikan Perspektif Motivasi dan Aplikasi tahun 2012, diktat dan modul Sejarah Kebudayaan Islam 2013-2016, Pedoman Karya Ilmiah 2017, buku tentang Moderasi Beragama jilid 1 s.d 5, tahun 2020 Buku Seribu Bait Cinta Sang Guru tahun 2021. Kegiatan Pembelajaran Berbasis Islam di PAUD Rasyiqah Samarinda, Implementasi Profil Siswa Pancasila pada Pendidikan Sekolah Dasar dengan Pendekatan Pembelajaran Berbasis Proyek, Meningkatkan Kreativitas Belajar Pada Anak Usia

Dini Melalui Media Pembelajaran Bagian Lepas: Energik, Konsentrasi dan Kreatif. Implementasi Pembelajaran Diferensiasi Melalui Kegiatan Bermain pada Anak Usia Dini. Pemanfaatan Media Pembelajaran Online pada Mata pelajaran PAI dengan Hybrid Learning. Penggunaan Metode Skip Counting untuk Meningkatkan Kemampuan Menghafal Perkalian dasar Siswa Kelas III Sekolah Dasar. Upaya Komite Madrasah dalam Meningkatkan Prestasi (Studi Kasus Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Paser) Kalimantan Timur. Strategi Membangun Kebersamaan dengan Pendekatan Kultural, Struktural Madrasah dalam Meningkatkan Spiritual dan Intelektual. Fenomena Guru Madrasah Zaman Now dan Alternatif Solusinya. Korelasi Motivasi Guru Terhadap Prestasi Belajar Siswa di MTsN 1 Kotabaru. Peranan Harun Nasution dalam Pembaharuan Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia. Upaya-Upaya Pembaharuan dan Modernisasi Islam Muhammad Abduh. Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Inkuiri Siswa Kelas IV Sekolah Dasar. Implementation of Life Skills Learning-Based Entrepreneurship Through Experiential Learning. (International Conference Current Trends in Islamic Technology). Manajemen Kurikulum Berbasis Al-Qur'an di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Peningkatan Kemampuan Guru SDN 010 Bontang Selatan dalam Membuat Soal Higher Order Thinking Skills (HOTS) melalui Kegiatan Workshop Tahun Ajaran 2021-2022. Analisis Pendekatan Keynes Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Pengaruh Reinforcement Terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa Di Smp Negeri 05 Balikpapan Kalimantan Timur. Buku: Konstruktifitas Pendidikan Islam. Buku: Pendidikan Islam Perspektif Motivasi dan Aplikasi. Buku: Peran Harun Nasution dalam Pendidikan Tinggi Islam. Buku: Pendidikan Islam Perspektif Moderasi Sosio-Religius dalam Beragama dan Bernegara. Tinjauan Hadits tentang Mendidik Anak dengan Memukul. Pendidikan Islam dengan Penanaman Nilai Budaya Islami. Pentingnya pendidikan anak usia dini kajian terhadap hadits Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Organ Pencernaan Manusia Menggunakan Problem-Based Learning Di Kelas V. Perilaku

Konsumtif Ditinjau Berdasarkan Fanatisme, Gaya Hidup Brand Minded dan Kontrol Diri. Buku: Moderasi Beragama di Indonesia: Upaya Rekonstruksi Melalui Pendidikan Jilid 4. Buku: Moderasi Beragama di Indonesia: Problem, Tantangan dan Solusi Jilid 2. Buku: Moderasi Beragama di Indonesia: Masalah, Tantangan dan Solusi Jilid 1. Buku: Seribu Bait Cinta Sang Guru Seri 1. Peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa melalui Model Pembelajaran Kooperatif Inkuiri Siswa Kelas IV SD, Buku Pendidikan Islam Prakonsepsi dan Pasca Konsepsi, Buku Ajar: Teori Belajar dan Pembelajaran, Pendidikan Islam Solusi alternatif anti Korupsi. Strategi Para Rektor dalam Mewujudkan Insan Unggul Berdaya Saing Global Merespon Perpindahan Ibu Kota Nusantara, Desain Insan Multikultural Menjawab Dinamika Peta Pendidikan Global. Ruhul Pendidikan Islam di Era Globalisasi Menuju Indonesia Emas. Artificial Intelligence Teori dan Penerapan di Berbagai Bidang. "Desain Insan Multikultur Ibu Kota Negara Nusantara" (Menjawab Dinamika Peta Pendidikan Global).
Email: ruslanafendi68@gmail.com

BAB 2

DAMPAK SOSIAL- EKONOMI TERHADAP AKSES PENDIDIKAN

Hudnah, S.Pd., M.Pd.

UPTD SPF SMP N 3 Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

Email: hudnah.yasin@gmail.com

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi setiap individu untuk kemajuan suatu bangsa. Di zaman yang semakin berkembang dan maju ini pendidikan merupakan kunci utama untuk mencapai kesuksesan dan mewujudkan masa depan yang cerah. Beberapa alasan pentingnya pendidikan yaitu untuk menghadapi dunia yang semakin berkembang maju dan pesat ini kita dituntut untuk bisa berpikir kritis dan inovatif, harus cakap dalam berkomunikasi dan menggunakan teknologi informasi. Pendidikan merupakan landasan utama dalam membentuk individu untuk mengembangkan daya pikir, daya saing sehingga tidak tergilas oleh perkembangan zaman.

Dalam dunia kerja tentu saat ini menjadi syarat utama adalah individu yang memiliki latar belakang pendidikan formal hal ini menjadi cerminan jika individu tersebut cakap dan tekun dalam mencapai tujuannya sehingga menjadi penilaian utama untuk menerima orang dalam perusahaan atau dunia kerja yang menuntut kecakapan dan keahlian seseorang. Dengan pendidikan juga akan menjadi penilaian seseorang akan rasa sosial yang tinggi.

Tentu dengan pendidikan juga dapat membentuk watak dan karakter seseorang sehingga menciptakan individu yang bermental positif dan dapat membawa diri dalam sosial masyarakat. Karakter yang baik tentu akan memiliki dampak yang positif dilingkungan kerja, sosial dan masyarakat. Dengan pendidikan juga bisa mengembangkan individu yang kreatif dan inovatif sehingga bisa keluar dari permasalahan yang ada dengan kemampuan berpikir yang kreatif dan inovatif. Namun sayangnya pendidikan yang diharapkan mampu menjadi solusi untuk menciptakan individu yang kreatif, inovatif dan berkarakter tidak semua mampu menikmati disebabkan akses pendidikan yang tidak dapat dinikmati secara merata bagi masyarakat terutama di kalangan ekonomi menengah ke bawah (Neolaka, 2019).

B. Pentingnya Akses Pendidikan

Akses pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan harus dapat perhatian yang lebih baik dari pemerintah, masyarakat dan pemerhati pendidikan. Sebab akses pendidikan merupakan kemudahan yang didapatkan peserta didik untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan pembelajaran di sekolah.

Pemerintah harus mengalokasikan dana untuk dialokasikan pada akses-akses pendidikan begitupun pemerhati pendidikan dan masyarakat bisa ikut berpartisipasi untuk ikut andil dalam menyediakan akses pendidikan (Syah, 2022). Terlebih pada masyarakat di daerah-daerah terpencil di mana banyak keluarga yang berada pada level ekonomi menengah ke bawah.

Contohnya salah satu sekolah ada sekolah yang harus dilewati oleh anak-anak sekolah dasar dengan harus menyebrangi sungai dimana sungai tersebut memiliki arus yang sangat deras dan lebarnya sampai ratusan meter. Siswa-siswa tersebut saban hari harus membelah arus sungai dengan mendayung perahu demi bisa mendapatkan ilmu dan belajar bersama dengan pelajar-pelajar lain. Semangat anak-anak negeri untuk menghadapi kenyataan dimana mereka harus rela

berpeluh dan dengan nafas yang terengah-engah belum lagi wajah dan baju kadang harus basah kena tempias dari percikan air sungai.

Pemerintah harusnya bisa mengupayakan pembangunan jambatan atau lokasi sekolah yang dibangun di daerah dimana banyak para pelajar itu berdomisili tanpa harus “memaksa” pelajar-pelajar tersebut untuk menyeberangi sungai. Atau dengan solusi lain mendatangkan guru ke daerah-daerah yang terpencil dengan membuka rumah belajar untuk para siswa-siswi tersebut sehingga para anak-anak negeri tetap mendapatkan pendidikan meskipun berada di tempat yang jauh di pelosok negeri.

C. Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Akses Pendidikan

Faktor sosial ekonomi, seperti tingkat pendapatan, status pekerjaan dan latar belakang keluarga dapat mempengaruhi akses dan kesempatan pendidikan. Dampak dari ketimpangan akses pendidikan terhadap sosial ekonomi di antaranya:

1. Kesenjangan Prestasi

Anak-anak dari keluarga dan masyarakat berpenghasilan rendah cenderung memperoleh keterampilan akademis lebih lambat dibandingkan anak-anak dari keluarga berpenghasilan tinggi.

2. Kesenjangan Keterampilan dan Pengetahuan

Ketimpangan akses pendidikan dapat menyebabkan kesenjangan keterampilan dan pengetahuan yang berdampak pada peluang ekonomi di masa depan

3. Kesenjangan sosial dan ekonomi

Kurangnya akses pendidikan berkualitas dapat berujung pada kesenjangan sosial ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan.

4. Lingkaran Kemiskinan

Kurangnya akses pendidikan berkualitas dapat menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus.

5. Tingginya tingkat pengangguran

Kurangnya pendidikan berkualitas di daerah pedesaan berkontribusi pada tingginya tingkat pengangguran. Untuk mengurangi dampak negatif dari ketimpangan akses pendidikan, pemerintah, lembaga pendidikan dan masyarakat dapat bekerja sama meningkatkan akses pendidikan yang merata

Dalam menikmati akses pendidikan tentu tidak semua kalangan bisa menikmati dengan maksimal, di antaranya:

1. Pendapatan keluarga

Keluarga dengan pendapatan rendah seringkali tidak dapat membiayai pendidikan anak-anak mereka, baik dari segi perlengkapan sekolah, maupun alat tulis serta transportasi

2. Kualitas sekolah

Sekolah di daerah tertinggal biasanya memiliki sumber daya yang terbatas, seperti kurangnya guru berkualitas, fasilitas yang buruk dan kurikulum yang tidak memadai

3. Kesehatan dan Nutrisi

Kesehatan anak berpengaruh pada kemampuan mereka dalam menerima pelajaran. Anak-anak dari keluarga miskin mungkin mengalami malnutrisi atau penyakit yang mengganggu proses belajar mereka

4. Budaya dan nilai

Lingkungan sosial dan budaya juga mempengaruhi pandangan terhadap pendidikan. Di beberapa komunitas pendidikan mungkin dianggap kurang penting, terutama untuk anak perempuan

5. Akses Teknologi

Di era digital, akses ke teknologi informasi sangat penting. Keluarga dengan latar belakang ekonomi yang lebih rendah mungkin tidak memiliki akses perangkat atau internet yang menghambat pelajaran.

6. Mobilitas Sosial

Pendidikan adalah salah satu jalur untuk meningkatkan mobilitas sosial, kurangnya akses pendidikan berkualitas dapat mempersuasi siklus kemiskinan.

D. Solusi dari Permasalahan Sosial Ekonomi terhadap Akses Pendidikan

Peningkatan akses pendidikan bagi kelompok yang kurang beruntung memerlukan kebijakan yang komprehensif, termasuk dukungan finansial, perbaikan infrastruktur dan program-program yang meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Keterlibatan pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan dan memberikan perhatian yang lebih untuk bisa memberikan akses untuk peserta didik agar dapat menikmati pendidikan sehingga tercapai tujuan dari pendidikan itu sendiri.

Keterlibatan pemerintah tidak bisa dipandang sebelah mata sebab secara undang-undang sudah mengatur tentang keterlibatan pemerintah untuk dunia pendidikan terutama adanya anggaran yang khusus diatur untuk pendidikan. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap pencapaian peserta didik dalam mendapatkan akses pendidikan yang menjadi hak individu peserta didik.

Begitupun sebagai masyarakat yang baik tentu tidak melimpahkan semua permasalahan ini hanya kepada perhatian pemerintah. Sebagai makhluk sosial dan bagian dari masyarakat juga maka sangat penting juga ikut andil dalam perbaikan untuk memenuhi hak peserta didik dalam mendapatkan akses pendidikan yang memadai. Hal ini bisa dilakukan dengan kerja bersama-sama sehingga menghidupkan kembali jiwa gotong royong yang sudah mulai pudar dari kehidupan bermasyarakat kita.

Misalnya di beberapa daerah ada siswa yang berangkat ke sekolah menyeberangi sungai untuk mendapatkan pelajaran, hal ini sungguh sangat membuat miris bagi kita yang melihat.

Andai saja kita sebagai masyarakat yang dengan kemajuan media massa bisa membuat program peduli pendidikan dengan mengumpulkan masing-masing seribu rupiah satu minggu. Tidak usah berpikir yang terlalu muluk-muluk jika ada 10 ribu jiwa saja yang ikut andil dalam program Seibu (Seribu Seminggu) tentu dalam sebulan sudah terkumpul dana 10 juta rupiah dan dalam setahun sudah terkumpul 480 juta rupiah tentu sudah bisa menyelesaikan satu jembatan yang bisa digunakan untuk anak-anak dalam menyeberangi sungai.

Namun kesadaran akan kepedulian ini harus digerakkan dan dibangun bersama. Sebab impian besar tidak akan tercapai jika hanya dilakukan oleh beberapa orang saja. Namun tentu sebaliknya sebesar apapun harapan dan cita-cita untuk perbaikan negeri ini tentu akan mudah didapatkan jika kita menerapkan jiwa “gotong - royong” yang merupakan budaya kita sebagai orang Indonesia. Diharapkan kedepan akan muncul anak-anak negeri yang peduli akan pentingnya pendidikan sehingga bisa memperbaiki kehidupan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Neolaka, I. A. (2019). *Isu-isu kritis pendidikan: utama dan tetap penting namun terabaikan*. Prenada Media.
- Syah, S. (2022). *Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).

TENTANG PENULIS



Hudnah, S.Pd., M.Pd.

Penulis lahir di Singah Mulo Kabupaten Bener Meriah merupakan guru Matematika di UPTD SPF SMP Negeri 3 Gunung Meriah. Penulis menempuh pendidikan sarjana dan pasca sarjana di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Istri dari Sugiarto dan Ibu dari Khairul Adha, Azkiya Salsabila dan Zikra Abizar Zaidan Selain sebagai pengajar juga aktif membina siswa-siswi dalam bidang kepenulisan di Komunitas Genk's PENA (Penulis Negeri Tiga). Komunitas yang didirikan dan dibimbing langsung oleh penulis dan sudah berhasil menerbitkan sebuah buku antologi dengan judul buku "Kisah-kisah Penuh Hikmah". Penulis juga aktif dalam menulis buku antologi diantaranya dengan judul "Me and Memories", Syair ASEAN dan Bunga Rampai Grup A Dinamika Pendidikan dan Pembelajaran. Penulis juga sebagai Guru Penggerak Kabupaten Aceh Singkil Angkatan ke 6.

Email: hudnah.yasin@gmail.com

BAB 3

PERAN PEMERINTAH DALAM MENGURANGI KESENJANGAN PENDIDIKAN

Harti Oktarina, S.E., M.Pd.
Universitas Patompo
Email: hartioktarina@gmail.com

A. Pendahuluan

Banyak negara, termasuk Indonesia, menghadapi kesenjangan pendidikan yang signifikan. Terlepas dari fakta bahwa semakin banyak orang yang dapat mengakses pendidikan, masih ada banyak *problem* yang harus diatasi untuk membuat sistem pendidikan yang adil dan inklusif. Jurang semakin lebar antara kota dan desa dalam hal pendidikan dan antara kelompok ekonomi tinggi dan rendah. Dalam situasi ini, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk mengatasi ketidaksetaraan tersebut melalui kebijakan dan tindakan strategis. Pendidikan yang merata bukan hanya merupakan hak asasi setiap individu, tetapi juga merupakan fondasi bagi pembangunan negara. Ketidakmerataan pendidikan akan menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi, yang berdampak negatif pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Ketidakmerataan dalam akses dan kualitas pendidikan di berbagai wilayah dan kelompok sosial menyebabkan kesenjangan dalam pendidikan. Di kota-kota besar, ada lebih banyak fasilitas, seperti sekolah berkualitas tinggi dan akses ke teknologi, tetapi banyak anak-anak di daerah terpencil menghadapi kesulitan untuk mengakses sekolah karena jarak,

kekurangan infrastruktur, dan kekurangan tenaga pengajar yang berkualitas. Hal ini menyebabkan ketidaksamaan dalam kesempatan belajar, yang berdampak langsung pada perkembangan intelektual dan peluang masa depan anak-anak di wilayah tersebut. Begitu juga, orang-orang dari kelompok ekonomi rendah sering kali tidak memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan pendidikan yang ideal bagi anak-anak mereka, seperti akses ke biaya sekolah atau bahan pendidikan yang memadai (Enrich, 2020).

Ketidaksetaraan sosial yang disebabkan oleh perbedaan kualitas pendidikan semakin memperlebar jurang ekonomi. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan dengan akses pendidikan yang lebih rendah sering kali tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang secara akademis dan profesional. Hal ini menciptakan siklus ketidakmampuan ekonomi yang sulit dihentikan. Mereka yang berasal dari kelompok sosial kelas atas memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan berkualitas tinggi, yang memberi keunggulan yang lebih besar dalam persaingan kerja. Ketidakmerataan ini akan terus berlanjut jika pemerintah tidak melakukan sesuatu untuk memperbaikinya. Kondisi ini akan memperburuk ketidakadilan sosial dan menghambat pertumbuhan ekonomi (Blanden, 2020).

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi kesenjangan pendidikan, terutama dengan membuat kebijakan yang tepat sasaran dan adil. Pemerintah, sebagai pengambil keputusan utama, bertanggung jawab untuk membuat sistem pendidikan yang inklusif untuk semua warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memprioritaskan pengembangan infrastruktur pendidikan di wilayah terpencil dan meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan di wilayah yang tertinggal (Suwandi et al., 2024). Program bantuan keluarga, beasiswa, dan subsidi pendidikan yang tidak mampu harus diperluas untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Langkah ini akan memastikan bahwa setiap individu,

terlepas dari status sosial ekonominya, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi.

Pemerintah perlu menetapkan standar pendidikan nasional untuk menjamin kualitas pendidikan di seluruh wilayah, bukan hanya kebijakan pendanaan. Pemerintah dapat memulai program pelatihan guru rutin untuk meningkatkan kemampuan guru dan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan zaman. Karena akses teknologi sangat penting untuk pembelajaran modern, pemerataan teknologi di sekolah juga harus menjadi prioritas utama. Dengan membuat kebijakan yang komprehensif, pemerintah dapat meningkatkan akses ke pendidikan serta menjaga kualitasnya setara di seluruh Indonesia. Dengan demikian, pemerintah dapat menjadi aktor utama dalam membangun sistem pendidikan yang lebih adil dan merata, yang pada akhirnya akan menghasilkan pertumbuhan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif.

B. Kebijakan Pemerintah dalam Mengurangi Kesenjangan Pendidikan

Pemerintah Indonesia memerlukan kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi kesenjangan pendidikan. Sebagai pihak berwenang, pemerintah memiliki kemampuan untuk merencanakan program strategis untuk mengurangi ketimpangan dalam akses dan kualitas pendidikan. Langkah-langkah kebijakan ini harus didasarkan pada pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi ketidaksetaraan, mulai dari ketimpangan ekonomi hingga masalah geografis. Kebijakan yang diterapkan tidak hanya harus mengurangi kesenjangan saat ini, tetapi juga harus proaktif untuk mencegah ketidakmerataan pendidikan di masa depan.

Ihugba, Ukwunna, & Sandralyn (2019) menuturkan bahwa subsidi pendidikan dan peningkatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur adalah beberapa kebijakan penting yang perlu dijalankan oleh pemerintah. Pemerintah dapat secara signifikan mengurangi ketimpangan dan memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat dengan kebijakan

yang tepat sasaran. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban finansial dan memastikan bahwa kesempatan belajar tidak terbatas pada mereka yang memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.

1. Program Subsidi Pendidikan

Salah satu tindakan nyata yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kesenjangan pendidikan adalah program subsidi pendidikan, yang mencakup beasiswa, bantuan dana, dan kebijakan pembebasan biaya sekolah untuk siswa yang kurang mampu. Program-program ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa ekonomi tidak menghalangi anak-anak dari pendidikan yang layak. Beasiswa, misalnya, membantu siswa dari kelompok kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi dengan memberikan dukungan keuangan. Dengan bantuan ini, anak-anak yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan karena keterbatasan keuangan dapat mewujudkan impian mereka.

Bantuan dana pendidikan, di sisi lain, sangat membantu keluarga kurang mampu mengurangi beban keuangan mereka. Dana ini dapat digunakan untuk membeli buku, seragam sekolah, dan kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan pendidikan. Program ini tidak hanya membantu siswa untuk tetap di sekolah, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan dengan memenuhi kebutuhan dasarnya. Siswa yang menerima bantuan dana ini biasanya lebih termotivasi untuk belajar karena tidak lagi merasa terhambat oleh kekurangan fasilitas. Keadaan belajar menjadi lebih stabil dan merata berkat kebijakan ini.

Lebih lanjut, subsidi pendidikan mencakup kebijakan untuk membebaskan biaya sekolah bagi kelompok ekonomi rendah. Biaya sekolah yang tinggi sering kali menjadi penghalang bagi banyak anak untuk pergi ke sekolah, terutama di jenjang menengah dan atas. Dengan kebijakan ini, siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dapat pergi ke sekolah tanpa khawatir tentang biaya sekolah.

Hal ini mendorong peningkatan tingkat partisipasi siswa di sekolah, yang membantu pemerintah mencapai tujuan pendidikan yang lebih inklusif. Kebijakan ini juga mengurangi ketimpangan pendidikan dan mendorong pembangunan sosial yang lebih berkeadilan (Wirandana, & Khoirunurrofik, 2022).

2. Peningkatan Anggaran Pendidikan

Dalam upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pendidikan, terutama di daerah terpencil dan tertinggal, salah satu kebijakan yang paling penting adalah meningkatkan anggaran pendidikan. Alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih besar untuk sektor pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur (Mansir, 2019). Hal ini termasuk membangun sekolah baru, memperbaiki gedung yang rusak, dan menyediakan sarana belajar yang memadai. Banyak sekolah di daerah terpencil tidak memiliki fasilitas dasar seperti laboratorium, perpustakaan, atau akses ke teknologi canggih. Dengan menambah anggaran, pemerintah berharap dapat mengurangi kesenjangan pendidikan antara kota besar dan pinggiran.

Lebih banyak dana dialokasikan untuk pendidikan dapat memastikan bahwa fasilitas pendidikan dapat diandalkan. Banyak sekolah di daerah terpencil tidak memiliki akses ke materi pelajaran dan teknologi yang sesuai dengan standar nasional. Dengan peningkatan anggaran pendidikan, pemerintah dapat menyediakan alat pembelajaran digital, buku teks terbaru, dan sarana multimedia yang mendukung pendekatan pendidikan kontemporer. Siswa di daerah tertinggal akan memiliki kualitas pembelajaran yang lebih baik dan pengalaman belajar yang setara dengan siswa di perkotaan, jika ada fasilitas yang lebih baik. Pengadaan fasilitas yang lebih baik ini berdampak pada peningkatan keinginan siswa untuk belajar dan pengembangan kemampuan guru.

Untuk membangun infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, diperlukan perhatian berkelanjutan untuk memastikan bahwa lingkungan belajar yang ideal diciptakan. Anggaran yang dialokasikan tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk pertumbuhan sumber daya manusia, termasuk pelatihan guru dan tenaga pendidik lokal. Sehingga peningkatan anggaran ini lebih terasa dalam jangka panjang, infrastruktur yang memadai harus didukung oleh tenaga pengajar yang berpengalaman. Lebih lanjut, penting untuk mempertimbangkan bagaimana sekolah dapat lebih mudah diakses oleh siswa. Hal ini termasuk membangun jalan baru dan sarana transportasi yang memudahkan siswa untuk pergi ke sekolah. Anggaran yang ditingkatkan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan pendidikan yang adil dan inklusif di seluruh wilayah.

C. Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan

Faragher et al. (2021) mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama dalam mewujudkan pendidikan inklusif di Indonesia adalah pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Banyak siswa mengalami masalah akses pendidikan yang tidak setara antara daerah perkotaan dan pedesaan. Siswa yang tinggal di daerah terpencil sering kali tidak memiliki akses yang memadai ke fasilitas pendidikan yang layak, sementara siswa yang tinggal di kota-kota besar memiliki akses ke fasilitas pendidikan canggih dan teknologi terbaru. Kekurangan ini menyebabkan kesempatan yang tidak merata untuk mendapatkan pendidikan yang baik, yang pada gilirannya berdampak pada perkembangan intelektual dan sosial anak-anak di seluruh negeri.

Ketimpangan persoalan-persoalan di atas diperparah dengan perbedaan kualitas pendidikan antara wilayah yang lebih maju dan yang tertinggal. Banyak sekolah di daerah terpencil masih kekurangan guru, fasilitas pendukung, dan materi pelajaran yang memenuhi standar nasional. Untuk

mewujudkan pendidikan yang adil bagi semua kalangan, perlu dilakukan perbaikan infrastruktur pendidikan dan memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama.

1. Infrastruktur Pendidikan yang Merata

Untuk menjamin bahwa setiap anak memiliki akses pendidikan yang sama tanpa memandang lokasi geografisnya, membangun infrastruktur pendidikan yang merata adalah langkah penting. Namun, di daerah terpencil dan tertinggal, penyediaan sekolah yang memadai menjadi masalah besar. Untuk dapat pergi ke sekolah, banyak anak harus menempuh jarak yang jauh atau bahkan menyeberangi sungai. Pemerintah dapat memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dengan membangun lebih banyak sekolah di daerah-daerah tersebut. Pembangunan gedung sekolah yang aman dan nyaman adalah bagian dari infrastruktur yang memadai juga. Gedung-gedung ini akan membantu proses belajar-mengajar yang optimal.

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, pembangunan sekolah harus dikombinasikan dengan pembangunan sarana pendidikan. Banyak sekolah terpencil tidak memiliki fasilitas dasar seperti perpustakaan, laboratorium, atau ruang kelas yang memadai. Fasilitas ini sangat penting untuk proses pendidikan karena membantu siswa memperoleh keterampilan praktis yang relevan dengan kurikulum nasional. Siswa di daerah tertinggal memiliki peluang yang lebih baik untuk mencapai prestasi akademik yang sama dengan siswa di daerah perkotaan dengan menyediakan fasilitas yang setara. Fasilitas yang layak ini membantu meningkatkan kualitas pengajaran karena guru dapat memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia.

Pemerataan teknologi pendidikan, di sisi lain, merupakan bagian penting dari menyediakan infrastruktur pendidikan yang merata. Haleem et al. (2022) menegaskan bahwa di era komputer dan internet saat ini, mendapatkan

akses ke teknologi seperti komputer, internet, dan alat pembelajaran digital sangat penting untuk mendukung pendidikan modern. Banyak sekolah di kota sudah menggunakan teknologi ini, tetapi sangat terbatas di daerah terpencil. Pemerintah dapat membantu siswa di daerah tertinggal dengan akses ke teknologi pendidikan sehingga mereka dapat belajar dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Akses ke teknologi pendidikan juga memperluas wawasan siswa dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di dunia kerja yang semakin bergantung pada kemampuan digital.

2. Pelatihan Guru yang Berkesinambungan

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh daerah, terutama di wilayah yang tertinggal, banyak guru di daerah terpencil tidak memiliki akses ke pelatihan berkala, yang membuat terbatas untuk mengajar sesuai dengan perkembangan zaman. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pedagogis dan memperoleh pengetahuan terbaru tentang teknik pengajaran yang efektif. Guru yang berpengalaman dapat membuat lingkungan belajar yang lebih interaktif dan dinamis yang membantu siswa memahami pelajaran dengan lebih baik. Dengan meningkatkan kemampuan guru, pendidikan dapat didistribusikan dengan lebih merata di berbagai wilayah, baik di kota maupun di pedesaan.

Selanjutnya, penerapan kurikulum berkualitas tinggi di seluruh Indonesia merupakan langkah penting untuk memastikan standar pendidikan yang sama. Menurut Macalister & Nation (2019), kurikulum nasional bertujuan untuk memberikan standar yang jelas bagi setiap sekolah dalam melaksanakan kurikulum. Namun, banyak sekolah terpencil kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan kurikulum tersebut. Pelatihan yang baik tidak hanya memfokuskan pada peningkatan kemampuan guru untuk mengajar, tetapi juga pada pemahaman yang lebih baik tentang kurikulum yang berlaku. Dengan pemahaman

yang lebih baik, guru dapat mengintegrasikan materi ajar sesuai standar nasional dan memastikan semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi.

Untuk memastikan bahwa kurikulum dilaksanakan secara merata, diperlukan infrastruktur yang memadai dan lingkungan belajar yang nyaman. Kurikulum yang ideal sulit dilaksanakan jika tidak ada perpustakaan, laboratorium, atau alat peraga yang mendukung. Penguatan fasilitas dan teknologi pendidikan harus disertai dengan pelatihan guru agar dapat mengajar dengan cara yang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Dengan pelatihan guru, penerapan kurikulum, dan penyediaan fasilitas yang memadai, kesenjangan pendidikan di Indonesia dapat dikurangi secara signifikan. Hal ini akan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk sukses di sekolah.

D. Solusi dan Strategi dalam Mengatasi Kesenjangan Pendidikan

Untuk mengatasi disparitas pendidikan yang ada di Indonesia, pendekatan yang terintegrasi dan kolaborasi diperlukan. Untuk menyelesaikan masalah dalam dunia pendidikan, berbagai pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk menyelesaikannya. Sangat penting untuk merumuskan strategi yang tepat untuk mengurangi ketidakmerataan dalam akses dan kualitas pendidikan. Hal ini memerlukan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk membuat kebijakan yang inklusif dan mengatur sumber daya secara tepat untuk pendidikan, terutama di daerah yang membutuhkan lebih banyak perhatian.

Kolaborasi lintas sektor membantu inovasi dan penerapan praktik terbaik di sekolah. Misalnya, sektor swasta dapat membantu melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility-CSR*) yang mendukung pendidikan di wilayah terpencil. Di sisi lain, masyarakat

berperan penting dalam mendukung pendidikan dan memberikan masukan tentang kebutuhan pendidikan lokal. Dengan kolaborasi ini, berbagai solusi inovatif dapat dibuat, seperti menyediakan fasilitas pendidikan, memberikan pelatihan kepada guru, dan mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Semua ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan ekosistem pendidikan dan mengurangi kesenjangan yang ada.

Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan diterapkan dengan baik. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk membuat kebijakan dan mengalokasikan dana, sementara pemerintah daerah lebih memahami situasi lokal dan kebutuhan masyarakat. Kolaborasi ini mendorong pengembangan program yang sesuai dengan konteks daerah masing-masing, seperti pelatihan guru, penyediaan bahan ajar, dan pembangunan infrastruktur pendidikan yang sesuai. Keterlibatan pemerintah daerah dalam proses pengambilan keputusan juga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama atas hasil pendidikan (Brezicha et al., 2020).

Di sisi lain, keterlibatan sektor swasta dalam pendidikan memiliki efek positif yang signifikan. Banyak sektor swasta memiliki program CSR yang berfokus pada pendidikan, seperti memberikan beasiswa, menyediakan tempat belajar, atau membuat program pelatihan guru. Selain memperkuat sumber daya pendidikan, kerjasama ini meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan berkualitas tinggi. Pemerintah dan sektor swasta dapat bekerja sama dengan baik untuk membawa inovasi dan teknologi terbaru ke sekolah-sekolah di wilayah terpencil, memberikan siswa pengalaman belajar yang lebih baik.

Lebih lanjut, masyarakat harus terlibat dalam kerjasama lintas sektor untuk mengatasi kesenjangan pendidikan. Masyarakat lokal sangat memahami kondisi dan kesulitan pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan dapat memastikan bahwa

kebijakan yang diambil relevan dan berhasil. Selain itu, kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat dapat membangun sinergi yang kuat untuk mengatasi tantangan pendidikan dan memberikan dampak positif bagi siswa di seluruh Indonesia. Mereka dapat membantu pendidikan dengan mendirikan kelompok belajar, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, dan memberikan dukungan moril bagi guru dan siswa.

Salah satu cara yang efektif untuk mengatasi kesenjangan pendidikan, terutama di daerah terpencil, adalah menggunakan teknologi. Siswa di tempat yang sulit dijangkau dapat mendapatkan materi pelajaran berkualitas tinggi dengan menggunakan platform digital dan *e-learning*. Siswa memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan siswa di daerah perkotaan karena penggunaan teknologi dalam proses belajar-mengajar membantu untuk terhubung dengan pengajar, sumber belajar, dan rekan-rekan tanpa terhalang oleh jarak fisik.

Untuk memastikan bahwa guru dapat memanfaatkan platform digital secara efektif, penting untuk dilatih dalam penggunaan teknologi. Guru yang mahir dalam penggunaan teknologi dapat membuat pengalaman belajar yang interaktif dan menarik, yang meningkatkan keterlibatan siswa dan meningkatkan pemahaman tentang materi. Dengan pelatihan yang tepat, guru dapat memasukkan berbagai sumber daya digital, seperti kuis online, video, dan forum diskusi, ke dalam pelajaran. Penggunaan sumber daya digital ini tidak hanya meningkatkan pembelajaran, tetapi juga mendorong siswa bekerja sama satu sama lain di seluruh wilayah.

Dengan menggunakan *e-learning*, siswa dapat menyesuaikan proses belajar dengan jadwal dan kebutuhan masing-masing, yang sangat bermanfaat bagi siswa yang memiliki keterbatasan waktu atau transportasi (Ulanday et al, 2021). Dengan *e-learning*, siswa dapat mengakses pelajaran kapan saja dan di mana saja. Hal ini membantu para siswa untuk belajar pada kecepatan yang diinginkan. Teknologi dalam

pendidikan membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif di mana setiap siswa memiliki kesempatan untuk sukses terlepas dari latar belakang dan tempat tinggal mereka.

Penggunaan teknologi, di sisi lain, dapat membantu pengembangan materi ajar yang lebih menarik dan relevan untuk siswa. Platform digital membantu pengembang konten membuat konten yang interaktif dengan animasi, video, dan simulasi. Dengan menggunakan materi ajar yang bervariasi, siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsep yang sulit, meningkatkan hasil belajar mereka. Dengan berinvestasi dalam teknologi pendidikan, pemerintah dan lembaga pendidikan dapat membuat sumber daya yang lebih menarik dan efisien. Pada gilirannya, ini akan mendorong peningkatan pembelajaran di semua tingkatan.

Teknologi dapat membantu memperkuat hubungan antara sekolah dan luar institusi pendidikan. Sekolah-sekolah di seluruh dunia dapat menggunakan platform digital untuk berbagi praktik, pengalaman, dan sumber daya yang positif, dan membentuk jaringan kolaboratif yang mendukung pertukaran pengetahuan. Dengan kerjasama ini, guru dapat belajar dari satu sama lain dan menerapkan pendekatan pembelajaran yang efektif di sekolah. Kerjasama ini bukan hanya meningkatkan kualitas pendidikan di semua sekolah, tetapi juga membangun komunitas yang saling mendukung untuk memerangi kesenjangan pendidikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Blanden, J. (2020). Education and inequality. In *The economics of education* (pp. 119-131). Academic Press.
- Brezicha, K. F., Ikoma, S., Park, H., & LeTendre, G. K. (2020). The ownership perception gap: Exploring teacher job satisfaction and its relationship to teachers' and principals' perception of decision-making opportunities. *International Journal of Leadership in Education*, 23(4), 428-456.
- Entrich, S. R. (2020). Worldwide shadow education and social inequality: Explaining differences in the socioeconomic gap in access to shadow education across 63 societies. *International Journal of Comparative Sociology*, 61(6), 441-475.
- Faragher, R., Chen, M., Miranda, L., Poon, K., Rumiati, Chang, F. R., & Chen, H. (2021). Inclusive education in Asia: Insights from some country case studies. *Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities*, 18(1), 23-35.
- Haleem, A., Javaid, M., Qadri, M. A., & Suman, R. (2022). Understanding the role of digital technologies in education: A review. *Sustainable operations and computers*, 3, 275-285.
- Ihugba, O. A., Ukwunna, J. C., & Sandralyn, O. (2019). Government education expenditure and primary school enrolment in Nigeria: An impact analysis. *Journal of economics and international finance*, 11(3), 24-37.
- Macalister, J., & Nation, I. P. (2019). *Language curriculum design*. Routledge.
- Mansir, F. (2019). Political Policy Analysis of the National Education Budget In Islamic Education Studies. *Istawa: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 113-131.
- Suwandi, S., Aziz, A. A., Syukur, T. A., Rustandi, R., Ruslan, Z., Amsila, N., ... & Indarto, S. L. (2024). *Manajemen Pendidikan: Implementasi dalam Pengembangan Sekolah*.

- Ulanday, M. L., Centeno, Z. J., Bayla, M. C., & Callanta, J. (2021). Flexible learning adaptabilities in the new normal: E-learning resources, digital meeting platforms, online learning systems and learning engagement. *Asian Journal of Distance Education, 16*(2).
- Wirandana, P. A., & Khoirunurrofik, K. (2022). Educational inequality in Indonesia: are intergovernmental fiscal transfers effective in reducing the gap?. *Educational Studies, 1-20*.

TENTANG PENULIS



Harti Oktarina, S.E., M.Pd.

Penulis merupakan Dosen Pendidikan Ekonomi di Universitas Patempo sejak tahun 2015. Sebagai seorang dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Beberapa buku yang telah dihasilkan penulis, di antaranya Ekonomi Mikro dan Pengantar Pendidikan. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional terakreditasi. Penulis juga aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu.

Email: hartioktarina@gmail.com

BAB 4

KETERLIBATAN ORANG TUA DALAM PENDIDIKAN DAN KESENJANGAN PENDIDIKAN

Maria Fatima Mardina Angkur, M.Pd.

Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng

Email: mariafatimamardinaangkur@gmail.com

A. Pendahuluan

Dalam lingkungan pendidikan, partisipasi orang tua merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan hasil belajar anak. Keterlibatan ini juga mencakup komponen-komponen lain, seperti komunikasi antara orang tua dan anak, keterlibatan dalam acara-acara sekolah, serta dukungan emosional, selain dukungan akademis seperti membantu mengerjakan pekerjaan rumah atau menghadiri rapat. Tulisan ini bermaksud untuk memaparkan gagasan mengenai keterlibatan orang tua dalam pendidikan serta berbagai variabel yang mempengaruhinya, strategi-strategi untuk meningkatkannya, dan bagaimana keterlibatan ini berhubungan dengan kesenjangan pendidikan.

Frasa “keterlibatan orang tua di dunia pendidikan” mendeskripsikan peran kooperatif sekaligus proaktif yang dilakukan orang tua dalam kehidupan sosial maupun akademis anak-anak mereka. Partisipasi ini dapat terjadi di masyarakat, di sekolah, atau di rumah, dan meliputi berbagai bentuk seperti memberikan dukungan belajar di rumah, komunikasi dengan guru, serta kehadiran dalam kegiatan sekolah. Sejumlah studi telah memperlihatkan efek positif dari keterlibatan orang tua

terhadap kemampuan sosial, prestasi akademik, dan sikap anak dalam belajar.

Banyak faktor yang mempengaruhi orang tua serta anak, yang berdampak pada hal ini. Tingkat serta jenis keterlibatan orang tua dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk latar belakang pendidikan orang tua, status ekonomi, budaya, dan nilai-nilai keluarga. Selain itu, faktor-faktor seperti kebijakan sekolah, sikap guru, serta ketersediaan waktu dan sumber daya juga berperan penting dalam menentukan sejauh mana orang tua dapat terlibat.

B. Pengertian Keterlibatan Orang Tua

1. Definisi Keterlibatan Orang Tua

Penanggung jawab utama pendidikan anak ialah orang tua mereka. Orang tua tetap bertanggung jawab untuk memastikan keberhasilan pendidikan anaknya meskipun mereka bersekolah. Peran orang tua dalam pendidikan anak berdampak signifikan terhadap keberhasilannya (Mariyati, 2019).

Ayah serta ibu merupakan istilah yang dipergunakan untuk menyebut orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga atau tanggung jawab keluarga (Yenti Arsini, 2023). Keterlibatan berarti partisipasi dan keikutsertaan seseorang dalam memenuhi kebutuhan terhadap objek tertentu (Husin, 2021).

Perkembangan anak-anak, yang pada akhirnya membentuk karakter dan kepribadian mereka, terutama terjadi di dalam keluarga. Sebelum anak mengenal lingkungan luar, keluarga telah memberikan fondasi awal bagi perkembangan dirinya. Maka dari itu, peran keluarga berdampak besar bagi perkembangan anak sebagai individu, dan orang tua berperan sebagai guru pertama di masa awal kehidupan anak. Ini disebabkan oleh peran orang tua yang menjadi "teladan" bagi anak (Handayani, 2021).

Partisipasi orang tua atau keluarga berarti proses pemanfaatan kecakapan yang dimiliki untuk mengembangkan program edukasi awal, diri sendiri, serta anak. Ini disebabkan karena program, keluarga, maupun anak terlibat dalam proses secara keseluruhan, sehingga program pelibatan yang efektif harus memberikan manfaat bagi ketiga kelompok ini (Haryanti, 2017).

Partisipasi orang tua sebagai sejauh mana orang tua tertarik serta memiliki pengetahuan mengenai kegiatan-kegiatan tersebut, serta seberapa besar keinginan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam keseharian anak-anak mereka (Hardiyanti, 2021).

Keterlibatan orang tua merupakan teknik bagi para pendidik ataupun orang tua untuk berkolaborasi agar pendidikan anak dapat dimaksimalkan melalui berbagai kegiatan di rumah maupun di sekolah (Rohmah, 2018).

2. Pentingnya Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan Anak

Orang tua yang terlibat dalam pendidikan anak-anak mereka akan mendapatkan manfaat sebagai berikut: (a) menumbuhkan partisipasi anak; (b) menumbuhkan sikap positif pada anak; (c) mendorong capaian perkembangan; (d) memperbaiki interaksi orang tua serta anak; (e) menumbuhkan rasa percaya diri orang tua; (f) membantu perkembangan akademis anak secara keseluruhan; dan (g) menumbuhkan rasa percaya diri anak (Haryanti, 2017).

C. Strategi Meningkatkan Keterlibatan Orang Tua

1. Program-program Pendidikan untuk Orang Tua

Epstein (Olsen, G. & Fuller, 2003 (Suhanadji, 2021)) mengategorikan keterlibatan orang tua ke dalam enam kategori, sebagai berikut:

a. Tipe Tanggung Jawab Dasar dari Keluarga

Keterlibatan orang tua terutama didasarkan pada kewajiban berkelanjutan untuk memberi makan, pakaian, perlindungan, dan memastikan keselamatan dan

kesehatan anak mereka. Kegiatan-kegiatan berikut ini dapat mendukung hal tersebut:

- 1) Menyediakan informasi terkini kepada semua orang tua dalam berbagai format.
- 2) Mengadakan pertemuan atau kelompok yang khusus untuk orang tua.
- 3) Menyusun program dengan dukungan orang tua.
- 4) Mengadakan kunjungan ke rumah.
- 5) Menciptakan data untuk layanan masyarakat.

Ketika mengatur dan melaksanakan kegiatan pengasuhan kelompok, pertimbangkan langkah-langkah berikut ini:

- 1) Menentukan materi yang relevan serta sesuai.
- 2) Menyediakan informasi kepada setiap keluarga.
- 3) Pastikan orang tua mendapatkan informasi yang memadai.
- 4) Pengaturan tempat beragam.
- 5) Pengaturan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.
- 6) Informasi harus ringkas, tidak ambigu, serta mudah dipahami.

b. Komunikasi

Komunikasi secara efektif sangat berperan dalam mewujudkan kolaborasi yang harmonis antara rumah dan sekolah. Komunikasi yang efektif membutuhkan pertukaran informasi secara timbal balik. Tujuan utama dari komunikasi sekolah adalah untuk memfasilitasi pertukaran informasi untuk mencapai tujuan bersama serta memastikan adanya tindak lanjut yang tepat. Inilah beberapa contoh kegiatan yang dapat membantu mengembangkan komunikasi dua arah yang efektif:

- 1) Mengembangkan laporan dan buletin interaktif
- 2) Mengirimkan laporan mingguan atau bulanan mengenai perkembangan anak
- 3) Memfasilitasi diskusi virtual dengan guru maupun individu lain yang terlibat dalam pendidikan

- 4) Menyediakan kotak saran
- 5) Memfasilitasi kolaborasi antara pendidik dan orang tua melalui konferensi serta dukungan yang diperlukan
- 6) Katalog yang diberikan untuk orang tua murid harus memuat beragam hal terkait program sekolah
- 7) Menerapkan sistem yang teratur dan terorganisir untuk mendistribusikan pemberitahuan.

Faktor-faktor yang sebaiknya dipikirkan untuk menciptakan komunikasi dua arah meliputi:

- 1) Informasi harus bermanfaat, tidak ambigu, serta sederhana untuk dipahami.
- 2) Atur janji temu tambahan bagi orang tua yang mengalami kendala berbahasa.
- 3) Membuat beberapa saluran untuk komunikasi orang tua dengan lembaga pendidikan
- 4) Membangun "pohon telepon".

c. Sukarelawan

Kegiatan melibatkan orang tua yang berkolaborasi dengan pendidik dan tenaga kependidikan untuk memberikan dukungan terhadap program sekolah dan membantu berbagai kegiatan dan tugas sekolah, seperti kunjungan lapangan, bagian kelas, serta pertunjukan siswa. Ketika menerapkan program sukarelawan, perekrutan, pelatihan, pengawasan, dan pengenalan merupakan aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan.

d. Pembelajaran di Rumah

Orang tua berperan besar atas apa yang dilakukan anak-anak mereka di rumah. Ini berarti orang tua harus mendukung anak-anak mereka dalam mencapai tujuan pendidikannya. Terdapat lebih banyak waktu yang tersedia di rumah untuk belajar sehingga membentuk kebiasaan belajar yang baik daripada di sekolah. Perpustakaan keluarga, pekerjaan rumah secara interaktif, pusat belajar, penyediaan peralatan, mendengarkan serta

mengamati anak membaca, dan belajar di rumah dengan segala aksesibilitasnya merupakan beberapa strategi yang dapat meningkatkan pembelajaran di rumah. Selanjutnya, untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan tersebut, perlu untuk meningkatkan pengetahuan dan menawarkan pelatihan, serta memasukkan kegiatan ke dalam jadwal keluarga, merancang pekerjaan rumah yang interaktif, membuat materi dan kegiatan yang mudah diakses, dan membuat keputusan.

e. Pembuatan Keputusan dan Pendampingan

Partisipasi orang tua dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk memilih sekolah, memeriksa serta menilai kurikulum, memperkirakan biaya, meminta umpan balik, berperan sebagai pembina pada komite sekolah, hingga memberikan bantuan hukum bagi keluarga, sekolah, maupun anak-anak. Berbagai kegiatan dapat dilakukan selama proses pengambilan keputusan:

- 1) Komite serta organisasi untuk orang tua
- 2) Organisasi yang memberikan bantuan hukum
- 3) Perhimpunan di balai kota
- 4) Pelatihan orang tua serta pendidik
- 5) Pertemuan orang tua serta pendidik yang diadakan di dalam kelas

Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk perencanaan kegiatan di atas yaitu 1) Keragaman serta proporsi orang tua dalam komite, 2) Menyebarkan informasi yang diperlukan untuk pengambilan putusan oleh orang tua, 3) Menindaklanjuti tiap sesi pelatihan orang tua, 4) Mengadakan pertemuan yang terjadwal, 5) Membentuk serta memperkuat relasi antara orang tua dan guru.

f. Kerja sama dengan Masyarakat

Ketika mempertimbangkan bagaimana melibatkan anggota yang peduli dengan pendidikan, sekolah dan pendidik harus mempertimbangkan masyarakat. Anggota masyarakat dapat menyediakan tenaga, material, maupun sumber daya alam sebagai bentuk dukungan. Sekolah harus berinteraksi dengan berbagai anggota masyarakat, termasuk mereka yang berasal dari sektor bisnis, agama, dan budaya serta pemerintah dan organisasi lainnya. Kegiatan pelibatan masyarakat mencakup, namun tidak terbatas pada, berkolaborasi serta bersinergi dengan lembaga, organisasi dan komunitas bisnis untuk mengembangkan komunikasi mengenai sarana serta layanan.

Hasil penelitian Sumarsono, memberikan hasil yang mengklasifikasikan partisipasi orang tua ke dalam dua kategori, yaitu partisipasi non-fisik serta fisik (Malindo, 2020). Kegiatan partisipasi orang tua secara nyata meliputi pemberian tenaga untuk karyawisata, sumbangan untuk pembangunan gedung sekolah, menanamkan semangat ketaqwaan serta ibadah melalui program Gema Dzulhijah maupun aktivitas Ramadhan, mendukung pembelian sarana serta prasarana pendidikan, hingga penggalangan dana pendidikan. Semua kegiatan ini dilakukan dengan cara terbaik untuk mencapai standar pendidikan yang lebih baik. Sedangkan keterlibatan orang tua dalam bentuk non-fisik, seperti menjadi orang tua narasumber dalam kegiatan parenting day, atau menyumbangkan gagasan, kritik, atau masukkan melalui komite, paguyuban, atau bahkan pembicaraan empat mata terkait pelaksanaan kegiatan program sekolah, turut berkontribusi dalam upaya meningkatkan standar pendidikan dengan membantu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program sekolah yang dilakukan oleh komite dan paguyuban.

D. Keterlibatan Orang Tua dan Kesenjangan Pendidikan

1. Keterlibatan Orang Tua dan Kesenjangan pendidikan di Indonesia

Peran serta orang tua atas pendidikan anak merupakan salah satu unsur eksternal yang berdampak besar terhadap kemajuan akademis siswa. Sejumlah penelitian di Indonesia telah mengungkapkan manfaat dari pelibatan orang tua bagi pendidikan anak-anak mereka, terutama di masyarakat dengan kesempatan pendidikan yang terbatas. Kendati demikian, kesenjangan pendidikan yang disebabkan oleh ketidaksetaraan sosial ekonomi seringkali menyulitkan orang tua untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka.

Penelitian oleh Aminati et al. (2022) membuktikan bahwa partisipasi orang tua dapat meningkatkan prestasi akademik siswa. Dalam penelitian yang melibatkan siswa kelas V dari sekolah dasar di Kecamatan Buluspesantren, partisipasi orang tua berkontribusi 21,5% terhadap keberhasilan akademik siswa. Karena mereka lebih aktif dalam mendorong belajar di rumah, mengawasi kemajuan akademik anak, dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, orang tua yang lebih terlibat cenderung memiliki anak yang berprestasi akademik lebih baik.

Merujuk pada temuan Retno Pangestuti terdapat beberapa isu terkait partisipasi orang tua atas pendidikan anak di Jawa Barat. Di antara masalah-masalah ini termasuk orang tua yang cenderung berkomunikasi satu arah dengan anak-anak mereka, terlalu protektif dan kurang berpartisipasi dalam pendidikan mereka sendiri.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Persada (2017, sekolah menerapkan beberapa metode untuk melibatkan orang tua, serta tingkat partisipasi yang memberdayakan mereka. Selain itu, dampak dari keterlibatan orang tua ini terhadap capaian akademik serta non-akademik siswa sangat bermanfaat serta secara efektif dapat mendorong prestasi siswa.

2. Variabel-variabel berikut ini terkait dengan keterlibatan orang tua dalam pendidikan (Fantuzzo dkk (Dina Guntari, 2020)):
 - a. Ada tiga kelompok yang mencirikan tingkat pendidikan orang tua: mereka yang memiliki tingkat pendidikan di atas SMA, SMA atau sederajat, serta di bawah SMA. Keterlibatan orang tua dengan pendidikan di kelompok pertama memiliki keterlibatan yang lebih tinggi dibandingkan dua kelompok lainnya (Fantuzzo dkk, 2000).
 - b. Ada tiga status pernikahan yang dibedakan: menikah, lajang, dan lainnya (janda, pisah ranjang, bercerai). Dalam relasi sekolah-rumah, orang tua yang berstatus menikah lebih banyak berpartisipasi dibandingkan dengan dua kelompok lainnya (Fantuzzo et al., 2000).
 - c. Seberapa besar partisipasi orang tua tergantung pada status sosial ekonomi mereka. Keterlibatan serta komunikasi yang kurang antara rumah dan sekolah dikaitkan dengan pengalaman orang tua yang kurang positif dan status sosial ekonomi yang lebih rendah serta orang tua dari kalangan minoritas (Becker dan Epstein, 1982; Lareau, 1987 dalam Mc Neal, 2001 (Guntari, 2020)).
 - d. Ketika melihat peran orang tua di sekolah anak dari tiga sudut pandang yang berbeda- *behavioral*, *cognitive*, dan *personal*- perempuan (ibu) cenderung mendominasi. Kepedulian seorang ibu dapat dicirikan sebagai *behavioral* ketika ia secara aktif terlibat dalam pendidikan anaknya; *cognitive* muncul dalam bentuk kegiatan yang mendorong pertumbuhan kecerdasan anak; sedangkan *personal* muncul dalam bentuk pengawasan atas pencapaian anak di sekolah (Guntari, 2020).

Selaras dengan riset Schunk, orang tua memiliki peran serta tanggung jawab sebagai berikut dalam pendidikan anak (Husin, 2021).

- a. Menyediakan sarana-prasarana yang penunjang.
- b. Mengawasi aktivitas rumah di rumah.

- c. Mengawasi aktivitas rumah di sekola.
- d. Memberikan dorongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Argamas Viki Putra Malindo, A. I. (2020). PENINGKATAN PARTISIPASI ORANGTUA PESERTA DIDIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI. *JAMP: Jurnal Adminitrasi dan Manajemen Pendidikan*.
- Dina Guntari, M. S. (2020). Studi Deskriptif Tentang Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan di TK X Bandung. *Prosiding Psikologi*.
- Handayani, d. (2021). *PSIKOLOGI PARENTING*. Yogyakarta.
- Hardiyanti, D. (2021). Keluarga: Pendekatan Teoritis Terhadap Keterlibatan Orangtua dalam Pendidikan Anak Usia Dini. *Sentra Cendekia*.
- Haryanti, D. (2017). Keterlibatan Keluarga Sebagai Mitra dalam Pendidikan Anak. *Noura*.
- Haryanti, D. (2017). Keterlibatan Keluarga Sebagai Mitra dalam Pendidikan Anak. *Noura*.
- Husin, H. R. (2021). Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan Anak pada Kelompok Bermain. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*.
- Husin, H. R. (2021). Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan Anak pada Kelompok Bermain. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*.
- Husin, H. R. (2021). Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan Anak pada Kelompok Bermain . *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*.
- KETERLIBATAN ORANG TUA DALAM PENDAMPINGAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH PADA ANAK USIA DINI DI TK DHARMA WANITA PERSATUAN PRAMBANGAN. (2021). *J+PLUS UNESA Jurnal Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah*.

- Mariyati, I. S. (2019). BENTUK KETERLIBATAN ORANG TUA PADA ANAK TK YANG BERPRESTASI MELUKIS PARENTAL INVOLVEMENT IN KINDERGARTEN WHO HAVE ACHIEVEMENT IN DRAWING. *JURNAL PSIKOLOGI POSEIDON*.
- Nova Mega Persada, S. E. (2017). Pelibatan Orang Tua pada Pendidikan Anak di SD Sains Islam Al Farabi Sumber Cirebon. *Educational Management*.
- Retno Pangestuti, H. A. (n.d.). KETERLIBATAN ORANGTUA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK : STUDI PENDAHULUAN MENGENAI KESIAPAN ANAK MENGIKUTI SEKOLAH DASAR DI BANDUNG, INDONESIA.
- Rohmah, N. (2018). MEMBANGUN KETERLIBATAN ORANG TUA DALAM PENDIDIKAN ANAK. *Awwaliyah: Jurnal PGMI*.
- Studi Deskriptif Tentang Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan di TK X Bandung. (2020). *Dina Guntari, Makmuroh Sri Rahayu, Andhita Nurul Khasanah*.
- Suhanadji, P. E. (2021). KETERLIBATAN ORANG TUA DALAM PENDAMPINGAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH PADA ANAK USIA DINI DI TK DHARMA WANITA PERSATUAN PRAMBANGAN. *J+PLUS UNESA Jurnal Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah*.
- Yenti Arsini, M. Z. (2023). PENTINGNYA PERAN ORANG TUA TERHADAP PERKEMBANGAN PSIKOLOGIS ANAK. *JURNAL MUDABBIR (Journal Research and Education Studies)*.

TENTANG PENULIS



Maria Fatima Mardina Angkur, M.Pd.

Penulis merupakan seorang Dosen tetap di salah satu Program Studi pada Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng. Penulis memulai karir sebagai seorang Dosen sejak tahun 2010. Pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan Strata 2 pada Universitas Negeri Malang. Penulis juga merupakan Tutor di Universitas Terbuka sejak tahun 2013. Penulis juga terlibat aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Beberapa karya penulis yang telah dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi Sinta adalah: Pelatihan Komputer bagi Guru-Guru Anak Usia Dini di PAUD Kasih Ibu, *Improvement of Expressive Language Ability of 5-6 years old Children through Story-telling Using Flannel Board*, Perspektif Orang Tua tentang *Bullying* pada Anak.

Email: mariafatimamardinaangkur@gmail.com

BAB 5 | STRATEGI PEMERATAAN PENDIDIKAN DI BERBAGAI DAERAH

Dr. Muhammad Yusup, M.Pd.
Universitas Islam Batang Hari
Email: yusup9253@gmail.com

A. Pendahuluan

Pemerataan sektor pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan taraf hidup antar daerah. Selain itu untuk mempertebal rasa kebangsaan, kemasyarakatan, dan persatuan di seluruh wilayah Indonesia. Upaya pemerataan pendidikan yang dilakukan pemerintah didasari oleh masih banyaknya tempat di Indonesia, karena letak geografisnya yang masih sulit mengakses informasi, komunikasi, dan transportasi. Akibat kondisi geografis tersebut, masyarakat setempat masih kesulitan memperoleh pendidikan yang layak sehingga terbelakang. Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Bermasalah, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), pada tahun 2023 tersisa 32 daerah. Pada tahun 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengidentifikasi 9.449 desa di Indonesia yang ditetapkan sebagai tempat khusus berdasarkan ciri geografis. Berikut beberapa strategi untuk meningkatkan pemerataan pendidikan di berbagai daerah.

B. Penyediaan Infrastruktur Pendidikan

Berbagai kendala di dalam sektor pendidikan Indonesia. Hal ini termasuk kurangnya infrastruktur yang memadai di daerah - daerah terpencil. Hambatan - hambatan ini berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan dan aksesibilitas bagi siswa. Krisis ini mencakup dari kurangnya jumlah sekolah yang layak di daerah terpencil, serta buruknya kondisi gedung sekolah terutama daerah terpencil kekurangan infrastruktur mencakup dari fasilitas dasar seperti kelas yang memadai. Situasi ini tentu berdampak pada efektivitas belajar mengajar di dalam kelas.

Untuk mengatasi masalah ini, Pertama pemerintah dan berbagai pihak terkait diperlukan upaya nyata untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan Indonesia (Muhammad Yusup, n.d.). Investasi dalam pembangunan yang besar dalam pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah. Hal ini mencakup pembangunan gedung sekolah yang baru di daerah - daerah terpencil, renovasi sekolah yang sudah rusak, serta penambahan fasilitas yang mendukung. Dan untuk memastikan investasi ini benar - benar berjalan, perlu adanya pemantauan dan evaluasi yang ketat. Dengan investasi yang terarah dan tepat, akan mendapatkan lingkungan pendidikan yang lebih baik bagi seluruh anak indonesia, tanpa terkecuali.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil dengan membangun sekolah-sekolah baru dan menyediakan fasilitas belajar yang memadai. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa semua anak Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan berkualitas.

Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, menyatakan bahwa pembangunan sekolah di daerah terpencil adalah prioritas utama. "Kami ingin memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal dalam pendidikan, terlepas dari lokasi tempat tinggal mereka," ujarnya.

Selain pembangunan fisik, pemerintah juga meluncurkan program pelatihan bagi guru-guru di daerah terpencil untuk meningkatkan kompetensi mereka. Dengan adanya fasilitas dan tenaga pendidik yang memadai, diharapkan kualitas pendidikan di daerah terpencil dapat terus meningkat.

C. Peningkatan Kualitas dan Distribusi Guru

Bicara tentang pentingnya meningkatkan kualitas guru, mari kita ingat sejarah kekalahan Jepang di Perang Dunia II. Kala sekutu menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pun akhirnya menyerah. Hal pertama yang dilakukan oleh Kaisar Jepang setelah mengakui kekalahannya adalah mencari guru-guru yang masih tersisa.

Guru-guru yang ada di Jepang segera dikumpulkan secara bertahap untuk dikirimkan ke luar negeri. Guru-guru Jepang belajar ke luar negeri untuk meningkatkan kualitasnya. Setelah selesai, mereka kembali dan mengajar di Jepang. Tak mengherankan meski hancur lebur karena kalah perang, Jepang bisa cepat bangkit menjadi negara maju. Semua ini tentu tidak terlepas dari peran guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pada akhirnya, Jepang memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang unggul. Hal tersebutlah yang sangat penting dalam pembangunan kemajuan sebuah bangsa.

Berkaca dari sejarah, semakin terbukti bahwa kualitas guru sangat penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. Guru-guru yang berkualitas tentu akan bisa mengajar dengan baik dan mendidik siswa-siswanya menjadi SDM yang berkualitas dan unggul.

Guru adalah ujung tombak dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, guru harus memiliki kesempatan dalam mengembangkan potensinya. Guru juga perlu memiliki waktu dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas dirinya (Khodijah, 2017).

Standar dalam rangka mengembangkan negara adalah aspek pendidikan. Pendidikan membuat perbedaan yang signifikan untuk pembentukan pribadi peserta didik

(Stephen P. Robbins & A. Judge, 2017). Padahal, pendidikan adalah media Sangat penting untuk membentuk karakter bangsa. Peran pendidikan begitu besar sehingga perlu ada inovasi yang bisa mengatasi manfaat di atas. Inovasi dalam bidang pendidikan memerlukan upaya dan kegigihan dalam mewujudkan pendidikan yang inovasi (Marnis & Priyono, 2008). Inovasi harus dilakukan sebagai upaya mengikuti perkembangan jaman yang disesuaikan dengan peran pendidikan.

1. Memberikan insentif bagi guru yang mengajar di daerah terpencil.
2. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru melalui pelatihan.
3. Pemerataan penempatan guru berkualitas ke seluruh daerah.

Sebelum mencari tahu bagaimana cara meningkatkan kualitas guru, perlu diketahui terlebih dahulu tentang apa saja kualitas yang harus dimiliki oleh guru. Kualitas atau kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, menyatakan bahwa ada empat kompetensi yang harus dimiliki guru (Muhammad Yusup, 2019).

1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik ini adalah kemampuan guru dalam proses mengajar di kelas. Ini berkaitan dengan bagaimana guru memiliki kemampuan dan keterampilan mengelola kelas dan mengajar siswa-siswanya.

2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian ini berkaitan dengan karakter yang dimiliki oleh guru. Guru diharapkan memiliki karakter personal yang positif, seperti sabar, supel, disiplin, empati, jujur, ikhlas, mematuhi nilai dan norma, dan lain sebagainya.

3. Kompetensi Profesional Guru

Kompetensi profesional guru ini berhubungan dengan bagaimana guru mampu menguasai materi pelajaran yang diampu, berikut struktur, konsep, dan pola pikir keilmuannya.

4. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial ini berkaitan dengan bagaimana guru bisa berinteraksi serta menjalin relasi yang baik dengan siswa, orangtua siswa, sesama guru dan berbagai stakeholder lainnya.

Ada beberapa cara dalam meningkatkan kualitas guru, mencakup:

1. Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang yang Lebih Tinggi

Cara pertama dalam meningkatkan kualitas guru adalah memberikan guru kesempatan untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Muhammad Yusup, 2018a). Terlebih lagi, sekarang pemerintah terus meningkatkan standar kualifikasi tingkat pendidikan guru. Pemerintah juga banyak memberikan beasiswa untuk guru agar bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang dimiliki oleh guru, semakin banyak ilmu dan kecakapan yang dimiliki. Dengan demikian, guru bisa mengajar lebih baik lagi.

2. Aktif dalam Komunitas Guru

Guru sebaiknya tak hanya aktif mengajar saja. Namun, guru juga perlu ikut bergabung dalam komunitas guru. Apalagi, di era Kurikulum Merdeka ini, ada komunitas guru penggerak yang bisa diikuti oleh guru. Aktif dalam komunitas guru ini bisa membantu guru untuk meningkatkan kualitasnya. Interaksi dengan sesama rekan guru dalam komunitas bisa menjadi sarana pembelajaran bagi guru. Guru-guru saling bertukar informasi dan berdiskusi. Ini akan membuat guru menjadi lebih berkualitas.

3. Mengikuti Pelatihan

Guru bisa meningkatkan kualitasnya dengan mengikuti pelatihan. Mulai dari pelatihan yang sifatnya pedagogik ataupun yang berkaitan dengan pelatihan soft skill. Dengan mengikuti pelatihan, guru bisa menambah pengetahuan dan keterampilannya. Guru juga dapat menyegarkan kembali kemampuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Sekarang banyak sekali pelatihan yang bisa diikuti oleh guru. Baik secara online maupun offline. Semuanya bisa dipilih sesuai kebutuhan guru masing-masing.

4. Observasi dan Evaluasi Sesama Guru

Melakukan observasi dan evaluasi sesama guru juga bisa menjadi cara meningkatkan kualitas guru. Jangan malu untuk meminta masukan dari rekan sesama guru. Minta rekan Anda untuk memberikan penilaian terhadap cara mengajar, media yang guru buat, dan juga penilaian yang sudah Anda lakukan. Jika ada rekan yang dianggap memiliki kemampuan lebih baik, jangan ragu untuk meminta izin melakukan observasi. Belajarlah dari sesama rekan guru.

5. Membaca

Membaca adalah jendela dunia. Tak hanya siswa yang harus gemar membaca. Untuk menjadi guru yang berkualitas, tentu harus gemar membaca. Membaca buku bisa memperluas wawasan guru. Guru bisa membaca buku-buku yang berhubungan dengan kompetensi-kompetensinya. Guru dapat menambah ilmu dari buku-buku pedagogik, profesionalisme guru, kepribadian, ataupun keterampilan sosial.

6. Menulis Karya Ilmiah

Tak hanya membaca, guru juga harus rutin menulis karya tulis untuk meningkatkan kualitasnya. Guru dianjurkan untuk rutin menulis karya tulis, baik berupa artikel, laporan penelitian, jurnal, hingga buku. Sangat dianjurkan bagi guru untuk bisa menulis karya tulis, khususnya yang berhubungan dengan dunia pendidikan dan

pengajaran. Karya tulis ini menjadi media guru dalam menuangkan ide, gagasan, pengalaman, hingga kemampuan yang telah dimilikinya. Karya tulis ini juga tak hanya bisa meningkatkan kualitas guru. Namun, juga bisa menjadi portofolio bagi guru. Selain itu, karya ini dapat dijadikan sumber inspirasi bagi rekan-rekan guru lainnya.

D. Pemanfaatan Teknologi

Pendidikan merupakan pondasi penting bagi perkembangan suatu negara. Di Indonesia, kemajuan teknologi telah merambah ke berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan dampak signifikan terhadap proses pembelajaran di Indonesia. Dalam artikel ini, kita akan membahas peran teknologi dalam pendidikan di Indonesia dan manfaatnya bagi siswa dan guru.

Salah satu peran utama teknologi dalam pendidikan adalah memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi. Dulu, siswa harus mengandalkan buku teks dan sumber daya terbatas di perpustakaan untuk memperoleh pengetahuan. Namun, dengan adanya teknologi, siswa dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi melalui internet. Mereka dapat menggali lebih dalam tentang topik tertentu, melihat presentasi multimedia, atau bahkan mengikuti kursus online. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka, tetapi juga memperluas wawasan mereka tentang dunia (Muhammad Yusup, n.d.).

Selain itu, teknologi juga memberikan fleksibilitas dalam metode pengajaran. Guru dapat menggunakan berbagai alat teknologi, seperti proyektor, komputer, dan perangkat lunak edukatif, untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Misalnya, mereka dapat menggunakan presentasi multimedia, gambar, atau video untuk memvisualisasikan konsep yang kompleks. Hal ini akan membantu siswa memahami materi dengan lebih baik dan memotivasi mereka untuk belajar.

Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dapat dicapai melalui pemberdayaan guru melalui teknologi. Teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu pengajaran, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi dan efektivitas guru. Salah satu contoh nyata dari pemberdayaan guru melalui teknologi adalah pelatihan guru berbasis online.

Melalui platform online, guru-guru dapat dengan mudah mengakses kursus, materi pelajaran, dan sumber daya pendidikan yang relevan. Dengan demikian, mereka dapat terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka sepanjang karir mereka dengan lebih efisien.

Di samping itu, perangkat teknologi seperti laptop, tablet, atau bahkan smartphone juga menjadi faktor penentu dalam aksesibilitas pendidikan. Banyak keluarga di Indonesia mungkin tidak mampu membeli perangkat ini, sehingga teknologi tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara efektif. Tantangan aksesibilitas ini menekankan pentingnya upaya dari pemerintah dan organisasi nirlaba dalam menyediakan akses internet yang terjangkau dan perangkat pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat yang kurang mampu (fitri rezki, M. Yusup, 2020).

Di sisi lain, terdapat juga langkah-langkah positif untuk mengatasi masalah aksesibilitas ini, seperti program pemerintah yang menyediakan perangkat dan internet bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Pemerintah juga telah bekerja sama dengan operator telekomunikasi untuk meningkatkan jaringan internet di daerah-daerah terpencil. Pemanfaatan teknologi dalam konteks pendidikan memang menawarkan banyak manfaat, namun tantangan yang terkait dengan hal tersebut tidak boleh diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah aksesibilitas (William N Dunn, n.d.). Meskipun teknologi telah memungkinkan pendidikan jarak jauh, namun tidak semua daerah di Indonesia memiliki akses yang sama ke infrastruktur internet yang stabil. Terutama di daerah pedesaan, akses internet mungkin terbatas atau bahkan tidak tersedia.

Namun, meskipun teknologi memiliki banyak manfaat dalam pendidikan, tantangan dan hambatan juga terjadi. Salah satunya adalah kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan (Santoso, 2010). Tidak semua daerah di Indonesia memiliki akses yang memadai terhadap teknologi. Selain itu, masih ada beberapa guru yang kurang terampil dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki infrastruktur teknologi dan memberikan pelatihan yang memadai kepada guru.

Dalam kemajuan teknologi ini, terdapat banyak dampak positif yang berpengaruh pada dunia pendidikan. Namun, di sisi lain, terdapat pula dampak negatif yang timbul akibat perkembangan teknologi yang begitu pesat. Perkembangan teknologi dapat memungkinkan peserta didik untuk melakukan hal-hal negatif seperti mengakses konten pornografi, informasi palsu, kecanduan bermain game online, dan sebagainya (Nasir, 2019). Selain itu, perkembangan teknologi juga dapat mengubah perilaku, etika, norma, aturan, atau moral kehidupan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (Wahyudi et al., 2020). Oleh karena itu, dalam menghadapi situasi ini, peran pendidikan menjadi sangat penting untuk mengembangkan dampak positif dan memperbaiki dampak negatif yang timbul.

Beberapa strategi pemanfaatan teknologi dalam rangka pemerataan pendidikan di berbagai daerah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh.
2. Menyediakan akses internet dan perangkat digital untuk sekolah terpencil.
3. Membuat konten pembelajaran digital yang dapat diakses secara luas.

E. Kebijakan Afirmatif

Kebijakan afirmatif dalam pemerataan pendidikan di daerah Indonesia bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses dan meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di wilayah yang kurang beruntung.

Afirmasi sendiri artinya pengarusutamaan, atau memperjuangkan sesuatu agar tak ketinggalan, atau pernyataan yang membantu mengubah pemikiran seseorang. Pernyataan positif ini dapat mengubah pemikiran dan menjauhkan dari keterbatasan yang dialami seseorang atau kelompok. Atau definisi lain dari hukum online menyebut, Affirmative action (tindakan afirmatif) adalah kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama.

Jika dirunut lebih jauh lagi, penerapan kebijakan afirmasi awalnya berasal dari Amerika Serikat ketika Presiden John F Kennedy tahun 1961 mengeluarkan kebijakan afirmasi dalam dunia ketenagakerjaan yang memberi akses bagi warga kulit hitam di Amerika. Tindakan ini kemudi secara global telah banyak diterapkan diberbagai negara seperti Kanada, Brazil, Malaysia, India, Selandia Baru dan lainnya.

Salah satu bentuk kebijakan afirmatif tersebut adalah penerimaan peserta didik baru (PPDB) zonasi yang secara efektif berlaku pada tahun 2017. Ia menilai metode PPDB tersebut berhasil mendesegregasi jalur penerimaan siswa baru yang sebelumnya hanya terpaku pada sekolah-sekolah dengan label favorit. Kebijakan ini bertujuan untuk mendesegregasi jalur penerimaan siswa baru, dengan menekankan pada nilai siswa dan lokasi tempat tinggal mereka, bukan hanya latar belakang sosial ekonomi (Mas'ud et al., 2019). Ini memungkinkan siswa dari berbagai latar belakang untuk belajar di sekolah-sekolah favorit, menciptakan keragaman sosial ekonomi di setiap sekolah.

Beberapa strategi dalam penerapan kebijakan afirmatif ini, antara lain:

1. Mengurangi kesenjangan akses pendidikan.
2. Memberikan beasiswa bagi siswa dari daerah tertinggal.
3. Menerapkan kuota khusus bagi siswa daerah dalam penerimaan sekolah unggulan.
4. Subsidi pendidikan bagi keluarga tidak mampu.

Meskipun kebijakan afirmatif memiliki tujuan positif, terdapat tantangan dalam implementasinya. Beberapa kritik mencakup kurangnya transparansi dalam proses seleksi beasiswa dan tidak adanya tolak ukur yang jelas untuk menilai dampak kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar kebijakan afirmatif dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan (Lutfi & Fathani, 2013).

F. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah

Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemerataan pendidikan merupakan upaya sinergis untuk memastikan akses dan kualitas pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Kerjasama ini didasarkan pada prinsip desentralisasi pendidikan, di mana pemerintah daerah memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di wilayahnya, namun tetap dalam kerangka kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat (Muhammad Yusup et al., 2019).

Bentuk kerjasama ini meliputi berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pendanaan, implementasi program, hingga evaluasi. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, menetapkan standar nasional pendidikan dan merancang kebijakan makro. Sementara itu, pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan menyesuaikan pada kondisi dan kebutuhan lokal.

Dalam hal pendanaan, pemerintah pusat mengalokasikan dana melalui berbagai skema seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pemerintah daerah kemudian mengelola dan mendistribusikan dana tersebut, serta mengalokasikan anggaran pendidikan dari APBD untuk melengkapi kebutuhan yang belum tercakup dalam anggaran pusat.

Kerjasama juga mencakup pengembangan infrastruktur pendidikan, di mana pemerintah pusat menyediakan bantuan teknis dan pendanaan, sementara pemerintah daerah mengidentifikasi kebutuhan spesifik dan melaksanakan pembangunan. Hal ini termasuk pembangunan sekolah baru, renovasi fasilitas yang ada, dan penyediaan peralatan pembelajaran (Muhammad Yusup, 2018b).

Dalam hal peningkatan kualitas guru, pemerintah pusat menyelenggarakan program sertifikasi nasional, sementara pemerintah daerah mengadakan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Kedua pihak juga berkolaborasi dalam memberikan insentif bagi guru yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil atau tertinggal.

Pengembangan kurikulum juga menjadi area kerjasama, di mana kurikulum nasional ditetapkan oleh pusat, namun pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengembangkan muatan lokal yang relevan dengan konteks daerahnya.

Untuk mengatasi disparitas antar daerah, kedua pihak bekerja sama dalam mengidentifikasi daerah prioritas yang membutuhkan intervensi khusus. Program afirmasi seperti kuota khusus bagi siswa dari daerah tertinggal untuk masuk perguruan tinggi negeri juga merupakan hasil kerjasama ini.

Monitoring dan evaluasi dilakukan bersama-sama melalui tim gabungan yang memantau implementasi program. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk melakukan penyesuaian kebijakan dan program agar lebih efektif dalam mencapai tujuan pemerataan pendidikan.

Kerjasama ini juga mencakup upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah, serta penanganan isu-isu khusus seperti pendidikan inklusif dan pendidikan di daerah pasca bencana.

Melalui kerjasama yang komprehensif ini, diharapkan dapat tercipta sistem pendidikan yang lebih merata, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan masing-masing daerah, sambil tetap menjaga kesatuan standar nasional pendidikan.

1. Mendorong alokasi anggaran pendidikan daerah yang memadai

Mendorong alokasi anggaran pendidikan daerah yang memadai merupakan upaya strategis untuk memastikan tersedianya sumber daya keuangan yang cukup guna mendukung peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di tingkat daerah. Proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memerlukan perencanaan yang matang serta komitmen politik yang kuat.

2. Melibatkan tokoh masyarakat dalam program pendidikan

Melibatkan tokoh masyarakat dalam program pendidikan merupakan strategi penting untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi pendidikan di tingkat lokal. Tokoh masyarakat, yang mencakup pemimpin adat, tokoh agama, pengusaha lokal, dan individu berpengaruh lainnya, memiliki peran krusial dalam membentuk opini publik dan memobilisasi dukungan masyarakat terhadap inisiatif pendidikan.

3. Menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan potensi daerah

Menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan potensi daerah merupakan strategi penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang relevan dan efektif. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di daerah mereka

DAFTAR PUSTAKA

- Fitri Rezki, M. Yusup, dkk. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Harini Fajar Ningrum (ed.)). Media Sains Indonesia.
- Khodijah, N. (2017). *Psikologi Pendidikan*. Rajawali Pers.
- Lutfi, M., & Fathani, A. H. (2013). *Hitam Putih Pendidikan: Menyingkap Realitas, Merajut Solusi*. UB Press.
- Marnis & Priyono. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia In Manajemen Sumber Daya Manusia. In *Edisi Revisi Jakarta: Bumi Aksara*.
- Mas'ud, A., Fuad, A. Z., & Zaini, A. (2019). Evolution and Orientation of Islamic Education in Indonesia and Malaysia. *Journal of Indonesian Islam*, 13(1), 21–49. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2019.13.1.21-49>
- Muhammad Yusup. (n.d.). Inovasi Manajemen Pendidikan: Pemikiran, Lingkungan, Budaya, Dan Perilaku (Studi di SMAN Titian Teras Abdurrahman Sayoeti Jambi). *Nur El-Islam*, Volume 5, 64. <http://ejournal.staiyasnibungo.ac.id/index.php/nurelislam/article/view/108>
- Muhammad Yusup. (2018a). *Model Pembelajaran Berbasis Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan Karakter Santri*. 3, 1–13.
- Muhammad Yusup. (2018b). Tanggung Jawab dan Otoritas Kepemimpinan Pendidikan Dalam Islam. *Idarah (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan)*, 2(1), 62–79. <https://doi.org/10.47766/idarah.v2i1.266>
- Muhammad Yusup. (2019). Sertifikasi Dosen Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Pada Institut Agama Islam (Iai) Nusantara Batanghari. *PRODU-Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen ...*, 1(11), 33–43. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/produ/article/view/1154>

- Muhammad Yusup, Mukhtar, & Risnita. (2019). The influence of competence, work participation, and job satisfaction of lecturers toward work productivity. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(12), 628–642.
- Nasir. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia Pengadaan dan Retensi SDM di Perguruan Tinggi Swasta. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Santoso, P. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*.
- Stephen P. Robbins, & A. Judge, T. (2017). *Organizational Behavior*, Seventeenth Edition, Global Edition. In *Pearson Education Limited*.
- Wahyudi, M. A., Taufik, & Purwandari, E. (2020). Psychological Well-Being Sufism Practitioners as A Sufistic Conceling. *Jurnal Konseling Religi*, 11(1), 145–159. <https://doi.org/10.21043/kr.v11i1.6734>
- William N Dunn. (n.d.). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press.

TENTANG PENULIS



Dr. Muhammad Yusup, M.Pd.

Penulis merupakan Dosen Manajemen Pendidikan Islam pada Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Islam sejak tahun 2010 di Universitas Islam Batang Hari Jambi. Putra kedua dari Bapak Kodim dan Ibu Samsuliyah. Memperoleh Gelar Doktor bidang Manajemen Pendidikan Islam pada Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2019, Gelar Magister Pendidikan (M.Pd) dari Institut Agama Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2015, Sarjana pada STIT Muara Bulian diperoleh pada tahun 2010, Diploma II Ahli Madya (A.Ma) diperoleh pada tahun 2006 di STIT Saat ini aktif sebagai dosen tetap Institut Agama Islam Nusantara Batanghari pada Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Selain aktif sebagai penulis buku juga aktif di berbagai bidang kajian ilmu salah satunya sebagai Reviewer Jurnal Al Islah Bengkalis dan aktif menulis artikel pada jurnal-jurnal ilmiah lainnya, selain itu aktif juga sebagai narasumber diberbagai bidang kajian pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga baik didalam maupun diluar Provinsi Jambi Muara Bulian.

Email: yusup9253@gmail.com

BAB 6

PERAN MEDIA DALAM MENGATASI KESENJANGAN PENDIDIKAN

Ratna Laelasari Yuningsih, M.Si.

Penulis Independen-AyA.TV

Email: nengratnayuningsih@gmail.com

A. Pendahuluan

Bab ini mengulas tentang isu kesenjangan pendidikan desa versus kota dan kesenjangan pendidikan disabilitas versus non disabilitas. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengulas fakta, faktor penyebab serta bagaimana peranan media massa dalam mengeliminasi kesenjangan tersebut. Selanjutnya dibahas tentang (1) potret kesenjangan pendidikan desa-kota di Indonesia, (2) potret kesenjangan pendidikan disabilitas-non disabilitas di Indonesia, (3) penyebab dan dampak kesenjangan pendidikan desa-kota serta disabilitas-non disabilitas, (4) peranan media massa dalam mengatasi kesenjangan pendidikan desa-kota serta disabilitas-non disabilitas, (5) kesimpulan dan rekomendasi.

B. Potret Kesenjangan Pendidikan Desa-Kota di Indonesia

Kesenjangan Pendidikan antara desa dan kota di banyak negara masih menjadi masalah yang signifikan, termasuk di Indonesia. Berdasarkan data terbaru dari PISA 2022, terdapat perbedaan mencolok dalam capaian pembelajaran antara daerah perkotaan dan pedesaan. Misalnya, skor literasi matematika di daerah pedesaan hanya mencapai 341,94, jauh di bawah standar kecakapan minimum. Sementara itu, data Badan Pusat Statistik

(BPS) tahun 2023 memperlihatkan bahwa terdapat kesenjangan pendidikan antara pendidikan di wilayah perkotaan dan pendidikan pedesaan di Indonesia. Data di bawah menunjukkan bahwa kesenjangan pendidikan perkotaan-pedesaan masih cukup tinggi. Pada Maret 2023, tingkat pendidikan penduduk desa tidak/belum pernah sekolah adalah 5,11% dan yang tidak menamatkan pendidikan SD sebanyak 12,39%. Sementara itu, di daerah perkotaan, angka ini lebih rendah, yaitu hanya 1,93% tidak/belum pernah sekolah dan 6,62% tidak menamatkan SD. Di samping itu, di perkotaan yang mengenyam pendidikan tingkat menengah mencapai 49,16% sedangkan di pedesaan hanya mencapai 27,98%. Kesenjangan tersebut tidak terlepas dari kondisi infrastruktur pendidikan yang ada di wilayah perkotaan dan pedesaan mengalami ketimpangan yang signifikan.

C. Potret Kesenjangan Pendidikan Disabilitas-Non Disabilitas di Indonesia

Kesenjangan pendidikan bukan hanya antara perkotaan dan pedesaan saja, namun ditemukan pula kesenjangan pendidikan antara disabilitas dan non-disabilitas. Hal tersebut ditunjukkan oleh data BPS tahun 2023 dalam hal akses pendidikan dan putus sekolah antara anak disabilitas dan non disabilitas. Menurut data BPS tersebut bahwa sebagian besar anak tanpa disabilitas atau sekitar 99,6% dapat mengenyam pendidikan dasar, sedangkan hampir 30% anak dengan berkebutuhan khusus belum pernah bersekolah. Selain itu ditemukan juga bahwa jumlah anak disabilitas yang putus sekolah lebih tinggi jika dibandingkan dengan anak non disabilitas. Pada tahun 2023, anak penyandang disabilitas yang mengenyam pendidikan SMA sederajat hanya mencapai 43,61%, sedang anak tanpa menyandang disabilitas di atas 90%. Dampak langsung atas hadirnya kesenjangan pendidikan antara kelompok disabilitas dan non disabilitas adalah jumlah tenaga kerja disabilitas di Indonesia menurut BPS tahun 2022 usia 15 tahun ke atas yang bekerja hanya mencapai 0,53%.

D. Penyebab dan Dampak Kesenjangan Pendidikan Desa-Kota dan Disabilitas-Non Disabilitas di Indonesia

Adapun faktor penyebab kesenjangan pendidikan desa-kota disebabkan kemiskinan. Berdasarkan data BPS pada Maret 2024, penduduk miskin pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk miskin perkotaan. Penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 adalah 7,09% sedangkan penduduk miskin pedesaan mencapai 11,79%. Sementara itu, faktor penyebab kesenjangan pendidikan disabilitas-non disabilitas pun tidak jauh berbeda dengan kesenjangan pendidikan yang terjadi antara wilayah kota dan desa. Selain itu, anak-anak dengan berkebutuhan khusus tidak dapat bersekolah di sekolah umum dan tidak semua tempat apalagi di desa terdapat sekolah luar biasa yang melayani kebutuhan mereka. Hal tersebut diperparah dengan banyaknya sekolah yang belum memiliki fasilitas yang ramah disabilitas, seperti ramp, toilet khusus, dan ruang kelas yang dapat diakses dengan kursi roda. Di samping itu, guru sering kali tidak memiliki pelatihan yang memadai untuk mengajar anak dengan kebutuhan khusus. Hal ini membuat mereka kesulitan dalam memberikan pendidikan yang inklusif. Hal lain yang memperparah kesenjangan pendidikan penyandang disabilitas adalah hadirnya *stereotip* dan diskriminasi dari keluarga, masyarakat dan teman di sekolah. Implikasinya adalah dapat mengurangi motivasi mereka untuk bersekolah. Selain itu, peta data tentang penyandang disabilitas terkait dunia pendidikan tidak lengkap, khususnya mengenai jumlah dan kebutuhan anak penyandang disabilitas membuat sulit bagi pemerintah untuk merancang kebijakan yang efektif.

Padahal hak-hak kelompok disabilitas dalam pendidikan sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Salah satu klausulnya menyatakan bahwa pemerintah Indonesia wajib menyelenggarakan dan memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas secara inklusif. Hal itupun dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13/2020 yang menyatakan bahwa kelompok disabilitas harus mendapat

akomodasi yang layak dan mendapatkan pendidikan yang inklusif.

Merujuk pada paparan di atas, maka kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan dan kesenjangan pendidikan antara penyandang disabilitas dan tanpa disabilitas harus dihapuskan. Salah satunya caranya adalah melalui pengentasan kemiskinan baik di desa maupun di kota serta pemerintah Indonesia menjalankan amanat UU nomor 8 tahun 2016 untuk menciptakan dunia pendidikan yang adil bagi semua orang tanpa diskriminasi.

E. Peranan Media Massa dalam Mengatasi Kesenjangan Pendidikan Desa-Kota dan Disabilitas-Non Disabilitas di Indonesia

Bertolak dari uraian yang mendahului, maka upaya untuk mengurangi kesenjangan tersebut sangat penting untuk segera dilakukan upaya sistemik untuk mencapai *Generasi Emas Indonesia 2045*. Untuk mengatasi kesenjangan pendidikan antara desa-kota dan disabilitas-non disabilitas bukan hanya sokongan penganggaran dan fasilitas infrastruktur pendidikan saja, namun dibutuhkan perubahan *mindset* dari setiap orang bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap orang dan dengan berubahnya hal tersebut diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan generasional yang salah satunya disebabkan oleh adanya ketimpangan pendidikan antara desa-kota dan disabilitas-non disabilitas. Selanjutnya, siapakah yang harus berperan aktif dalam mendorong perubahan *mindset* tersebut?

Untuk mengentaskan ketimpangan pendidikan seluruh *stakeholders* harus berperan serta. Oleh karena itu dibutuhkan keterlibatan berbagai *stakeholders* dan secara khusus keterlibatan *hexa helix*. Konsep *hexa helix* merupakan pengembangan dari model kolaborasi *pentahelix* yang melibatkan enam pemangku kepentingan utama: akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, media, dan tenaga kesehatan. Dalam konteks pendidikan, keterlibatan *hexa helix* dapat memberikan dampak yang signifikan melalui sinergi dan kolaborasi antar berbagai pihak

untuk mengatasi kesenjangan pendidikan desa-kota maupun disabilitas-non disabilitas. Dalam tulisan ini lebih menyoroti bagaimana peranan media massa dalam mengeliminasi kesenjangan pendidikan desa-kota dan disabilitas-non disabilitas. Dalam konteks ini media massa difungsikan untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan tanpa adanya GAP antara pendidikan di desa dan kota serta GAP pendidikan antara disabilitas dan non disabilitas. Apakah media massa kita baik tertulis secara cetak maupun berbasis digital sudah turut serta mengeliminasi masalah kesenjangan pendidikan desa-kota dan disabilitas-non disabilitas?

Dalam satu kali 24 jam, berapa persenkah siaran televisi, koran, facebook, tiktok, instagram, youtube dan media lain memberikan informasi dalam rangka menyadarkan semua pihak untuk mengeliminasi kesenjangan pendidikan desa-kota serta disabilitas dan non disabilitas? Dan apakah saya juga sudah berperan mengeliminasi kesenjangan pendidikan desa-kota dan disabilitas-non disabilitas? Dengan pertanyaan tersebut diharapkan mampu menstimulasi kesadaran personal dan kesadaran kolektif untuk turut serta mengeliminasi hal tersebut di atas. Selanjutnya, substansi apakah yang harus diurus utamakan dalam mengatasi kesenjangan pendidikan desa-kota dan disabilitas non disabilitas?

Media massa berbasis kertas dan digital perlu mengkampanyekan eliminasi ketimpangan tersebut di atas dengan substansi memenuhi kebutuhan praktis dan strategis masyarakat miskin desa-kota serta kelompok disabilitas dengan segala bentuk ragamnya secara berkelanjutan. Selain itu, media massa harus kerja sama dengan seluruh *stakeholders* yang masuk ke dalam *hexa helix*. Selanjutnya, kementerian terkait mendukung melalui rencana aksi nyata untuk menjawab isu ketimpangan pendidikan desa-kota dan disabilitas-non disabilitas, usul kegiatannya apa, kelompok targetnya siapa, siapa penanggung jawabnya, anggarannya dari mana dan waktu pelaksanaannya kapan. Dengan demikian kampanye publik

mengelminasi kesenjangan pendidikan desa-kota dan disabilitas-non disabilitas melalui media massa merupakan media strategis yang terarah dan berkesinambungan. Jika hal itu dapat dilakukan maka fungsi media bukan hanya alat penyebar informasi, namun sekaligus sebagai perangkat gerakan masyarakat yang memberi kontribusi kongkret dalam menyokong pencapaian SDG's berikut Indonesia emas 2045 dalam konteks pembangunan untuk semua.

Selain hal-hal di atas para pemilik media berikut para pelaksana teknisnya harus memiliki *political will* untuk duduk bersama dengan seluruh *hexa helix*. Hal tersebut perlu dilakukan untuk secara bersama melakukan gerakan sosial mengentaskan ketimpangan pendidikan desa-kota dan disabilitas non disabilitas secara tematik dan berkesinambungan. Dan tema penting yang diusung ada dua yaitu pertama, terkait pengentasan kemiskinan desa-kota berikut kemiskinan keluarga penyandang disabilitas. Kedua, tema tentang penghapusan segala bentuk kesenjangan pendidikan desa-kota dan kesenjangan pendidikan penyandang disabilitas-non disabilitas secara sinergis dan berkesinambungan. Tanpa adanya sinergitas antara dunia media massa dengan pihak lain dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan pendidikan tersebut di atas, ibarat air di daun keladi. Dan media massa merupakan alat strategis untuk mengadvokasikan hal-hal tersebut di atas.

Dengan media massa sosial memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat dan luas, sehingga dapat memobilisasi massa untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial untuk mengelminasi kesenjangan pendidikan desa-kota dan disabilitas-non disabilitas. Selain itu, dengan media massa berperan membentuk opini publik dengan menyebarkan informasi dan pandangan yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu kesenjangan pendidikan desa-kota dan disabilitas-non disabilitas. Ini dapat meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap gerakan sosial dalam isu tersebut. Selanjutnya, media massa sosial digunakan untuk konsolidasi

dan promosi gerakan eliminasi kesenjangan pendidikan desa-kota dan disabilitas-non disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Profile Kemiskinan Indonesia, Maret 2024,
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/237/>
<https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/proporsi-pekerja-disabilitas-di-indonesia-053-pada-2022>

TENTANG PENULIS



Ratna Laelasari Yuningsih, M.Si.

Penulis merupakan alumni Universitas Indonesia di bidang sosial dan saat ini bekerja sebagai konsultan di NUDS, BPIW, Kementerian PUPR. Sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang aktif dalam bidang pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat baik di pemerintahan seperti Kemendikbud, Kementerian PUPR, Kemendagri, Kemenaker, Bappenas dan di sektor swasta seperti *Castrol Oil* dan *Freeport*. Selain itu, penulis juga aktif menulis di bidang non-akademik dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya serta pelatihan pengembangan sumber daya manusia.
Email: nengratnayuningsih@gmail.com

BAB 7

FAKTOR-FAKTOR BUDAYA YANG MEMPENGARUHI KESENJANGAN PENDIDIKAN

Santy Sriharyati, S.Sos., M.Si.
Politeknik LP3I Bandung
Email: santysriharyati@plb.ac.id

A. Pendahuluan

Pendidikan dapat menjadi pegangan akulturasi yang tepat dan terus-menerus yang akan membentuk identitas manusia seutuhnya. Pendidikan Dan Budaya adalah sesuatu yang saling terkait dan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan. Dalam pendidikan, sekelompok masyarakat budaya akan memberikan dampak pada cara pembentukan identitas masing masing personal. Maka pada konsep ini, pendidikan bukan saja diartikan kepada gerakan sekolah, namun lebih merupakan proses pembudayaan dalam keluarga dan kelompok masyarakat. Cara ini dilakukan sebagai upaya menumbuhkan kesadaran terhadap perbedaan sosial secara positif. Dikarenakan inti dari masyarakat multikultural adalah keinginan mengakui dan menghargai masyarakat lain yang diwujudkan dalam pemahaman terhadap perbedaan sosial (Bayu Pratama Setiaji, 2017).

Kerangka kerja pendidikan di Indonesia masih sangat minim. Populasi Dunia 2021 Indonesia berada pada posisi ke-54 dari 78 negara, masih jauh dibawah negara-negara Asia Tenggara Lainnya seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sementara itu, posisi 1 hingga 10 ditempati oleh Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Kanada, Prancis, Swiss, Jepang,

Australia, Swedia, dan Belanda (Donabella Juventia Shafaa Alaadini Yuan, 2024).

Dengan perkembangan zaman diperlukan pembaharuan dan pengembangan dalam bidang pendidikan secara berkesinambungan dilakukan supaya mampu menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan antara lain masalah komunikasi, kualitas, relevansi, dan efisiensi pendidikan. Adapun salah satu upaya yang dilakukan dan dinilai mampu mendorong dan membangun kualitas mutu pendidikan adalah melalui pemerataan pendidikan dalam hal sarana dan prasarana pendukung. penyelenggaraan pendidikan di mana pun lokasi atau wilayahnya di seluruh Indonesia.

Pemerintah dan masyarakat memiliki peran untuk memperoleh dukungan kepada setiap warga negara dimana pendidikan memiliki arti penting dan alasan yang tepat dalam mewujudkan negara Indonesia yang memiliki kualitas SDM yang baik di bidang kemanusiaan. Terkadang penyimpangan sosial terkait dengan pendidikan, agar tidak menjadi masalah yang berkepanjangan harus diminimalisir dan segera diselesaikan.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan adalah membentuk dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama untuk mewujudkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, terdidik, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang taat hukum serta berakhlak mulia. Upaya peningkatan sarana dan prasarana secara merata di Indonesia, salah satunya melalui pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang paling besar pengaruhnya terhadap peningkatan. Namun begitu, masih terdapat kendala dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia, terutama pada daerah dengan jangkauan terbatas. Hal tersebut kemudian menyebabkan kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah umum semakin melebar (Suryana, 2020). Namun

pada pelaksanaannya, Kegiatan mengajar dan pembelajaran, beberapa daerah di Indonesia memang terjadi kesenjangan dalam pendidikan (Salamah, dkk, 2023).

Pendidikan merupakan metode mengubah perilaku dan tingkah laku orang atau sekelompok individu untuk mengembangkan kualitas manusia melalui usaha-usaha pendidikan yang ditunjang dengan persiapan, bentuk-bentuk kegiatan, dan strategi dalam pendidikan. Pendidikan juga bertujuan untuk membentuk sosialisasi budaya, adanya interaksi dengan nilai-nilai masyarakat, dan menjaga hubungan timbal balik yang menentukan proses perubahan tatanan sosial budaya masyarakat dalam mendorong majunya peradaban. Kebudayaan dapat diartikan sebagai semua perilaku dan ide-ide yang diperoleh dan menjadi ciri khas anggota budaya tertentu.

Pendidikan Dan kebudayaan saling terintegrasi, dan pendidikan akan berubah seiring perkembangan kebudayaan, hal ini dikarenakan pendidikan merupakan proses transmisi budaya dan refleksi nilai-nilai budaya (pendidikan bersifat reflektif).

Pendidikan bersifat maju, apapun perubahan perkembangannya terjadi seiring dengan kebutuhan perkembangan budaya. Ke 2 (dua) fungsi tersebut saling terkait erat dan terintegrasi. Sehingga diperlukan pendidikan formal dan informal baik sengaja atau tidak. Sehingga, perbedaan budaya merupakan cerminan dari wilayah/negara lain, sehingga menimbulkan perbedaan sistem, isi, dan pelatihan pendidikan, yang mencerminkan tingkat pendidikan dan budaya.

B. Pengertian Budaya

C. Vissler, C. Crookhoorn, A. Davis dan A. Hoebel menjelaskannya sebagai berikut: Kebudayaan adalah semua tindakan yang harus diperoleh melalui pembelajaran. Menurut Bakker, Kebudayaan adalah proses penciptaan, pengungkapan, dan pengolahan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini mencakup upaya untuk membudayakan bahan baku alam dan produk-

produk yang dihasilkannya. Dalam konteks bahan baku alam, nilai-nilai diidentifikasi dan dikembangkan untuk mencapai keadaan kesempurnaan, baik dalam hubungannya dengan diri sendiri maupun dengan lingkungan fisik dan sosial. Sosialisasi alam, penghargaan terhadap manusia, dan peningkatan hubungan individu dengan manusia dan lingkungannya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Sependapat dengan E.B. Tylor (1871): Kebudayaan merupakan sesuatu yang kompleks yang memuat informasi, keyakinan, keterampilan, moral, hukum, adat istiadat, serta berbagai bakat dan kecenderungan yang diperoleh individu sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, budaya merangkum segala sesuatu yang dipelajari dan diperoleh orang sebagai bagian dari suatu komunitas. Ini mencakup semua pola perilaku normatif yang diperoleh melalui pembelajaran. Ini mencakup berbagai cara berpikir, perasaan, dan perilaku.

Menurut antropolog Indonesia Koentjaraningrat (1923-1999), kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan sistem ide/gagasan, perasaan, perilaku, dan karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan sosialnya dan yang mereka buat sendiri melalui proses pembelajaran.

Kebudayaan suatu masyarakat sebagai suatu sistem pengetahuan dan ide/gagasan merupakan suatu kekuatan tak kasat mata yang mampu menggerakkan mereka yang menganut kebudayaan itu untuk berbuat dan bertindak sesuai dengan pengetahuan dan ide/gagasan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, seni, dan sebagainya.

Kebudayaan adalah dimana manusia tidak dapat dengan mudah memperoleh dengan suatu sistem. dan cara yang sudah ditetapkan, melainkan melalui suatu proses pembelajaran yang berlangsung terus menerus sejak lahir hingga meninggal dunia.

Budaya adalah bentuk jamak dari kata Buddhi dan Daya yang berarti cinta, kemauan, dan emosi. Kata budaya sesungguhnya merupakan serapan yang berasal dari bahasa Sansekerta Buddhi yang merupakan bentuk jamak dari kata Daya yang berarti akal atau akal budi. Kata "culture" dalam

bahasa Inggris berasal dari kata *culture* yang dalam bahasa Latin berasal dari kata *Colera*. *Colera* merupakan pengolahan, penanaman, pemupukan, dan pengembangan tanah (pertanian) (Elly M. Setiadi, dkk., 2006). Dalam bahasa Belanda *cultuure* adalah setiap tenaga dan kegiatan manusia mengubah alam. Adapun pendapat lain bahwa kata budaya merupakan evolusi dari kata jamak dari “Budi Daya” yang berarti tenaga pikiran. Dengan demikian, mereka membedakan antara budaya dan kebudayaan. Budaya merupakan daya pikiran yang berupa daya cipta, kemauan, dan emosi. Budaya merupakan hasil daya cipta, kemauan, dan perasaan. Dengan demikian, kebudayaan secara keseluruhan merupakan hasil usaha manusia untuk memenuhi semua kebutuhan dasarnya. (Abu Ahmadi, 2004).

C. Budaya dalam Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu proses mengubah tingkah laku dan perilaku sebagai pribadi atau kelompok serta berperan dalam kedewasaan manusia melalui cara pendidikan dan pelatihan. Pendidikan merupakan suatu usaha untuk menyiapkan manusia agar memiliki dan menghayati ilmu pengetahuan, nilai-nilai, dan tata kehidupan yang diperlukan dalam masyarakat yang lebih luas (Rochgiyanti & Susanto, Bayu Pratama Setyaji, 2017).

Pendidikan dan budaya saling terkait erat, dan budaya merupakan bagian dari pendidikan. Jika budaya berubah, pendidikan pun dapat berubah, dan jika pendidikan berubah, budaya pun ikut berubah. Pendidikan merupakan proses transmisi budaya dan cerminan/refleksi nilai-nilai budaya, sehingga pendidikan senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan budaya.

Pendidikan juga bersifat progresif dan senantiasa mengalami perubahan perkembangan seiring dengan kebutuhan perkembangan budaya. Kedua karakteristik tersebut saling terkait erat dan terpadu. Hal ini memerlukan pendidikan formal dan informal. Perbedaan budaya mencerminkan setiap

wilayah dan menyebabkan perbedaan sistem, konten, dan pelatihan, yang mencerminkan tingkat pendidikan dan budaya.

Dalam rumusan ini, pendidikan merupakan proses akulturasi, dalam arti keduanya berkaitan satu sama lain yaitu nilai-nilai. Kebudayaan memiliki tiga komponen penting: (1) Kebudayaan sebagai cara hidup; (2) Kebudayaan adalah suatu proses; dan (3) Kebudayaan memiliki visi tertentu. Oleh karena itu, jelaslah bahwa pendidikan dan budaya sangat erat kaitannya, karena keduanya berkesinambungan dan saling mendukung.

Pendidikan yang tidak berlandaskan pada kaidah dan aturan budaya akan mengakibatkan peserta didik kehilangan akar budayanya. Mereka kemudian akan menjadi "orang asing" di lingkungan budayanya karena tidak mengenal budayanya dengan baik. Selain menjadi orang asing, dikhawatirkan mereka akan menjadi orang yang tidak menyukai budaya sendiri. Dampak lain yang terjadi ketika nilai-nilai budaya tidak berperan dalam pendidikan juga tidak lagi diajarkan di sekolah maka masyarakat tidak lagi berlandaskan pada pola perilaku (nilai-nilai kemanusiaan) dan struktur sosial yang ada (seperti hidup rukun, saling membantu, menghormati, bekerja sama, berperilaku sopan, mengadakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam berbagai kesempatan, hidup hemat, dan lain-lain) yang dapat cenderung merusak alam (misalnya penebangan liar).

Dalam dunia pendidikan, peran budaya sekolah tidak dapat dipisahkan. Budaya sekolah merupakan kehidupan sekolah yang di dalamnya seluruh sekolah berinteraksi satu sama lain (Astuti, 2019).

D. Faktor-Faktor Budaya Mempengaruhi Kesenjangan Pendidikan

Pendidikan merupakan proses penanaman budaya kepada manusia dan menjadikan manusia bertindak sesuai dengan budaya yang telah dihayatinya.

Pendidikan dimulai sejak adanya manusia, dan terus berkembang seiring berkembangnya peradaban. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa aturan-aturan sistem pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat dipengaruhi oleh budaya suatu daerah karena budaya tersebut bersifat mengakar dan dinamis. Budaya tersebut tidak hanya ada begitu saja, tetapi dibangun atau dibudayakan dalam kurun waktu nol tahun hingga ratusan tahun, berkembang pesat, dan memiliki banyak penganut budaya.

Selain aspek sosial ekonomi, unsur budaya mempengaruhi pendidikan. Kebudayaan dan pendidikan saling berkaitan erat dan saling bergantung. Kebudayaan masyarakat mempengaruhi proses pembentukan kepribadian individu dalam pendidikan. Dalam konsep ini, pendidikan dipahami bukan hanya sebagai kegiatan sekolah, namun sebagai proses pembudayaan dalam keluarga dan masyarakat. Dengan kata lain, upaya tersebut dapat dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran positif terhadap keberagaman budaya. Hal ini penting karena inti dari masyarakat multikultural adalah kemauan untuk menerima dan menghargai budaya lain, yang tercermin dalam pengakuan terhadap keberagaman budaya (Azzahra, Asbari, dan Ariani 2023).

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pendidikan, yakni (1) sosial ekonomi: akses terhadap pendidikan seringkali bergantung pada kondisi sosial ekonomi keluarga, akses terhadap sumber daya dan dukungan finansial, (2) tingkat pendidikan orang tua, dapat mempengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam pendidikan anak-anak, (3) kualitas hubungan sekolah - masyarakat, dapat mempengaruhi tingkat partisipasi, dan (4) kebijakan pendidikan, mendorong keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan juga penting (Jelita Dwi Septya, 2024).

Berikut ini adalah variabel-variabel yang mempengaruhi ketimpangan sosial ekonomi: Pertama, pertimbangkan kesulitan untuk pergi ke sekolah. Salah satu unsur yang menyebabkan

ketimpangan sosial ekonomi dalam pendidikan adalah kesulitan untuk masuk ke sekolah. Keadaan ini diakibatkan oleh kegagalan pemerintah dalam menyediakan dana untuk pembangunan infrastruktur daerah. Lebih jauh lagi, jarak yang ditempuh terkadang cukup jauh, dan akses jalan bermasalah di beberapa tempat di Indonesia. Kedua, kurangnya fasilitas sekolah. Banyak sekolah yang bangunannya rusak, dan bahan ajar sering kali langka. Ketiga, guru tidak tertarik dan kualitasnya buruk. Rendahnya minat instruktur terkadang didorong oleh infrastruktur daerah 3T yang lemah, yang membutuhkan peningkatan layanan selain sosial.

Makna budaya dalam pendidikan akan diungkap bagaimana budaya daerah dan budaya nasional sangat berarti dalam pendidikan. Budaya lisan maupun budaya tulis maupun budaya material maupun non material. Norma dan nilai budaya membentuk kemampuan intelektual, emosional, interpersonal, dan intrapersonal peserta didik. Bahasa Indonesia yang beraneka ragam akan memudahkan interaksi selama proses pendidikan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, berasal dari berbagai bahasa (Iryani 2014).

E. Strategi Mengurangi Kesenjangan Pendidikan dalam Konteks Faktor Budaya

Kesenjangan sosial dalam pendidikan di Indonesia sangat signifikan dan mengkhawatirkan, terutama di kalangan kelas terbawah dan di daerah pedesaan (Santoso, Karim, Maftuh, & Murod, 2023).

Beberapa variabel berkontribusi terhadap kesenjangan pendidikan, termasuk (Donabella Juventia Shafaa Alaadini Yuan 2024):

1. Sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan pendidikan di Indonesia.
2. Kualitas tenaga pengajar yang kurang baik. Ketersediaan Tenaga Pengajar yang terampil akan berdampak signifikan terhadap kualitas pendidikan karena mereka dapat

memberikan pendidikan yang layak kepada siswa. Kurangnya pengalaman tenaga pengajar akan berdampak signifikan terhadap siswa karena mereka tidak akan memperoleh pengajaran yang memadai dan bermutu.

3. Jumlah dan kualitas buku (referensi). Merupakan sumber daya yang membantu siswa dan guru dalam memperlancar proses pembelajaran. Ketersediaan dan kualitas buku sangat penting bagi pertumbuhan pendidikan karena setiap satuan pendidikan memerlukan sarana seperti media pembelajaran, buku, dan bahan ajar atau referensi lain untuk membantu proses pembelajaran yang berkelanjutan.
4. Biaya Pendidikan yang mahal dapat menyebabkan ketimpangan pendidikan. Biaya pendidikan yang terlalu mahal dapat menghalangi individu atau kelompok masyarakat lain untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, sehingga mengakibatkan ketimpangan pendidikan. Biaya pendidikan dapat digunakan untuk menilai akses terhadap pendidikan yang bermutu.
5. Standardisasi pendidikan, yaitu diperlukan standar pendidikan. Aspek ini telah menjadi perhatian dan berdampak pada kesenjangan sosial ekonomi di bidang pendidikan di masyarakat.
6. Minimnya peran serta masyarakat. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam pendidikan, bertujuan untuk mempromosikan lingkungan belajar yang positif, mendukung dan adil bagi semua orang.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan terkait pembahasan budaya dalam kesenjangan pendidikan. Myta Widyastuti (2021) mengungkapkan tujuan kebudayaan dalam pendidikan, adalah:

1. Memberdayakan anak-anak dengan nilai-nilai budaya dan karakter nasional dengan mengembangkan hati nurani, dan emosi mereka. Mempromosikan perilaku siswa yang positif yang selaras dengan cita-cita nasional dan adat istiadat budaya.

2. Menanamkan rasa kepemimpinan dan tanggung jawab terhadap masa depan bangsa kepada siswa.
3. Mendorong siswa untuk menjadi kreatif, mandiri, dan berwawasan kebangsaan, serta menyediakan lingkungan sekolah yang aman, kreatif, baik, dan jujur, dengan perspektif kebangsaan dan bermartabat.

Dukungan juga datang dari pemerintah dengan mengusulkan paradigma baru pendidikan sebagai langkah preventif yang menjadi tanggung jawab seluruh kelompok anak di tanah air.

Berikut ini adalah beberapa cara untuk mewujudkannya: Pertama, pendidikan harus di demokratisasi dan didesentralisasikan, yang akan memberdayakan masyarakat dan pemerintah daerah. Kedua, konsep kesetaraan dan keseimbangan mengharuskan lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat memiliki hak yang sama dengan pemerintah. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pengajar. Keempat, pemerintah harus berupaya lebih keras untuk terus berperan penting dalam dunia pendidikan. Pencerminkan dan pelestarian nilai-nilai budaya daerah sebagai jati diri bangsa yang tak terhapuskan diwujudkan agar pendidikan dan budaya selaras dan terwujud tradisi kehidupan yang berlandaskan gotong royong. Tanpa budaya tidak ada individualitas. Kebudayaan merupakan sistem kendali yang menciptakan sistem nilai dan keyakinan, struktur organisasi, dan norma perilaku yang berinteraksi dengan orang-orang dalam organisasi. Artinya, proses pendidikan berlangsung dalam lingkungan manusia yang berbudaya. Mendidik siswa tentang nilai-nilai moral dan budaya sangat penting untuk mencegah perilaku yang merugikan. Budaya memungkinkan siswa untuk tumbuh dan berkembang dari lingkungan pribadi mereka, yang kemudian menyebar ke lingkungan lebih luas.

Pengembangan kompetensi memerlukan perencanaan yang matang, metodologi yang tepat, dan metode pengajaran serta pembelajaran yang efektif. Pendidikan, seperti nilai-nilai,

budaya, dan identitas nasional, merupakan usaha kolektif sekolah yang harus diterapkan di semua tingkatan.

Kebudayaan merupakan inti dari proses pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin tinggi budaya, semakin tinggi pula pendidikan dan jenis pendidikannya, karena ruang lingkup budaya luas dan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Pendidikan yang lepas dari budaya akan menyebabkan keterasingan dari mata pelajaran yang diajarkan dan berpotensi mematikan budaya itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 2004. Psikologi Pendidikan. Jakarta : Rineka Cipta.
- Azzahra, Gusniah Fahmi., Masduki Asbani, Annisa Shintiya Ariani (2023). Pendidikan Multikultural; Menuju Kesatuan Melalui Keanekaragaman. *Journal of Information System and Management (JISMA)*. Vol.2. No.6.
- Hujaimah, Salamah., dkk. (2023). Faktor, Penyebab dan Solusi Kesenjangan Sosial Dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)*. Vol. 02 No. 06. E-ISSN: 2963-3176.
- Iryani, Eva. (2014). Makna Budaya dalam Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol.14 No.2.
- Maulida, Roichanatul., dkk. (2021). Peran Budaya Indonesia melalui Kegiatan Ekstrakurikuler dalam Pembentukan Karakter di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. *Jurnal METODIK DIDAKTIK: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an* 17(1) halaman 21 - 32.
- Septya, Jelita Dwi., dkk. (2024). Faktor Sosial Budaya dan Pengembangan Masyarakat Dalam Pendidikan Sekolah Dasar. *Jurnal Modeling* Volume 11, Nomor 1, Maret.
- Setiaji, Bayu Pratama. (2017). Peran Kebudayaan Dalam Pendidikan. *Ittihad Jurnall Kopertis Wilayah XI Kalimantan* Volume 15 No.28.
- Suryana, S. (2020). Permasalahan Mutu Pendidikan Dalam Perspektif Pembangunan Pendidikan. *Jurnal Edukasi*. Vol. 1 No.1.
- Widyastuti, Myta. (2021). Peran Kebudayaan Dalam Dunia Pendidikan (*The Role of Culture in The World of Education*). *JAGADHITA Jurnal Kebhinnekaan dan Wawasan Kebangsaan*. Pusat Kajian Pancasila Unindra PGRI. Vol 1 No 1 Desember.

Yuan, Donabella Juventia Shafaa Alaadini. (2024). Ketimpangan Sosial Dalam Bidang Pendidikan dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Motekar* Vol. 2 No. 1 Mei 2024 E-ISSN: 3025-227X P-ISSN: 3025-2288.

TENTANG PENULIS



Santy Sriharyati, S.Sos., M.Si.

Penulis saat ini adalah Dosen Tetap sejak tahun 2008 di Politeknik LP3I Kampus Utama Bandung dan alumni Jurusan Antropologi (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (UNPAD), Program Pascasarjana Ilmu Manajemen (S2) di Universitas Padjadjaran (UNPAD). Mengajar mata kuliah *Management Principles*, *Work Report Writing Technique (RWM)* dan *Research Writing Methodology (WRWT)*. Berpengalaman sebagai konsultan riset bidang sosial dan ekonomi serta mempunyai pengalaman bekerja di beberapa perusahaan swasta (nasional maupun internasional), mengerjakan proyek-proyek yang didanai lembaga donor, Kementerian, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Aktif dalam menulis buku dan artikel di jurnal nasional tentang sosial ekonomi, manajemen SDM, manajemen risiko, metode penelitian, dan lainnya.

Email: santysriharyati@plb.ac.id

BAB

8

PENDIDIKAN BERBASIS KOMUNITAS UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN

**Suwandi, S.E., M.Ak., C.GL., C.PL., C.NFW., C.FTax., CPABC,
C.FR., C.AFE., CBPA., C.AP., C.CSR., C.RM., CQMS., CBSP.,
CFAP., CTP., CPPSP.**

Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
Email: suwandiak307@gmail.com

A. Pendahuluan

Komunitas sangat penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang inklusif dan adil. Akses yang tidak merata, disparitas ekonomi, dan keterbatasan sumber daya adalah beberapa alasan mengapa masih ada ketimpangan pendidikan di banyak wilayah. Akses ke pendidikan formal sering kali menjadi masalah besar di banyak wilayah terpencil dan komunitas yang terpinggirkan. Untuk menyelesaikan masalah ini, komunitas harus berpartisipasi secara aktif dalam menciptakan peluang pendidikan yang lebih merata dan adil bagi semua orang.

Pendidikan berbasis komunitas muncul sebagai cara yang efektif untuk mengatasi kesenjangan pendidikan, terutama di daerah dengan akses pendidikan formal yang terbatas. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pendidikan, metode ini dapat membuat pendidikan lebih mudah dijangkau, serta memastikan bahwa pendidikan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Pendidikan berbasis komunitas mendorong semua orang untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial, memanfaatkan sumber

daya lokal, dan membangun sistem pendidikan yang lebih responsif terhadap masalah-masalah spesifik yang dihadapi komunitas (Edwards Jr, 2019).

Kesenjangan pendidikan masih menjadi masalah serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Anak-anak di daerah terpencil sering kali menghadapi kesulitan untuk mendapatkan layanan pendidikan yang memadai, yang merupakan faktor utama penyebab disparitas ini. Pendidikan menjadi tidak terjangkau bagi banyak anak karena infrastruktur yang tidak memadai, jarak yang jauh dari sekolah, dan transportasi yang buruk (Kaiser & Barstow, 2022). Anak-anak ini tertinggal dibandingkan dengan anak-anak di kota-kota dengan akses yang lebih baik dan lebih banyak fasilitas pendidikan.

Perbedaan ekonomi termasuk faktor lainnya yang memperburuk kesenjangan pendidikan. Keluarga dengan pendapatan rendah sering kali tidak dapat membiayai pendidikan anak-anak mereka, seperti membayar uang sekolah, membeli buku, atau biaya transportasi. Anak-anak terpaksa mengabaikan pendidikan karena tidak memiliki uang untuk bekerja untuk membantu keuangan keluarga (Autor et al., 2019). Akibatnya, anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak mampu memiliki harapan yang lebih kecil untuk memperoleh pendidikan yang baik.

Lebih lanjut, kesenjangan pendidikan juga disebabkan oleh kekurangan sumber daya di komunitas tertentu. Banyak sekolah di wilayah tertinggal kekurangan guru, perlengkapan belajar yang cukup, dan materi pelajaran yang relevan. Kondisi ini menghambat pendidikan dan membuat kualitas pendidikan di daerah tersebut jauh di bawah standar (Hung et al., 2020). Ketiga faktor ini—ketidakmerataan akses, perbedaan ekonomi, dan kurangnya sumber daya—saling berkaitan dan memperparah kesenjangan pendidikan, sehingga perlu diatasi melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis komunitas untuk memastikan semua anak memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan.

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menguraikan beberapa cara pendidikan berbasis komunitas dapat membantu mengurangi kesenjangan pendidikan yang disebabkan oleh ketidakmerataan akses, disparitas ekonomi, dan kurangnya sumber daya di berbagai komunitas. Pendidikan berbasis komunitas memberikan pendekatan yang lebih inklusif dan relevan bagi kebutuhan unik setiap daerah dengan melibatkan masyarakat dan memanfaatkan potensi lokal. Pembahasan ini akan menguraikan terkait konsep, peran, strategi, dan program pendidikan berbasis komunitas. Bahasan ini juga akan menguraikan bagaimana metode ini dapat mendorong masyarakat untuk bekerja sama menciptakan kesempatan pendidikan yang merata bagi semua pihak.

B. Konsep Pendidikan Berbasis Komunitas

Pendidikan berbasis komunitas merupakan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat dari proses pendidikan dan mendorongnya untuk berpartisipasi aktif dalam desain, pengelolaan, dan pelaksanaan kegiatan belajar. Pendekatan ini muncul sebagai tanggapan terhadap kesenjangan dalam sistem pendidikan formal yang sering kali tidak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di komunitas terpencil atau terpinggirkan. Pendidikan berbasis komunitas ini bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, relevan, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan memperhatikan kebutuhan spesifik komunitas.

Shah (2020) mendefinisikan pendidikan berbasis komunitas sebagai suatu model pendidikan yang berpusat pada partisipasi dan keterlibatan langsung dari anggota masyarakat dalam proses pembelajaran. Model ini mencakup semua jenis pendidikan di luar sistem formal, di mana komunitas lokal berperan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan. Dengan cara ini, pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah atau lembaga formal, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan ini

memprioritaskan pembelajaran yang sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan khusus komunitas, menjadikannya lebih relevan dan berarti bagi para peserta didik.

Lawton, Walker, & Green (2019) menuturkan beberapa karakteristik pendidikan berbasis komunitas sebagai berikut:

1. Pendidikan berbasis komunitas melibatkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk orang tua, pemimpin lokal, dan organisasi masyarakat sebagai fasilitator atau mentor. Keterlibatan ini mencakup penyediaan sumber daya dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, yang meningkatkan rasa memiliki serta keberlanjutan program pendidikan.
2. Pendidikan berbasis komunitas mengedepankan pendekatan lokal yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, termasuk budaya, bahasa, maupun masalah-masalah spesifik. Program ini menekankan keterampilan praktis dan nilai-nilai budaya yang relevan, sehingga pendidikan menjadi lebih bermakna dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.
3. Fleksibilitas adalah keunggulan dari pendidikan berbasis komunitas, yang mendorong penyesuaian dalam metode dan jadwal pelaksanaan. Hal ini membuat program lebih mudah diakses oleh berbagai kelompok, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan waktu, sehingga pendidikan dapat memenuhi kebutuhan spesifik setiap individu.

Pendidikan berbasis komunitas sangat berbeda dari pendidikan formal dalam hal metode dan pelaksanaannya. Pendidikan formal biasanya terstruktur secara kaku dengan kurikulum yang ditetapkan secara nasional dan sering kali tidak mempertimbangkan kebutuhan atau konteks spesifik setiap komunitas. Sementara, pendidikan berbasis komunitas mengarahkan kurikulum dan metode pengajaran disesuaikan dengan keadaan lokal, yang membuatnya lebih relevan dan dapat diterima masyarakat.

Salah satu perbedaan utama antara sistem pendidikan formal dan pendidikan berbasis komunitas adalah pendekatan inklusif. Sistem pendidikan formal biasanya berfokus pada peran guru sebagai sumber utama pengetahuan dan membatasi partisipasi aktif masyarakat. Sebaliknya, pendidikan berbasis komunitas melibatkan semua orang dalam proses pendidikan, seperti orang tua, pemimpin lokal, dan tokoh masyarakat. Metode ini menghasilkan lingkungan belajar yang lebih inklusif, di mana setiap anggota komunitas memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan.

Lebih jauh, pendidikan berbasis komunitas sangat fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan lokal. Mengubah kurikulum atau metode pengajaran di sekolah formal biasanya memerlukan proses yang panjang dan birokratis, tetapi pendidikan berbasis komunitas memiliki struktur yang lebih desentralisasi sehingga dapat dengan cepat menyesuaikan program untuk memenuhi kebutuhan baru atau masalah yang muncul di masyarakat. Pendidikan berbasis komunitas dapat digunakan dengan lebih efektif dan sesuai untuk mengatasi kesenjangan yang ada, menjadikannya opsi yang lebih dinamis dibandingkan dengan pendidikan formal.

Di Bangladesh, program BRAC (*Bangladesh Rehabilitation Assistance Committee*), yang memberikan pendidikan non formal kepada anak-anak di daerah pedesaan dan miskin, adalah contoh sukses dari penerapan pendidikan berbasis komunitas. Program ini melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan sekolah komunitas, yang berfokus pada kebutuhan spesifik siswa (Markony, 2020). Di Kenya, program *School for Life* mengubah kurikulum untuk anak-anak di komunitas terpencil sehingga mereka dapat belajar sambil bekerja (Voothaluru, Hinrichs, & Pakebusch, 2021). Di Guatemala, program *Escuela Nueva* mengubah cara pengajaran dengan menjadikan komunitas dan siswa sebagai pusat pembelajaran, yang terbukti meningkatkan partisipasi dan kualitas pendidikan (Luschei & Soto-Peña, 2019).

Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa keterlibatan aktif komunitas sangat penting dalam mengembangkan dan menjalankan program pendidikan yang sesuai dengan konteks lokal. Pendekatan ini menunjukkan bahwa masalah seperti akses terbatas dan ketidakrelevanan kurikulum dapat diatasi secara lebih efektif dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya komunitas. Di samping itu, keberhasilan program-program ini menekankan bahwa pendidikan harus fleksibel dan dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan siswa dan komunitas. Dengan demikian, sistem pendidikan dapat memberikan dampak positif yang lebih besar.

C. Peran Komunitas dalam Mengurangi Kesenjangan Pendidikan

Komunitas berperan dalam mengurangi kesenjangan pendidikan dengan menjadi motor penggerak dalam mendukung akses dan kualitas pendidikan. Melalui partisipasi aktif, komunitas dapat berkontribusi dalam merancang program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan memastikan bahwa setiap anggota komunitas memiliki kesempatan untuk belajar. Peran komunitas ini tidak hanya memberikan sumber daya; namun juga mendorong anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pendidikan, yang menghasilkan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan responsif terhadap masalah yang dihadapi.

Program pendidikan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal dapat ditingkatkan dengan keterlibatan komunitas aktif. Sekolah, orang tua, dan pemimpin komunitas bekerja sama untuk mendukung pendidikan. Hal ini terjadi melalui fasilitas pendidikan, pelatihan guru, dan pendampingan siswa (Ryan et al., 2020). Jika komunitas terlibat secara aktif dalam proses pendidikan, tentu dapat membantu mengatasi tantangan sosial dan budaya yang sering menghalangi orang-orang yang terpinggirkan dari akses ke pendidikan yang layak.

Keterlibatan aktif dalam komunitas, di sisi lain, mengarahkan pendidikan menjadi lebih mudah diakses oleh kelompok yang sebelumnya terpinggirkan, seperti anak-anak dari keluarga miskin, pekerja anak, atau orang yang tinggal di daerah terpencil. Komunitas dapat membantu mengurangi hambatan akses dan menciptakan program pendidikan yang berfokus pada kebutuhan komunitas, seperti kelas malam atau kursus keterampilan. Pendidikan dapat menjadi alat yang nyata untuk mendorong setiap anggotanya melalui kerjasama yang erat dan dukungan komunitas yang berkelanjutan.

Komunitas berperan penting dalam memanfaatkan sumber daya lokal untuk mendukung pendidikan, salah satunya dengan mempekerjakan tenaga pengajar sukarela. Banyak anggota komunitas, termasuk orang tua dan profesional lokal, bersedia berkontribusi sebagai pengajar atau tutor untuk membantu siswa belajar. Tanpa mengeluarkan lebih banyak uang, kualitas pendidikan dapat ditingkatkan dengan kehadiran guru sukarela, terutama di daerah yang kekurangan guru. Selain itu, keterlibatan sukarela ini meningkatkan dukungan untuk pendidikan karena menciptakan ikatan yang lebih kuat antara sekolah dan masyarakat.

Peran komunitas dalam mendukung pendidikan juga bisa melalui pemanfaatan fasilitas publik, seperti balai desa, pusat komunitas, dan ruang pertemuan. Fasilitas-fasilitas ini dapat dioptimalkan sebagai tempat belajar, pelatihan, atau workshop tanpa perlu membangun infrastruktur baru. Pemanfaatan fasilitas publik membuat pendidikan lebih terjangkau dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Komunitas dapat mengurangi biaya dan memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara efektif dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada.

Sumber daya penting lainnya yang dimanfaatkan oleh komunitas untuk mendukung pendidikan adalah pengetahuan lokal. Pengetahuan tentang kebudayaan lokal, praktik pertanian, dan keterampilan tradisional dapat dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran, yang tidak hanya memperkaya pengalaman belajar siswa tetapi juga melestarikan pengetahuan

lokal yang ada. Karena itu, pemanfaatan pengetahuan lokal dalam pendidikan membantu pembuatan kurikulum yang relevan dan memberikan siswa keterampilan praktis yang bermanfaat bagi kehidupan di komunitas tersebut.

Pendidikan berbasis komunitas dapat membantu memperkuat identitas budaya lokal dengan mengintegrasikan nilai-nilai dan praktik budaya ke dalam kurikulum dan melibatkan masyarakat dalam pembuatan materi ajar. Pendidikan berbasis komunitas dapat mencerminkan bahasa, tradisi, dan adat istiadat lokal yang penting bagi komunitas tersebut saat mengembangkan kurikulum. Hal ini memastikan bahwa pengetahuan budaya tetap ada dan diwariskan kepada generasi berikutnya (Fauziddin, Suryanti, & Wiryanto, 2022). Di samping itu, memasukkan budaya lokal ke dalam pendidikan dapat membantu siswa merasa lebih terhubung dengan diri mereka sendiri, yang dapat meningkatkan dorongan dan keterlibatan mereka dalam proses belajar.

Lebih jauh, pendidikan berbasis komunitas membantu mengatasi kesenjangan pendidikan dengan menyediakan konteks yang lebih akrab dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa. Program pendidikan menjadi lebih inklusif dan dapat menjangkau siswa dari berbagai latar belakang karena pendekatan yang menggabungkan pengetahuan lokal dan metode pengajaran yang sesuai. Hal ini meningkatkan kesempatan belajar yang lebih adil dan merata serta mengurangi perbedaan yang sering terjadi karena ketidakcocokan antara kurikulum formal dan kebutuhan spesifik komunitas. Dengan demikian, pendidikan berbasis komunitas mengatasi kesenjangan akademik dan mendorong keberagaman dan pengakuan terhadap warisan budaya.

D. Strategi dan Program Pendidikan Berbasis Komunitas

Strategi dan program pendidikan berbasis komunitas bertujuan untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal, memastikan bahwa setiap komunitas memiliki akses ke pembelajaran yang sesuai dan bermanfaat.

Pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif anggota komunitas dalam desain, manajemen, dan pelaksanaan program pendidikan, sehingga program tersebut dapat lebih responsif terhadap potensi dan hambatan yang ada (Suwandi et al., 2024). Strategi ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan pendidikan dengan membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif dan efisien dengan menggunakan sumber daya lokal.

Untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan relevan dan dapat menjangkau semua anggota komunitas, sangat penting untuk merancang program pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Program yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, seperti kurikulum berbasis keterampilan atau pelatihan yang berkaitan dengan ekonomi lokal, dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan mengurangi kegagalan. Pendekatan ini membuat program pendidikan lebih efektif dalam mengurangi kesenjangan pendidikan karena tidak hanya memenuhi standar akademik tetapi juga mengatasi kebutuhan sosial dan praktis masyarakat.

Pendekatan responsif terhadap kebutuhan lokal membantu untuk menemukan dan mengatasi masalah spesifik yang dihadapi oleh komunitas. Masalah seperti keterbatasan akses ke sumber daya atau kesulitan bahasa adalah contoh dari masalah ini. Solusi yang dibuat akan lebih tepat sasaran dan diterima dengan baik jika anggota komunitas terlibat dalam pembuatan program. Hal ini menghasilkan pendidikan yang lebih mudah diakses, terutama untuk kelompok yang terpinggirkan atau kurang beruntung. Pada akhirnya, ini dapat mengurangi kesenjangan pendidikan yang ada. Program yang dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan lokal memberi semua siswa kesempatan yang lebih adil untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi.

Pelatihan dan pemberdayaan anggota komunitas adalah strategi penting untuk melibatkan mereka sebagai pendukung atau fasilitator program pendidikan (Gonçalves et al., 2022). Salah satu metode yang efektif adalah memberikan pelatihan tentang keterampilan dasar yang diperlukan untuk menjadi

pengajar atau mentor, seperti teknik mengajar, manajemen kelas, dan keterampilan komunikasi. Dengan pelatihan ini, anggota komunitas merasa lebih percaya diri dan siap untuk berkontribusi dalam pendidikan. Pelatihan ini memastikan mereka dapat memberikan dukungan yang baik dan relevan kepada siswa dan memperkuat perannya dalam proses pendidikan.

Pendampingan belajar adalah cara penting lainnya untuk mendorong anggota komunitas menjadi lebih baik daripada hanya memberikan pelatihan keterampilan dasar. Pendampingan ini melibatkan anggota komunitas yang mendampingi siswa secara individual atau kelompok, memberikan bimbingan tambahan, dan membantu mereka mengatasi kesulitan belajar. Dengan demikian, anggota komunitas dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman dan membantu siswa dengan kebutuhan khusus. Kombinasi pelatihan keterampilan dan pendampingan belajar meningkatkan keterlibatan komunitas dalam pendidikan, meningkatkan kualitas program, dan membuat lingkungan belajar yang lebih mendukung dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Autor, D., Figlio, D., Karbownik, K., Roth, J., & Wasserman, M. (2019). Family disadvantage and the gender gap in behavioral and educational outcomes. *American Economic Journal: Applied Economics*, 11(3), 338-381.
- Edwards Jr, D. B. (2019). Shifting the perspective on community-based management of education: From systems theory to social capital and community empowerment. *International journal of educational development*, 64, 17-26.
- Fauziddin, M., Suryanti, S., & Wiryanto, W. (2022). Community-Based Education and Regional Culture, Has It Been Put into Practice?. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 14(2), 1069-1078.
- Gonçalves, L. L., Parker, M., Luguetti, C., & Carbinatto, M. (2022). The facilitator's role in supporting physical education teachers' empowerment in a professional learning community. *Sport, Education and Society*, 27(3), 272-285.
- Hung, M., Smith, W. A., Voss, M. W., Franklin, J. D., Gu, Y., & Bounsanga, J. (2020). Exploring student achievement gaps in school districts across the United States. *Education and Urban Society*, 52(2), 175-193.
- Kaiser, N., & Barstow, C. K. (2022). Rural transportation infrastructure in low-and middle-income countries: a review of impacts, implications, and interventions. *Sustainability*, 14(4), 2149.
- Lawton, P. H., Walker, M. A., & Green, M. (2019). *Community-based art education across the lifespan: Finding common ground*. Teachers College Press.
- Luschei, T. F., & Soto-Peña, M. (2019). Beyond achievement: Colombia's Escuela Nueva and the creation of active citizens. *Educational alternatives in Latin America: New modes of counter-hegemonic learning*, 113-141.

- Markony, G. A. U. Z. (2020). Efforts towards education: Looking into non-government support for non-formal education in Bangladesh. *Building Sustainable Communities: Civil Society Response in South Asia*, 631-655.
- Ryan, B., Johnston, K. A., Taylor, M., & McAndrew, R. (2020). Community engagement for disaster preparedness: A systematic literature review. *International journal of disaster risk reduction*, 49, 101655.
- Shah, R. W. (2020). *Rewriting partnerships: Community perspectives on community-based learning*. University Press of Colorado.
- Suwandi, S., Aziz, A. A., Syukur, T. A., Rustandi, R., Ruslan, Z., Amsila, N., ... & Indarto, S. L. (2024). *Manajemen Pendidikan: Implementasi dalam Pengembangan Sekolah*.
- Voothaluru, R., Hinrichs, C. R., & Pakebusch, M. R. (2021). An Integrated Approach to Education Continuity in Rural Kenya. *An educational calamity*, 87.

TENTANG PENULIS



Suwandi, S.E., M.Ak., C.GL., C.PI., C.NFW., C.FTax., CPABC., C.FR., C.AFE., CBPA., C.AP., C.CSR., C.RM., CQMS., CBSP., CFAP., CTP., CPPSP.

Penulis menyelesaikan studi S1 di Program Studi Akuntansi STIE Yapi Bone (2013) dan S2 Bidang Akuntansi di Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (2016). Penulis merupakan Dosen Fakultas Bisnis Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada Parepare sejak tahun 2021. Ia tergabung sebagai anggota Asosiasi Pengelola Jurnal Indonesia (APJI), Asosiasi Riset Ekonomi dan Akuntansi Indonesia (AREAI), dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI). Pengalaman kerja diawali sebagai staf akuntansi di PDAM Kabupaten Bone (2013-2021). Pernah mengajar sebagai Dosen Yayasan di STIE Yapi Bone (2017-2021) dan Dosen Luar Biasa di STAIN Watampone (2017-2020) (saat ini IAIN Bone). Aktif menulis buku dan bahan ajar, kegiatan penelitian, serta pengabdian pada masyarakat. Beberapa artikelnya pernah dimuat di beberapa jurnal dan seminar/konferensi, baik nasional maupun internasional. Di samping itu, ia merupakan editor buku dan juga editor dan reviewer di beberapa jurnal nasional dan internasional.
Email: suwandiak307@gmail.com

BAB 9 | PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL UNTUK MASYARAKAT PEDESAAN

Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd.

IKIP Siliwangi

Email: lennynuraeni86@ikipsiliwangi.ac.id

A. Pendahuluan

Pembangunan dan pengembangan masyarakat desa merupakan suatu fondasi penting yang dapat memperkuat dan mendorong meningkatnya pembangunan bangsa. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang mandiri dan sejahtera memerlukan operasionalisasi bidang pendidikan secara luas. Bidang pendidikan tidak saja harus menyiapkan anak didik menjadi manusia berkualitas, tetapi harus aktif membantu masyarakat mengembangkan perannya yang menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan.

Pembangunan Pendidikan Nasional Indonesia mendapat roh baru dalam pelaksanaannya sejak disahkan Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sejalan dengan itu, 3 tolak ukur keberhasilan dalam pembangunan pendidikan nasional yakni: (1) Sistem pendidikan yang efektif, efisien, (2) Pendidikan Nasional yang merata dan bermutu, (3) Peran serta masyarakat dalam pendidikan.

Dalam upaya mendorong terwujudnya akses pendidikan khususnya pendidikan non formal di pedesaan maka diperlukan upaya untuk menjadikan pendidikan tersebut sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat. Prinsip fundamental penyelenggaraan pelayanan pendidikan non formal adalah

aktifnya peran atau partisipasi masyarakat dalam kemandirian dan kreativitas yang dinamis untuk membantu mengangkat derajat dan taraf hidup masyarakat yang kurang beruntung.

Penyelenggaraan pendidikan non formal saat ini diupayakan untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik yang belum mendapatkan kesempatan pendidikan dan tidak terjangkau di daerah pedesaan. Hal ini perlu diupayakan dan dilakukan dengan serius agar tujuan pendidikan dapat meningkatkan dan mencapai hasil yang lebih baik dan bermakna.

Tantangan dalam pembangunan bidang pendidikan di pedesaan adalah bagaimana upaya pelaksanaan program Pendidikan Untuk Semua (PUS) atau pendidikan non formal yang di dukung oleh Pemerintahan desa dan warga masyarakat.

Diharapkan dengan diselenggarakannya pendidikan non formal yang di kelola di desa ini dapat meningkatkan kemampuan perangkat pemerintahan desa dan elemen masyarakat lainnya dalam merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengembangkan dan membina kegiatan-kegiatan pendidikan non formal di wilayah pedesaan secara menyeluruh, koordinatif dan berkesinambungan. Pada akhirnya, akan menjadi media untuk terjadinya peningkatan kualitas hidup dan peran masyarakat dalam pembangunan bangsa Indonesia, baik secara individu maupun sosial.

B. Pembangunan Desa dan Pembangunan Pendidikan

Secara sosiologis, desa merupakan sebuah gambaran dari suatu kebutuhan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka (masyarakat) saling mengenal dengan baik corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam. Komunitas masyarakat di atas kemudian berkembang menjadi satu kesatuan hukum dimana kepentingan bersama penduduk menurut hukum adat dilindungi dan dikembangkan.

Dalam konteks ini, desa menemukan identitasnya sebagai sebuah kesatuan hukum yang memiliki hak untuk mengurus kepentingannya sendiri. Hak seperti ini sering disebut sebagai hak otonomi. Dengan demikian, desa secara alami telah memiliki otonominya sendiri semenjak masyarakat hukum ini terbentuk, dimana otonomi yang dimilikinya bukan pemberian pihak lain.

Kita sadari masih ada berbagai masalah dan kebutuhan masyarakat di desa antara lain masalah yang terkait dengan pendidikan, kesehatan dan tingkat ekonomi. Kondisi seperti ini sangat membutuhkan peran serta berbagai pihak dalam mengatasinya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Bila kita cermati lebih jauh lagi, kondisi desa sebenarnya banyak menyimpan potensi-potensi sumber daya yang belum tergali dan terberdayakan dengan optimal. Salah satu upaya minimal yang perlu dilakukan untuk dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa adalah dengan memberdayakan dan memanfaatkan potensi-potensi tersebut melalui aksi yang tepat guna dan berhasil guna tinggi.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, salah satu upayanya adalah bagaimana mengelola aset sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Untuk hal ini diperlukan penguatan kecakapan masyarakat agar mampu mendayagunakan basis ekonomi rakyat sumber daya desa. Ini merupakan suatu pilihan menuju kemandirian. Pilihan ini juga untuk menciptakan ruang bagi peran serta masyarakat dalam proses pembangunan.

Untuk itu diperlukan peran pemerintah desa dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa mempunyai pengaruh dan andil yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan lingkungan setempat di bidang pendidikan khususnya pendidikan non formal.

Pendidikan non formal memerlukan pendekatan multisektor dengan melibatkan berbagai instansi pemerintah daerah serta masyarakat di sektor formal, informal dan non formal.

Selaras dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka Visi pembangunan pendidikan nasional adalah Terwujudnya Manusia Indonesia Yang Cerdas, Produktif dan Berakhlak Mulia.

Beberapa indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pembangunan pendidikan nasional antara lain: Pertama, Sistem pendidikan yang efektif, efisien; Kedua, Pendidikan Nasional yang merata dan bermutu; Ketiga, Peran serta masyarakat dalam pendidikan.

Pembangunan pendidikan bukan hanya terfokus pada penyediaan faktor input pendidikan saja tetapi juga harus lebih memperhatikan faktor proses pendidikan. Input yang baik tidak otomatis menjadi jaminan terjadinya peningkatan mutu. Bahkan selain input dan proses masih juga memperhatikan keragaman peserta didik, kondisi lingkungan dan peran serta masyarakat.

Tiga sasaran penting yang ingin dicapai oleh pembangunan untuk meningkatkan kualitas kehidupan, yakni:

1. Pembangunan bidang pendidikan yang ditujukan untuk pencapaian peningkatan kecakapan/keterampilan, ketaqwaan dan keberadaban dalam kehidupan.
2. Pembangunan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan kesehatan masyarakat dan produktivitas dalam bekerja.
3. Pembangunan bidang ekonomi (daya beli) yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Ketiga sasaran pembangunan ini merupakan indikator keberhasilan suatu pembangunan manusia yang lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks pembangunan manusia ini lebih difokuskan pada peningkatan derajat manusia dan kualitas taraf hidup manusia.

C. Manajemen Desa Pendidikan Non Formal

Keterbatasan akses pendidikan di pedesaan masih menjadi masalah krusial bagi peningkatan pembangunan pendidikan di daerah. Kurangnya andil atau peran aktif pemerintahan desa dan komponen lembaga masyarakat lainnya dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan membuat kemajuan pembangunan pendidikan di pedesaan menjadi lambat.

Hal lain seperti kurangnya pemahaman dan sosialisasi berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan non formal bagi perangkat pemerintah desa memberikan dampak kurangnya dukungan, pembinaan dan koordinasi terhadap lembaga- lembaga masyarakat yang menyelenggarakan dan mengelola program pendidikan non formal. Di pedesaan pun, belum banyak wadah/lembaga yang berfungsi melakukan koordinasi, integrasi dan advokasi terhadap seluruh kegiatan pendidikan non formal (PNF) di tingkat desa.

Langkah konkrit yang perlu dilakukan adalah dengan merintis penyelenggaraan Pendidikan Non Formal di pedesaan. Dengan kata lain, mengembangkan rintisan model desa pendidikan non formal dimana suatu desa beserta pemerintahan desa dan komponen masyarakat lainnya mampu mengelola kegiatan-kegiatan Pendidikan Non Formal (PNF) yang mandiri dan lebih berkesinambungan.

Pengelolaan atau manajemen desa pendidikan non formal (PNF) merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sistematis dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengembangkan pendidikan non formal di wilayah pedesaan melalui peran aktif pemerintahan desa serta komponen lembaga masyarakat lainnya.

Tujuan pengelolaan pendidikan non formal di pedesaan ini untuk membangun daya dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan daya dan potensi yang dimilikinya.

Melalui kegiatan pendidikan khususnya pendidikan non formal akan tumbuh semangat masyarakat yang tinggi untuk membangun desanya sendiri. Dalam proses pengembangannya, tahapan yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan desa PNF antara lain:

1. Tahapan Awal

Pada tahap ini, dilakukan sosialisasi penyelenggaraan desa PNF. Sosialisasi dimaksudkan untuk membuka wawasan dan memberikan pemahaman serta kesamaan persepsi tentang penyelenggaraan pendidikan non formal di desa. Kegiatan sosialisasi ini merupakan upaya mencari kesepakatan dan komitmen perangkat pemerintah desa, serta komponen lembaga masyarakat lainnya untuk bersama-sama menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan pendidikan non formal di desa.

2. Tahap Kedua

Pada tahapan ini diperlukan penguatan kapasitas calon penyelenggara kegiatan pendidikan non formal di desa. Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan kegiatan yang berkualitas diperlukan manajemen program PNF yang dapat memobilisasi segala potensi dan sumber daya pendidikan di desa tersebut. Penguatan kapasitas disini lebih ditekankan pada aspek manajemen program dan kegiatan PNF serta lembaga penyelenggara pendukung program PNF yang telah ada di wilayah desa tersebut.

3. Tahap Ketiga

Perencanaan program merupakan tahapan yang perlu diperhatikan juga. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain melakukan identifikasi kelompok sasaran dan potensi sumberdaya sesuai dengan kebutuhan rencana program yang akan dilaksanakan. Selanjutnya dilakukan penyiapan dan koordinasi antara pemerintah desa, lembaga penyelenggara PNF, lembaga kemasyarakatan serta elemen masyarakat desa lainnya untuk menyusun rencana kerja aksi program PNF yang akan dilakukan.

4. Tahap Keempat

Potensi dan sumberdaya baik tenaga, kelompok sasaran, sarana dan keadaan lingkungan yang telah direncanakan akan diorganisir untuk dimobilisasi sesuai dengan kebutuhan perencanaan program.

Pengorganisasian dalam program pengelolaan pendidikan non formal di pedesaan lebih menekankan pada aspek: 1) Pengerahan atau mobilisasi potensi atau sumberdaya yang mendukung kegiatan, 2) Penyiapan dan pengadaan tenaga pendidik, pengelola program dan fasilitator desa dengan merekrut dari masyarakat desa sendiri maupun dari luar desa, 3) Pengadaan bahan dan alat kerja pendukung kegiatan sesuai program PNF yang dilaksanakan (suplemen pembelajaran, modul pembelajaran).

5. Tahap Kelima

Tahapan kelima yakni pelaksanaan program manajemen desa PNF merupakan program aksi dalam penyelenggaraan pengelolaan pendidikan non formal di desa. Pelaksanaan program pendidikan non formal lebih disesuaikan dengan jenis kegiatan yang fungsional dan kebutuhan masyarakat (hasil pendataan kelompok sasaran, tenaga personil yang ada, kebutuhan pembelajaran dan sarana pendukung lainnya).

6. Tahap Keenam

Melakukan pemantauan dan pembinaan program pengelolaan pendidikan non formal di desa disesuaikan dengan tugas dan peran para pelaku yang terlibat dalam program pengelolaan desa pendidikan non formal.

7. Tahap Ketujuh

Kegiatan evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut merupakan tahap akhir dalam penyelenggaraan program pengelolaan desa pendidikan non formal ini. Mekanisme kerja kegiatan ini lebih banyak menekan pada aspek evaluasi input, proses dan output yang telah dihasilkan selama

menyelenggarakan pelayanan pendidikan non formal di desa.

D. Solusi yang Diusulkan

Operasionalisasi penyelenggaraan pengelolaan desa pendidikan non formal ini, dalam pengembangannya terbagi ke dalam 10 (sepuluh) tahapan/langkah, sebagai berikut:

1. Langkah 1 Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Lembaga Desa.
2. Langkah Kedua: Penguatan Kapasitas Penyelenggara PNF di Desa
3. Langkah Ketiga: Pengkondisian dan Identifikasi Kelompok Sasaran
4. Langkah Keempat: Perencanaan Program PNF (Penyusunan Program PNF Desa
5. Langkah Kelima: Pengorganisasian Program PNF
6. Langkah Keenam: Pengorganisasian dan Mobilisasi Potensi dan Sumber daya
7. Langkah Ketujuh: Pelaksanaan Pendidikan Non Formal
8. Langkah Kedelapan: Pemantauan dan Pembinaan
9. Langkah Kesembilan: Evaluasi dan Pelaporan
10. Langkah Kesepuluh: Kegiatan Tindak Lanjut

Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengatur penggunaan Dana Desa tahun 2021. Peraturan ini memberikan panduan bagaimana desa dapat mengalokasikan dan memanfaatkan Dana Desa untuk mencapai tujuan pembangunan di tingkat desa secara efektif dan efisien.

Dengan adanya Permendesa PDTT 13/2020, diharapkan penggunaan Dana Desa tahun 2021 dapat lebih efektif dan tepat sasaran, terutama dalam membantu pemulihan ekonomi desa pasca pandemi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat pencapaian SDGs Desa.

Sustainable Development Goals (SDGs) Desa adalah adaptasi dari tujuan pembangunan berkelanjutan global yang disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan pembangunan di

tingkat desa di Indonesia. SDGs Desa menjadi panduan bagi pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan desa yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada kearifan lokal.

SDGs Desa bertujuan untuk menjadikan desa-desa di Indonesia mandiri, sejahtera, dan berdaya saing, serta mampu beradaptasi terhadap tantangan global, seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Selain itu terdapat **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024** merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Beberapa poin penting yang diatur dalam UU ini antara lain: **1)** Dana untuk Desa Konservasi, **2)** Tunjangan dan Dana Pensiun Kepala Desa, **3)** Kepala Desa Bisa Tamatan SMP, **4)** Masa Jabatan Kepala Desa, **5)** Fasilitas Perangkat Desa, **6)** Badan Musyawarah Desa (Bamus Desa), **7)** Anggaran Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhak, Ishak. (2012). *Penelitian Tindakan Dalam Pendidikan Non Formal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka.
- PermendesaPDTT: 21/2020
- Putra, Wegi Trio, Ismaniar, I. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Pendahuluan Proses pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan nonformal sebenarnya merupakan upaya memberdayakan masyarakat untuk memperkuat seluruh eksistensinya . Menitikberatkan pada kegiatan yang seharusnya. *Jambura*, 1(2), 1–10.
- Safri, Miradj, and Sumarno. “Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Melalui Proses Pendidikan Non Formal, Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Halmahera Barat.” *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 1 (2014): 101–12. <https://doi.org/10.21831/jppm.v1i1.2360>
- Sagala, Saiful (2000). Manajemen dan Kebijakan Otonomi Pendidikan Untuk Pemberdayaan Masyarakat, Makalah, PPS, UPI, Bandung.
- Setijawan, A. (2018). Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan dalam Perspektif Sosial Ekonomi. *Jurnal Planoearth*, 3(1), 7. <https://doi.org/10.31764/jpe.v3i1.213>
- Suharto. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, KajianStrategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Refika Aditama.
- Sungkowo, Edy Mulyono. “Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Jalur Pendidikan Non Formal Di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang”. *Edukasi* 2, no. 1 (2017).
- UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Transformasi tata Kelola pemerintah desa dan kelembagaan desa.

- Vina, Salviana Darvina Soearwo, Zuriah Nurul, Yuliati Ratih, and Suwignyo. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Non Formal Berbasis Potensi Lokal Dalam Membangun Desa Wisata Adat." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 2, no. 2 (2017): 96-102
- Wahyuni, D. (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul. *Aspirasi*, 9(1), 83-100.
- Zeulvia, Dra. Zusana, Dra. Mira Rosana (1999). Bekerja Bersama Masyarakat, Buku Saku Konsultan Pendamping, SWADAMAS, Jayagiri.
- Yulidar, Y., Syuraini, S., & Ismaniar, I. (2018). Gambaran Minat Warga Belajar Mengikuti Kegiatan Randai di Sanggar Seni Mustika Minang Duo Kota Pariaman. *Spektrum: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(2), 245. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i2.9489>
- Yunus, Ibrahim dan Tim Swadamas (2007). Pembangunan Desa Terpadu, Ditjen PMD 1997. Departemen Dalam Negeri,
- Yuse, A. P., Jamaris, J., & Ismaniar, I. (2018). Penerapan Pembelajaran Orang Dewasa oleh Instruktur Pelatihan Keterampilan Menjahit di SPNF SKB Lima Puluh Kota. *Spektrum: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(1), 16. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i1.9199>

TENTANG PENULIS



Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd.

Penulis merupakan Dosen Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Terdapat beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya *E-Learning No Ribet* (Teori dan Aplikasinya Panduan Praktis untuk Dosen, Guru, Calon Guru dan Mahasiswa, diterbitkan di Pena Persada), Buku Strategi Pemberdayaan Masyarakat, diterbitkan di CV. Bayfa Cendekia Indonesia, Buku Langkah Strategis Penurunan Stunting, diterbitkan di CV. Eureka Media Aksara. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu.
Email: lennynuraeni86@ikipsiliwangi.ac.id

BAB 10

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL SEBAGAI UPAYA MENGURANGI KESENJANGAN

Dr. Taufik Abdillah Syukur, MA.
STAI AL-HIKMAH Jakarta
Email: abdillah2803@gmail.com

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa yang sangat kaya. Keanekaragaman ini menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam menjaga keharmonisan sosial. Namun, di balik keragaman tersebut, kesenjangan sosial, budaya, dan ekonomi masih menjadi masalah yang signifikan. Perbedaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi sering kali menyebabkan ketidaksetaraan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Kesenjangan ini tidak hanya terjadi antar wilayah, tetapi juga antar kelompok sosial dan budaya.

Pendidikan, sebagai salah satu pilar pembangunan bangsa, memiliki peran strategis dalam mengatasi berbagai bentuk kesenjangan tersebut. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural bukan hanya tentang pengakuan terhadap keberagaman, tetapi juga merupakan upaya untuk membangun kesadaran kritis dan empati antar individu dari latar belakang yang berbeda. Melalui pendidikan multikultural, siswa diajarkan untuk memahami, menghargai, dan berinteraksi secara positif dengan berbagai perbedaan yang ada. Dengan

demikian, pendidikan multikultural dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan budaya.

Namun, implementasi pendidikan multikultural di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Kurikulum yang belum sepenuhnya inklusif, minimnya pemahaman tentang konsep multikultural, serta kurangnya dukungan dari berbagai pihak menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam mengintegrasikan nilai-nilai multikultural ke dalam sistem pendidikan, mulai dari tingkat kebijakan hingga praktik di lapangan.

Bab ini akan membahas konsep pendidikan multikultural, peran pentingnya dalam mengurangi kesenjangan, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat pendidikan multikultural di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pendidikan multikultural, diharapkan kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan harmonis.

B. Konsep Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural merupakan konsep pendidikan yang berfokus pada pengakuan, pemahaman, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya dalam masyarakat. Dari perspektif sosiologis, pendidikan multikultural dipandang sebagai upaya untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif dengan mengurangi ketidaksetaraan yang didasarkan pada perbedaan etnis, budaya, dan agama. Sedangkan dari sudut pandang psikologis, pendidikan multikultural berperan dalam membentuk kesadaran dan identitas individu agar lebih terbuka dan toleran terhadap perbedaan.

James A. Banks, salah satu tokoh terkemuka dalam bidang ini, mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai upaya untuk mereformasi institusi pendidikan sehingga peserta didik dari berbagai latar belakang dapat meraih kesuksesan akademis yang setara. Sementara itu, Nieto dan Bode menekankan bahwa pendidikan multikultural tidak hanya tentang penambahan

konten budaya minoritas ke dalam kurikulum, tetapi juga tentang perubahan paradigma dalam cara pandang dan praktik pendidikan agar lebih responsif terhadap keberagaman.

Pendidikan multikultural juga mencakup ruang lingkup yang luas, mulai dari penyusunan kurikulum yang inklusif, metode pengajaran yang adil, hingga penciptaan lingkungan belajar yang kondusif bagi semua siswa, tanpa memandang latar belakang budaya, etnis, atau agamanya. Dengan demikian, pendidikan multikultural tidak hanya diterapkan di ruang kelas, tetapi juga dalam kebijakan pendidikan, interaksi sosial, dan kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah.

Pendidikan multikultural terdiri dari beberapa unsur penting yang saling berkaitan untuk membangun suasana belajar yang inklusif dan berkeadilan. Beberapa unsur tersebut antara lain:

1. Konten Kurikulum yang Beragam: Kurikulum harus mencerminkan keragaman budaya dan sejarah berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya. Ini mencakup bahan ajar yang beragam, studi kasus dari berbagai latar belakang, serta materi yang memperkaya pemahaman siswa tentang masyarakat multikultural.
2. Metode Pengajaran yang Inklusif: Metode pengajaran harus dirancang sedemikian rupa agar dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar dan latar belakang siswa. Guru harus mampu menggunakan pendekatan yang variatif dan tidak bias agar semua siswa merasa dihargai dan didukung.
3. Pengembangan Kesadaran Kritis: Pendidikan multikultural mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang isu-isu sosial, politik, dan ekonomi yang terkait dengan keberagaman. Siswa diajak untuk memahami dan mengatasi prasangka, diskriminasi, serta ketidakadilan sosial.
4. Pembelajaran Antarbudaya: Interaksi antar siswa dari berbagai latar belakang perlu difasilitasi agar mereka dapat belajar satu sama lain, berbagi pengalaman, dan membangun pemahaman serta rasa hormat yang lebih mendalam.

5. Lingkungan Belajar yang Mendukung: Sekolah harus menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua siswa, bebas dari diskriminasi dan bias. Lingkungan ini harus mendorong kerjasama, komunikasi, dan pemahaman antar budaya.

Salah satu tujuan utama pendidikan multikultural adalah untuk meningkatkan kesadaran peserta didik akan keberagaman yang ada di sekitar mereka. Siswa diajarkan untuk mengenali dan menghargai perbedaan yang ada, baik dalam bentuk budaya, bahasa, agama, maupun kebiasaan. Dengan kesadaran ini, siswa diharapkan mampu memahami bahwa perbedaan bukanlah penghalang, tetapi justru merupakan kekayaan yang harus diapresiasi dan dijaga. Kesadaran ini penting untuk membangun sikap inklusif dan empati terhadap orang lain.

Pendidikan multikultural berlandaskan pada prinsip-prinsip kesetaraan, inklusivitas, dan penghargaan terhadap perbedaan. Prinsip kesetaraan menekankan bahwa semua siswa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Prinsip inklusivitas mengacu pada penciptaan lingkungan belajar yang ramah dan mendukung bagi semua siswa, tanpa kecuali. Sedangkan prinsip penghargaan terhadap perbedaan mendorong adanya pengakuan dan apresiasi terhadap keunikan masing-masing individu.

Secara keseluruhan, pendidikan multikultural bukan hanya sekadar pendekatan dalam pendidikan, tetapi juga merupakan strategi untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan damai. Dengan memahami konsep, tujuan, dan pentingnya pendidikan multikultural, diharapkan kita semua dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan belajar dan masyarakat yang lebih menghargai perbedaan dan mengurangi kesenjangan yang ada.

C. Kesenjangan Sosial dan Pendidikan di Indonesia

Kesenjangan sosial di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor:

1. **Faktor Ekonomi:** Kesenjangan ekonomi merupakan salah satu penyebab utama ketidaksetaraan sosial di Indonesia. Perbedaan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi, kesempatan kerja, dan pendapatan menciptakan jurang yang lebar antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Ketidakmerataan pembangunan di berbagai daerah juga memperburuk kondisi ini, di mana wilayah perkotaan cenderung lebih maju dibandingkan dengan daerah pedesaan. Sebagai contoh, daerah seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung memiliki infrastruktur yang lebih baik dan akses yang lebih luas terhadap layanan publik dibandingkan dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Nusa Tenggara.
2. **Faktor Budaya:** Faktor budaya juga berperan dalam menciptakan kesenjangan sosial. Budaya patriarki, misalnya, sering kali menjadi hambatan bagi perempuan dalam mengakses pendidikan dan pekerjaan. Selain itu, masyarakat adat atau kelompok minoritas sering kali mengalami diskriminasi budaya yang mengakibatkan mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan dan pekerjaan. Budaya lokal yang kuat di beberapa daerah juga dapat menyebabkan terjadinya isolasi sosial bagi pendatang atau kelompok lain yang berbeda.
3. **Faktor Pendidikan:** Ketidaksetaraan dalam akses dan kualitas pendidikan merupakan faktor penyebab kesenjangan sosial yang signifikan. Anak-anak dari keluarga dengan latar belakang ekonomi rendah sering kali tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Hal ini disebabkan oleh biaya pendidikan yang tinggi, keterbatasan fasilitas pendidikan di daerah terpencil, dan kurangnya dukungan dari keluarga yang mungkin tidak menganggap pendidikan sebagai prioritas.

utama. Selain itu, adanya perbedaan dalam kurikulum dan kualitas pengajaran antara sekolah-sekolah di kota besar dan daerah pedesaan semakin memperlebar kesenjangan ini.

Kesenjangan sosial memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Ketidaksetaraan ini dapat memicu ketegangan sosial, yang berpotensi menyebabkan konflik antar kelompok. Kesenjangan juga dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat miskin, mengakibatkan rendahnya tingkat kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan mereka. Lebih jauh lagi, kesenjangan sosial juga mempengaruhi mobilitas sosial, di mana masyarakat yang berada di kelas ekonomi bawah sulit untuk meningkatkan taraf hidupnya. Ketidakmampuan untuk mengakses pendidikan yang berkualitas membuat mereka sulit bersaing di pasar kerja, yang pada akhirnya memperkuat lingkaran kemiskinan.

Secara keseluruhan, kesenjangan sosial dan pendidikan di Indonesia masih menjadi tantangan besar yang harus diatasi. Diperlukan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan dari pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan inklusif, serta mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat.

D. Peran Pendidikan Multikultural dalam Mengurangi Kesenjangan

1. Pendidikan Multikultural sebagai Sarana Peningkatan Kesadaran

Pendidikan multikultural berfungsi sebagai sarana yang efektif untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberagaman dalam masyarakat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai multikultural ke dalam proses pendidikan, peserta didik dapat belajar untuk menghargai perbedaan serta memahami bahwa keberagaman adalah kekayaan yang harus dihormati dan dirayakan, bukan alasan untuk diskriminasi atau konflik.

Pendidikan multikultural bertujuan untuk membangun kesadaran akan keberagaman etnis, budaya, agama, dan bahasa dalam masyarakat. Melalui kurikulum yang inklusif dan beragam, peserta didik diajarkan untuk menghargai perbedaan ini dan melihatnya sebagai bagian integral dari identitas nasional dan kemanusiaan. Misalnya, pengajaran tentang budaya dan tradisi berbagai kelompok etnis di Indonesia dapat membantu siswa memahami bahwa setiap budaya memiliki nilai dan kontribusi yang unik bagi bangsa. Selain itu, diskusi tentang sejarah, kontribusi, dan tantangan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok minoritas juga dapat membentuk perspektif yang lebih luas dan menghargai perbedaan.

Selain meningkatkan kesadaran, pendidikan multikultural juga berperan dalam mengembangkan empati dan toleransi. Dengan memahami latar belakang budaya, sosial, dan sejarah dari berbagai kelompok, peserta didik dapat lebih mudah menempatkan diri mereka pada posisi orang lain, mengurangi prasangka, dan mengembangkan rasa hormat terhadap perbedaan. Contoh konkret dari pendekatan ini adalah melalui kegiatan diskusi, *role-playing*, atau proyek bersama yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis tentang multikulturalisme, tetapi juga pengalaman praktis yang membantu siswa merasakan langsung dinamika keberagaman dan pentingnya toleransi.

2. Implementasi Pendidikan Multikultural di Sekolah

Pendidikan multikultural harus diimplementasikan secara sistematis dan terencana dalam lingkungan sekolah. Hal ini mencakup integrasi nilai-nilai multikultural ke dalam kurikulum serta pelatihan guru agar mereka mampu mengajar dengan perspektif yang inklusif dan sensitif terhadap keberagaman.

Untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang benar-benar multikultural, penting untuk mengintegrasikan materi-materi tentang keberagaman budaya, etnis, dan agama ke dalam kurikulum. Kurikulum yang multikultural tidak hanya berfokus pada pengajaran fakta-fakta tentang berbagai budaya, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Misalnya, mata pelajaran sejarah dapat memasukkan perspektif berbagai kelompok etnis dalam narasi sejarah nasional, atau mata pelajaran bahasa dapat mengenalkan literatur dari berbagai tradisi budaya. Dengan demikian, siswa akan terbiasa melihat keberagaman sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka.

Peran guru sangat penting dalam keberhasilan implementasi pendidikan multikultural. Guru harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep multikulturalisme dan mampu menerapkannya dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, pelatihan bagi guru mengenai pendidikan multikultural menjadi hal yang sangat penting. Pelatihan ini dapat mencakup pemahaman tentang dinamika sosial budaya di masyarakat, teknik mengelola kelas yang heterogen, serta cara-cara mengatasi konflik berbasis perbedaan yang mungkin muncul di dalam kelas. Dengan pelatihan ini, guru dapat lebih peka terhadap kebutuhan siswa dari berbagai latar belakang dan mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif.

3. Pemberdayaan Melalui Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tetapi juga tentang pemberdayaan. Melalui pendidikan yang inklusif, semua peserta didik, tanpa memandang latar belakang mereka, diberi kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang.

Salah satu tujuan utama pendidikan multikultural adalah memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Ini berarti menghilangkan hambatan-hambatan yang mungkin

dihadapi oleh kelompok-kelompok yang kurang terwakili, seperti minoritas etnis, agama, atau sosial ekonomi. Langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan meliputi penyediaan beasiswa atau bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, serta program-program remedial untuk siswa yang kesulitan mengikuti pelajaran. Dengan memberikan kesempatan yang sama, pendidikan multikultural membantu mengurangi kesenjangan dan membuka jalan bagi mobilitas sosial yang lebih baik.

Pendidikan multikultural juga bertujuan untuk mengurangi diskriminasi dan marginalisasi yang dialami oleh kelompok-kelompok tertentu. Misalnya, dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan pendidikan anak-anak dari kelompok minoritas atau daerah terpencil, serta memastikan bahwa kurikulum dan metode pengajaran tidak mendiskriminasikan atau mengabaikan mereka. Program-program inklusi yang melibatkan seluruh siswa dalam kegiatan-kegiatan sekolah dapat membantu menghilangkan stigma dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih adil dan harmonis.

4. Dampak Positif Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kohesi sosial dan pengurangan konflik berbasis identitas. Dengan menciptakan pemahaman yang lebih baik antar kelompok, pendidikan ini dapat menjadi fondasi bagi masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif.

Pendidikan multikultural mendorong integrasi sosial dengan cara mengajarkan nilai-nilai kesetaraan dan saling menghormati. Ketika peserta didik belajar untuk menghargai perbedaan dan bekerja sama tanpa memandang latar belakang budaya, etnis, atau agama, mereka akan lebih mudah berinteraksi dan bekerja sama di luar lingkungan sekolah. Hal ini secara tidak langsung memperkuat kohesi sosial, mengurangi potensi segregasi, dan menciptakan komunitas yang lebih kohesif dan inklusif.

Pendidikan multikultural juga berperan dalam mengurangi konflik yang disebabkan oleh perbedaan identitas. Ketika peserta didik diajarkan untuk memahami dan menghargai perbedaan, mereka akan lebih mampu mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif dan damai. Pendidikan multikultural menekankan pentingnya dialog dan resolusi konflik yang berbasis pada saling pengertian dan penghormatan, daripada menggunakan kekerasan atau diskriminasi. Dengan demikian, pendidikan multikultural dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih damai dan stabil, baik di dalam sekolah maupun di masyarakat luas.

Secara keseluruhan, pendidikan multikultural memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Dengan menanamkan nilai-nilai keberagaman, inklusivitas, dan kesetaraan dalam sistem pendidikan, kita dapat membangun generasi yang lebih sadar akan pentingnya hidup bersama dalam perbedaan, dan siap untuk menjadi agen perubahan bagi masyarakat yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Banks, J. A., & Banks, C. A. M. (Eds.). (2010). *Multicultural Education: Issues and Perspectives* (7th ed.). Wiley.
- Bennett, C. I. (2011). *Comprehensive Multicultural Education: Theory and Practice* (8th ed.). Pearson.
- Gay, G. (2018). *Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, and Practice* (3rd ed.). Teachers College Press.
- Gollnick, D. M., & Chinn, P. C. (2017). *Multicultural Education in a Pluralistic Society* (10th ed.). Pearson.
- Grant, C. A., & Sleeter, C. E. (2011). *Doing Multicultural Education for Achievement and Equity* (2nd ed.). Routledge.
- Parekh, B. (2006). *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
- Sleeter, C. E., & McLaren, P. L. (1995). *Multicultural Education, Critical Pedagogy, and the Politics of Difference*. SUNY Press.
- Taufik Abdillah Syukur (2022). *Pengantar Studi Islam*. Penerbit Karya Bakti Makmur (Kbm) Indonesia.
- Taufik Abdillah Syukur (2020). *Ilmu Pendidikan Islam*, Rajawali Pers.
- Taufik Abdillah Syukur & Siti Rafiqoh (2022). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Patju Kreasi.
- Tilaar, H. A. R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Grasindo.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). Pemerintah Republik Indonesia.
- Wibowo, A. (2012). *Pendidikan Multikultural: Upaya Memahami Perbedaan di Sekolah*. Rajawali Press.

TENTANG PENULIS



Dr. Taufik Abdillah Syukur, MA.

Penulis lahir di Jakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 Studi Islam di Universitas Yarmouk Jordania, S2 Pengkajian Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan S3 Pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, lulus sebagai wisudawan terbaik. Aktivitas saat ini sebagai Dosen Bidang Ilmu Pendidikan Islam pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Dpk pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana STAI ALHIKMAH Jakarta, Ketua jurusan Tarbiyah STAI ALHIKMAH Jakarta, Direktur Azhari Islamic School Cilandak.
Email: abdillah2803@gmail.com